BUPATI KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN 2005-2010

DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENGGARONG 2010

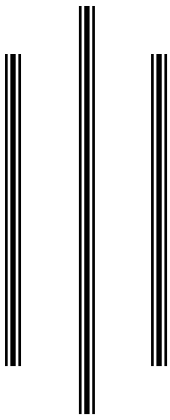

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL…….….		i
DAFTAR ISI …….……..		ii
DAFTAR TABEL ……..…		iii
DAFTAR GRAFIK ……...		iv
BAB I.	**PENDAHULUAN**	1
	A. Dasar Hukum …….	1
	B. Gambaran Umum Daerah ……	8
	C. Kondisi Perekonomian …….…….	13
BAB II.	**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH**	40
	A. Visi dan Misi …….	40
	B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ……	40
	C. Prioritas Pembangunan Daerah …….	47
BAB III.	**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	55
	A. Pengelolaan Pendapatan Daerah ……	56
	A.1. Target dan realisasi Pendapatan …….	57
	A.2. Permasalahan Dan Solusi ……	65
	B. Pengelolaan Belanja Daerah …….	67
	B.1. Kebijakan Belanja Daerah …….	70
	B.2. Permasalahan dan Solusi …….	77
	C. Kebijakan Pembiayaan Daerah ……	79
	C.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah ……	79
	C.2. Permasalahan dan Solusi …….	82

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 84

I. URUSAN WAJIB 85

i PENDIDIKAN 85

ii KESEHATAN 97

iii LINGKUNGAN HIDUP 106

iv PEKERJAAN UMUM 111

v PENATAAN RUANG 125

vi PERENCANAAN PEMBANGUNAN 127

vii PERUMAHAN 136

viii KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 138

ix PENANAMAN MODAL 144

x KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 153

xi KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 155

xii KETENAGAKERJAAN 159

xiii KETAHANAN PANGAN 164

xiv PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK..... 169

xv KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 171

xvi PERHUBUNGAN 173

xvii KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 182

xviii PERTANAHAN 184

xix KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 191

xx OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 200

xxi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 237

xxii SOSIAL 242
xxiii KEBUDAYAAN 255
xxiv STATISTIK 258
xxv ARSIP 260
xxvi PERPUSTAKAAN 261

II. URUSAN PILIHAN 263
i KELAUTAN DAN PERIKANAN 263
ii PERTANIAN 268
iii KEHUTANAN 281
iv ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 287
v PARIWISATA 290
vi INDUSTRI 295
vii PERDAGANGAN 297
viii KETRANSMIGRASIAN 300

BAB V. PENYELENGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang diterima 306
A.1. Dasar Hukum 306
A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 307
A.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 308
A.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya 309
A.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran 325
A.6. Permasalahan Dan Solusi 328

BAB VI. PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 332

A. Kerjasama Antar Daerah …….. 332

B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga ……. 333

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 336

D. Pembinaan Batas Wilayah …….. 340

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana …….. 361

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ……..…..…… 366

BAB VII PENUTUP ……..…..…… 375

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.3.	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2001-2009……	27
Tabel 1.4.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%) …….	29
Tabel 1.5.	Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2002-2009 (%) ……	31
Tabel 1.6.	Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2001-2009 (%) ……	33
Tabel 1.7.	Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-2009 …….	35
Tabel.3.1.	Indikator Kinerja Bidang pendidikan Selama Tahun 2005-2009 …….	95
Tabel.3.2.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang pendidikan selama Tahun 2005-2010 …….	96
Tabel.3.3.	Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Selama Tahun Tahun 2005-2009 (%) ……	103
Tabel.3.4.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kesehatan Selama Tahun 2005-2010 ……	104
Tabel.3.5.	Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Selama Tahun 2005-2009 (%)……	110
Tabel.3.6.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Lingkungan Hidup selama Tahun 2005-2010 ……	110
Tabel.3.7.	Presentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Selama Tahun 2005-2009 ……	120

Tabel.3.8.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pekerjaan Umum selama Tahun 2005-2010 ……	121
Tabel.3.9.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Penataan Ruang selama Tahun 2005-2010 ……	126
Tabel.3.10.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perencanaan Pembangunan selama Tahun 2005-2010 …….	135
Tabel.3.11.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perumahan selama Tahun 2005-2010 ……	137
Tabel.3.12.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kepemudaan dan Olah Raga selama Tahun 2005-2010 ……	141
Tabel.3.13.	Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2005-2009 ……	148
Tabel.3.14.	Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2005-2009 ……	149
Tabel.3.15.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Penanaman Modal selama Tahun 2005-2010 ……	150
Tabel.3.16.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Koperasi dan UKM selama Tahun 2005-2010 ……	155
Tabel.3.17.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kependudukan dan Catatan Sipil selama Tahun 2005-2010 ……	158
Tabel.3.18.	Capain kinerja bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009 ……	162
Tabel.3.19.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Ketenagakerjaan selama Tahun 2005-2010 ……	163
Tabel.3.20.	Ketersediaan pangan utama (beras siap konsumsi) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2006-2009 ……	167
Tabel.3.21.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Ketahanan Pangan selama Tahun 2007-2010 ……	167

Tabel.3.22.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2005-2010 ……	171
Tabel.3.23.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama Tahun 2005-2010 ……	172
Tabel.3.24.	Perbandingan jumlah angkutan darat dengan banyaknya penumpang tahun 2005-2010 ……	179
Tabel.3.25.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perhubungan selama Tahun 2005-2010 ……	179
Tabel.3.26.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2005-2010 ……	184
Tabel.3.28.	Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri …….	197
Tabel.3.29.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama Tahun 2005-2010 ……	197
Tabel.3.30.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian selama Tahun 2005-2010 ……	232
Tabel.3.31.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun 2005-2010 …….	241
Tabel.3.32.	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2005 – 2009 ……..	251
Tabel.3.33.	Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Sosial Selama Tahun 2005-2009 …….	252
Tabel.3.34.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Sosial selama	

	Tahun 2005-2010 …….	252
Tabel.3.35.	Indikator Kinerja Kunci Bidang Kebudayaan tahun 2005-2009 …….	257
Tabel.3.36.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kebudayaan selama Tahun 2005-2010 …….	258
Tabel.3.37.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Statistik selama Tahun 2005-2010 …….	259
Tabel.3.38.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Arsip selama Tahun 2005-2010 …….	260
Tabel.3.39.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perpustakaan selama Tahun 2005-2010 …….	262
Tabel.3.40.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2005-2010 …….	267
Tabel.3.41.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pertanian selama Tahun 2005-2010 ……..	276
Tabel.3.42.	Jenis Komoditi, Produksi dan Hasil Panen Perkebunan Rakyat (PR) Tahun 2005-2009 ……..	277
Tabel.3.43.	Jenis Komoditi, Produksi dan Hasil Panen Perkebunan Besar Swasta (PBS) Tahun 2005-2009	278
Tabel.3.44.	Jenis Komoditi, Produksi dan Hasil Panen Perkebunan Besar Negara (PBN) Tahun 2005-2009	278
Tabel.3.45.	Capaian kinerja bidang kehutanan tahun 2005-2010	285
Tabel.3.46.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kehutanan selama Tahun 2005-2010 ……..	285
Tabel.3.47.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Energi dan Sumber Daya Mineral selama Tahun 2005-2010 ……..	290
Tabel.3.48.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pariwisata selama Tahun 2005-2010 ……..	294
Tabel.3.49.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Industri selama Tahun 2005-2010 ……..	296

Tabel.3.50.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perdagangan selama Tahun 2005-2010 ……..	299
Tabel.3.51.	Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Ketransmigrasian selama Tahun 2005-2010 …….	303
Tabel 4.1.	Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006	325
Tabel 4.2.	Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007	326
Tabel 4.3.	Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008	327
Tabel 4.4.	Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009	327
Tabel 5.1.	Rincian Jumlah Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Periode 2005-2010 ……	334
Tabel 5.2.	Rincian Jumlah Kegiatan Rakor Rutin Periode 2005-2010 …….	337
Tabel 5.3.	Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara …….	366

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Kurun Waktu 2004-2009	12
Grafik 3.1.	Kondisi dan Panjang Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009	119
Grafik 3.2.	Kondisi dan panjang jalan di 17 kecamatan tahun 2009	120
Grafik 3.3.	Grafik Rencana dan Realisasi PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009	148
Grafik 3.4.	Grafik Rencana dan Realisasi PMA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009	149
Grafik 3.5.	Kepemilikan KTP penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2009	157
Grafik 3.6.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk tahun 2005-2009	157
Grafik 3.7.	Jumlah Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2009	235
Grafik 3.8.	Presentase Produksi Padi atau bahan pangan utama lainnya dan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009	276
Grafik 3.9.	Kontribusi Sektor Pertambangan pada pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009	289
Grafik 3.10.	Kontribusi Sektor Industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009	296
Grafik 3.11.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009 (tanpa Migas)	299
Grafik 3.12.	Capaian indikator Kinerja kunci bidang Ketenagakerjaan tahun 2005-2009	302

BAB I.
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Literatur sejarah menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 1863 Kerajaan Kutai Kertanegara mulai menjadi daerah Swapraja sebagai bagian dari Kerajaan Hindia Belanda. Sementara pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 daerah Swapraja Kutai Kertanegara mendapat pengaturan tersendiri dan mempunyai kedudukan istimewa.

Pada tahun 1945 berhasil diduduki kembali oleh Belanda dan pada tahun 1947 Kalimantan Timur dibentuk menjadi Federasi dengan status Satuan Kertanegaraan yang berdiri sendiri dan terdiri atas daerah-daerah Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir dengan sebutan Swapraja. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada tanggal 10 April 1950 Federasi Kalimantan Timur masuk dalam Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta).

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1953 berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 maka daerah Swapraja Kutai Kertanegara diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom atau daerah istimewa tingkat Kabupaten. Sementara pada tahun 1959 status daerah istimewa tersebut dihapus melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 dan dibagi menjadi Daerah Swatantra yang meliputi : Kotapraja Balikpapan, Kotapraja Samarinda dan Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995, pada tahun 1995/1996 Kabupaten Dati II Kutai menjadi salah satu Daerah

percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi 3 daerah kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2001, maka nama Kabupaten Kutai berubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama Pemerintahan Orde Baru, kekayaan budaya dan kemajemukan Indonesia terasa sangat diseragamkan untuk memudahkan Pemerintah Pusat mengontrol dan menguasai daerah hingga sumber daya alamnya. Ketika pemerintahan itu digantikan oleh pemerintahan baru, muncul tuntutan otonomi dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Dalam situasi dan kondisi yang demikian sangatlah arif jika daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dirinya sendiri.

Kemudian diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemeirntahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang pada dasarnya menekankan pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, atau dengan kata lain menekankan pada desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dilaksanakan ternyata kedua undang-undang tersebut dinilai banyak mengalami hambatan yang bersumber dari kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya. Hamnatan-hambatan tersebut dalam implementasinya sering menimbulkan konflik kepentingan, terutama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Karena kondisi tersebut , kemudian muncul tuntutan

revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 untuk mencegah situasi yang tidak terkendali.

Tututan revisi UU 22/99 akhirnya dipenuhi oleh pemerintah yang bersama-sama DPR-RI beberapa bulan menggodok berbagai masukan yang diperoleh dari masyarakat, dan akhirnya pada tanggal 29 September 2004 DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pengganti UU 22/99 untuk dijadikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang beru dan pada tanggal 5 Oktober 2004 ditanda tangani oleh Presiden dengan sebutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang di dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih sederhana dan cepat.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar *(checks and balances)*, artinya tidak saling mendominasi.

Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berlaku saat ini telah menempatkan posisi yang setara antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang tercermin antara lain di dalam membuat kebijakan daerah

berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya maisng-masing. Begitu pula dalam penetapan anggaran dilakukan bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan pihak eksekutif tidak sendirian dalam menyikapi dan menanggapi kritik, saran dan harapan yang telah mampu memberikan sinergi terhadap pemecahan permasalahan maupun persoalan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat komplek agar pijakan moral atas mandat peningkatan kesejahteraan masyarakat terpanuhi.

Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam proses kebersamaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atas kekurangan maupun keberhasilan serta pemetaan langkah langkah kedepan untuk perbaikan dan sekaligus sebagai peletakan pondasi yang kokoh dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan.

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tercermin pula dari adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban dimaksud adalah merupakan salah satu kewajiban Kepala daerah sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Implementasi pasal 27 ayat 2 tersebut kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006 meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2007.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, Pengawasan

Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006.
21. Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007.
23. Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2009.
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK. 210.a/2005 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2010.

27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007.
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008.
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008.
30. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.

Selain peraturan perundangan tersebut, penyelenggaraan Laporan pertanggung jawaban tersebut juga mengacu kepada beberapa dokumen perencanaan jangka panjang lain yang menjadi produk hukum. Dengan demikian, laporan keterangan pertanggungjawaban juga meliputi beberapa tolok ukur yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai "political will" atas keinginan untuk menilai kinerja secara komprehensif, dengan tetap mendasarkan pada peraturan daerah yang lain seperti Arah Kebijakan Umum APBD.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah daratan sebesar 27.263,10 Km^2, dan luas perairan ± 4.097 Km^2, yang secara

administratif terbagi menjadi 18 kecamatan dan 227 desa/ kelurahan, secara geografis terletak pada posisi antara 115°26'28" – 117°36'43" Bujur Timur dan 1°28'21" Lintang Utara sampai 1°08'06" Lintang Selatan dengan batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Malinau
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Barat

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari fisiografinya dapat dikelompokkan kedalam 9 satuan fisiografi yaitu daerah wara pasang surut (tidal swamp), daerah dataran alluvial (alluvial plain), daerah jalur kelokan sungai (meander belt), daerah rawa (swamp), daerah lembah alluvial (alluvial valley), daerah teras (terrain), daerah dataran (plain), daerah perbukitan (hill) dan daerah pegunungan (mountain)

Jenis tanah yang terdapat didaerah ini digolongkan kedalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah : *Ultisol, Entisol, Histosol, Incepticol* dan *Mallisol* atau bila menurut lembaga penelitian di Bogor terdiri dari jenis tanah : *Podsolik, Andosol, Renzina dan Alluvial*.

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian

antara 7-25 m dpl terdapat dibeberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam.Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan menjadi 6 kelas wilayah ketinggian.

Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26^0 C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5^0 – 7^0 C.

Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau kearah barat.

2. Gambaran Umum Demografis

   Menurut hasil Suseda 2009 jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 579.596 orang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 304.699 orang (52,57 persen) dan penduduk perempuan sebesar 274.897 orang (47,43 persen). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) sebesar 110,8. Artinya setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.108 laki-laki. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan adanya pertumbuhan alami dan faktor migrasi *netto* yang positif yang berarti migran masuk (*in migration*) ke Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar dibandingkan migran yang keluar (*out migration*).

   Seberapa besar jumlah migran masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saat ini baru bisa diperoleh dari kegiatan Sensus

Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali atau dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan di pertengahan tahun antara dua Sensus Penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat harus diantisipasi dengan baik dan dilakukan secara komprehensif. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan intansi terkait lainnya perlu melakukan upaya penanganan jumlah penduduk secara terpadu dan berkelanjutan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Upaya ini perlu dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan hasil Suseda 2009, jumlah penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin (saat ini berstatus kawin, cerai hidup, dan cerai mati) mencapai sebanyak 151.282 orang (69,46 persen), sebesar 12,07 persen di antara mereka melakukan perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Persentase cerai hidup sebesar 2,21 persen sedangkan cerai mati mencapai sebesar 6,05 persen. Faktor yang menyebabkan perceraian diduga bisa karena akibat kesulitan ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran keluarga maupun faktor lain seperti belum siapnya fisik maupun mental karena perkawinan dilaksanakan saat usia muda. Perkawinan usia muda berakibat pada panjangnya umur reproduksi sehingga peluang memperoleh anak semakin besar. Dampaknya adalah meningkatnya angka kelahiran.

Selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan angka proyeksi, laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun relatif menurun. Pada periode 2004-2005, LPP Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,80 persen menurun menjadi 2,42 persen pada periode berikutnya (tahun 2005-2006).

Pada periode tahun 2006-2007 menjadi hanya sekitar 2,36 persen dan di periode tahun 2007-2008 LPP-nya mengalami penurunan menjadi 2,31 persen. Namun LPP periode 2008-2009 sedikit meningkat dibanding periode sebelumnya menjadi 3,16 persen.

Gambar 1.1.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Di Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Kurun Waktu 2004-2009

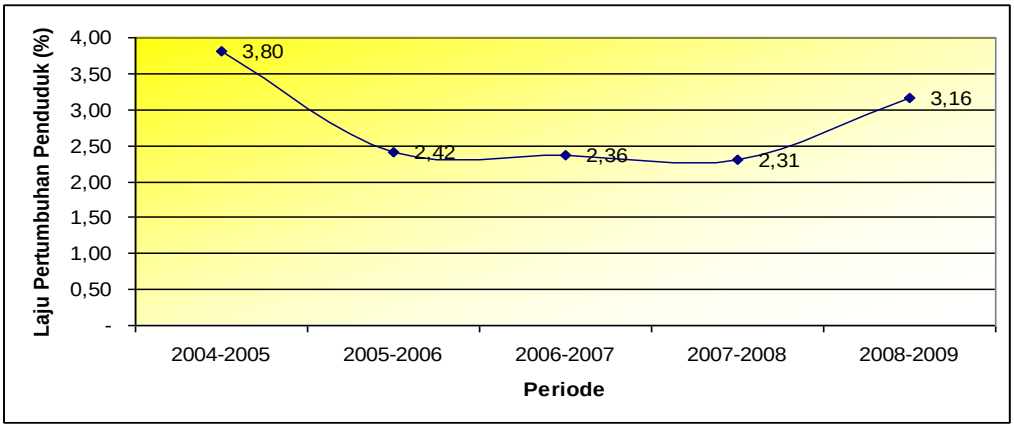

Sumber: BPS, Proyeksi penduduk, dan Suseda 2009

Secara rata-rata (dalam rentang waktu lima tahun) pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (LPP) dari tahun 2004-2009 adalah 2,05 per tahun. Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 523.791 orang dan lima tahun kemudian menjadi 579.596 orang tahun 2009. Trend pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dan perlu terus dipertahankan oleh berbagai pihak utamanya kinerja dinas instansi terkait mengingat ancaman pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang tinggi akan berdampak pada penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta penyediaan lapangan pekerjaan dan ketersediaan pangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi bisa berdampak pada kerawanan sosial.

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun keatas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) tahun 2006 mencapai sebesar 54,97. Pada tahun 2007 angka beban ketergantungan sebesar 54,36 dan turun menjadi 53,55 pada tahun 2009. Artinya bahwa pada tahun 2009, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara menanggung sekitar 54 penduduk usia belum/tidak produktif

Indikator angka ketergantungan merupakan indikator yang kurang sensitif. Faktanya masih ada diantara penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun yang terpaksa sudah harus bekerja dan sebagian penduduk usia 65 tahun ke atas yang masih melakukan aktifitas ekonomi. Naik turunnya angka beban ketergantungan tidak bisa secara langsung diartikan sebagai naik turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif

C. Kondisi Perekonomian

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kelautan serta kehutanan. Dimana potensi ini dimasa mendatang akan menjadi andalan Kabupaten Kutai Kartanegara karena berperan dalam menggantikan peran dari pertambangan yang bersifat *non renewable resources* yang potensinya akan semakin

menipis dan bahkan habis. Adapun keunggulan-keunggulan dari potensi tersebut meliputi;

1. **Pertanian tanaman pangan**

   Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki potensi di bidang pertanian tanaman pangan. Dengan topografi yang bervariasi mulai daerah datar yang didominasi oleh persawahan, berbukit, sampai dengan pegunungan. Kondisi ini memiliki peluang pengembangan berbagai komoditi tanaman pangan dan dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian baru di Luar Jawa dan Sumatera. Letak Kabupaten Kutai Kartanegara secara geografis cukup strategis karena berdampingan dengan Samarinda dan Balikpapan yang menjadi sasaran utama pemasaran hasil produksi. Di samping itu merupakan jalan utama transportasi darat dari daerah bagian Barat dan Timur Kalimantan Timur yang merupakan poros tengah trans Kalimantan Selatan dan Muara Teweh (Kalimantan Tengah).

   Luas lahan potensial untuk lahan pertanian diperkirakan 2.726.310 ha, yang terdiri dari lahan sawah seluas 67.877 ha, lahan kering 2.262.581 ha dan lahan lainnya 395.852 ha. Dari potensi yang ada untuk sementara lahan sawah baru dimanfaatkan 25.659 ha (37.80%), sedangkan untuk lahan kering sekitar 106.306 ha (4,70%) dan lahan lainnya 40.582 ha (10.25%), sehingga masih banyak lahan potensial yang bisa digunakan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas.

Selain itu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Sungai Mahakam yang hampir tidak pernah kering, sehingga cukup potensial sebagai sumber pengairan untuk pengembangan komoditi padi sawah. Potensi yang lain adalah banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan tersedianya alat dan mesin pertanian serta Rice Procesing Unit (RPU) dengan kapasitas 50 ton/jam sehingga dengan beberapa potensi tersebut merupakan modal dasar dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Komoditi utama yang dikembangkan di kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari padi sawah, padi ladang, tanaman hortikultura, Sayur-sayuran dan Palawija yang tersebar di 18 Kecamatan. Dengan produksi padi yang terus meningkat sejak tahun 2005 sebesar 194.992,40 ton menjadi 207.140 ton pada tahun 2009 menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai salah satu daerah kantong pangan untuk Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi beras rata-rata 35 persen pertahun sejak tahun 2005-2009. Sentra pengembangan tanaman padi terdapat di kecamatan Muara Badak, Marang kayu, Samboja, Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara kaman, Kota Bangun dan Kenohan.

Produksi jagung (pipilan kering) pada tahun 2005 mengalami peningkatan dari 1.689 ton menjadi 5.425 ton pada tahun 2009 sedangkan produksi kedelai pada tahun 2005 mencapai 128 ton biji kering dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 484 ton biji kering.

Untuk tanaman jenis holtikultura yang menjadi unggulan pada sektor pertanian adalah durian, lai, nenas, pisang dan rambutan. Sentra pengembangan tanaman buah-buahan terutama durian di kecamatan Tenggarong, Kota bangun, Loa janan dan Samboja, tanaman lai di kecamatan Loa Janan. Tanaman rambutan terdapat dominan di kecamatan Kota Bangun, Ma kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Janan.Sedangkan tanaman nenas terdapat di kecamatan kenohan dan samboja.

2. Perkebunan

Tanaman karet, lada, dan kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan utama di Kabupaten Kutai Kartanegara di samping kakao, kelapa dalam, kopi, tebu, pisang abaca, dan rami. Dalam usaha pengembangan perkebunan, sektor perkebunan ini merupakan salah satu sumber penerimaan devisa yang cukup potensial.

Salah satu indikator tingkat perkembangan dan keberhasilan dalam pengembangan perkebunan dapat dilihat dari Areal dan Produksinya sampai dengan tahun 2009 mencapai 155.571,75 Ha dengan jumlah Produksi mencapai 272.461,95 Ton, dengan jumlah petani sebanyak 38.310 orang yang tersebar di 18 Kecamatan 226 desa/kelurahan. Sedangkan pada tahun 2005 tercatat sebesar 80.462,44 ha dengan jumlah produksi 272.324,43 ton dengan jumlah petani sebanyak 28.427 org.

Untuk jenis komoditi perkebunan rakyat sampai dengan saat ini mencapai luas areal 52.295,05 Ha dengan produksi mencapai 28.176,95 Ton/Tahun yang terdiri dari Kelapa Sawit, Karet,

Kelapa, Lada, Kakao, Kopi, Kapuk, Cengkeh, Panili, Kayu Manis, Kemiri, Pala, Jambu Mete, Pinang, Aren, Jahe, jarak Pagar, dengan jumlah petani sebanyak 38.310 kk.

Perkembangan perkebunan Besar Swasta (PBS) sampai tahun 2009 berjumlah 20 PBS, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan luasan arel tanam 101.160,70 Ha dengan produksi mencapai 244.145 ton.

Perkebunan Besar Negara (PBN) di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari PTP Nusantara XIII dengan Pola PIR khusus I Tanjung Santan Kecamatan Marang Kayu dengan komoditi Karet seluas 301.00 ha dan produksi 296 ton, dan kebun dinas Perkebunan dengan komoditi kelapa sawit seluas 326,00 Ha dengan produksi mencapai 140 ton.

Perkebunan PIR swadaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di kec Kembang Janggut, Kec Marang Kayu dan Kec Samboja dengan komoditi kelapa sawit , hingga tahun 2009 luas arelnya mencapai 1.790 ha dan produksi 5.950 ton.

3. Peternakan

Potensi subsektor peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dikembangkan dan diarahkan pada pemenuhan swasembada kebutuhan konsumsi ternak di Kalimantan Timur. Jenis komoditi ternak yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sapi potong, sapi perah, ternak kambing, ayam ras dan petelur serta kerbau kalang.

Sapi potong merupakan komoditas yang masih diimpor untuk memenuhi konsumsi penduduk. Saat ini lebih dari 30.000 ekor Sapi didatangkan dari Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk memenuhi permintaan daging sapi di Kabupaten Kutai. Sementara jumlah populasi sapi di Kalimantan Timur hanya sekitar 36.000 ekor. Hingga kini temak sapi masih diusahakan secara tradisional oleh penduduk sebagai mata pencaharian sampingan atau dijadikan tabungan.

Total lahan untuk peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 4.53.199 Ha, dengan rincian yang sudah dimanfaatkan seluas 39.582,55 Ha (0,87%) dan belum dimanfaatkan seluas 4.490.616,45 Ha (99,13%). Dari data tersebut terlihat bahwa masih sangat luas lahan peternakan yang belum dimanfaatkan, dimana hanya kurang dari 1% saja lahan yang telah dimanfaatkan untuk usaha peternakan.

Dari beberapa jenis komoditi peternakan yang telah dikembangkan, terlihat bahwa baru usaha peternakan ayam ras petelur yang mampu memanfaatkan lahan untuk komoditi tersebut yaitu sebesar 97,31% dari lahan yang ada. Selain dari komoditi tersebut, pada umumnya baru memanfaatkan lahan kurang dari 10% dari lahan yang tersedia.

Perkembangan ternak selama tahun 2005 hingga tahun 2009 meningkat cukup tinggi.Pada tahun 2005 populasi ternak sapi mencapai 9.853 ekor, kerbau 4.515 ekor, kambing, 25.714 ekor, babi 8.716 ekor, itik 146.607 ekor, ayam kampung 885.171 ekor, ayam petelur 57.776 ekor, dan ayam pedaging 399.766 ekor, sedangkan pada tahun 2009 populasi ternak Sapi

sebanyak 18.444 ekor, Kerbau 2.799 ekor, Kambing 15.323 ekor, Babi 5.116 ekor, ayam buras 464.715 ekor,ayam ras petelur 113.241 ekor dan populasi itik 70.811 ekor.

4. Perikanan dan Kelautan

Potensi pengembangan usaha perikanan dan kelautan baik berupa penangkapan maupun budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar. Hal ini ditunjang dengan keberadaan pantai sepanjang 187,5 km, perairan laut kurang lebih 1.312,5 km persegi dan perairan umum kurang lebih 79.228,15 ha (Danau 19,217 ha, sungai 22.302,15 ha, Rawa 37.661 ha, waduk 48 ha dan embung 175 ha (lahan galian eks batu bara) dan Mina padi (INMINDI).

Dalam pengembangan usaha budidaya telah dikembangkan suatu kawasan sentra produksi yaitu:

1. Kawasan sentra produksi di wilayah hulu meliputi kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kembang Janggut dan Muara Kaman dengan komoditas unggulan patin, jelawat dan betutu.
2. Kawasan sentra produksi di wilayah tengah dengan komoditas unggulan nila dan ikan mas meliputi kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan.
3. Kawasan sentra produksi di wilayah pesisir dengan komoditas unggulan udang windu, bandeng dan kepiting meliputi kecamatan Anggana, Muara jawa, Samboja, Muara Badak, Marang Kayu.

Sedangkan untuk kawasan sentra produksi penangkapan di wilayah pesisir dan wilayah perairan umum, meliputi:

1. Wilayah perairan umum meliputi kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, kenohan, muara kaman dan kembang janggut.
2. Wilayah pesisir meliputi kecamatan anggana, muara jawa, samboja, muara badak, marang kayu dan sanga-sanga.

Produksi perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung meningkat, pada tahun 2005 untuk kegiatan penangkapan produksi ikan sebanyak 41.825,3 ton sedangkan pada tahun 2009 dicapai sebanyak 52.045 ton. Produksi Perikanan budidaya pada tahun 2005 adalah sebesar 24.717,9 ton kemudian meningkat produksinya pada tahun 2009 sebanyak 41.440 ton.

5. Kehutanan

Secara umum areal hutan masih merupakan jenis penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu seluas 2.637.657 Ha (83,31% dari luas wilayah). Perinciaan jenis hutan yang ada meliputi: (1) hutan lindung (239.816 Ha); hutan produksi (1.325.198 Ha); hutan suaka alam (68.884 Ha); hutan penelitian pendidikan (14.099 Ha); dan hutan konversi (989.960 Ha). Pada subsektor kehutanan, luas dan fungsi kawasan hutan berdasarkan penunjukan dari Menteri Kehutanan pada tahun 2006 adalah :

1. Kawasan Budidaya Kehutanan (K-BK) seluas 1.647.622 Ha:
   a) Hutan Lindung / *Protection Are Forest* seluas 231.959 Ha
   b) Hutan Suaka Alam dan Wisata / *Park and Reserve Forest* seluas 11.621 Ha.

c) Taman Nasional / *National Park* seluas 53.286 Ha

d) Hutan Produksi Terbatas / *Limited Production Forest* seluas 61.380 Ha

e) Hutan Produksi Tetap / *Non Convertible Forest* seluas 507.614 Ha

d) Hutan Fungsi Khusus / *Special Function Forest* seluas 781.762 Ha

2. Kawasan Hutan Non Budidaya Kehutanan (KBNK) seluas 1.073.009 Ha.

Komoditas dari subsektor kehutanan yang potensial dan memiliki prospek yang cerah antara lain hutan rakyat, rotan, ulat sutra dan sarang burung. Hutan rakyat mulai banyak dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, dan belum ada usaha intensif dan ekstensif untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan. Hasil hutan berupa kayu diantaranya adalah mahoni, ulin,bengkirai, albasia, pinus, akasia, leusanea dan jenis kayu lainnya,saat ini sebagian besar sudah menipis jumlahnya akibat ilegal loging, kebakaran hutan dan lain-lain. Untuk itu dimasa-masa yang akan datang diperlukan kegiatan penghijauan dan reboisasi untuk mengatasi masalah ini. Rotan merupakan hasil ikutan dari hasil hutan. Rotan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya masih diusahakan secara tradisional sehingga masih perlu untuk diusahakan lebih modern mengingat adanya kenaikan permintaan rotan jadi, setengah jadi dan batangan di pasar internasional yang terus meningkat, sementara itu dilihat dari sisi produktivitas rotan alam dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ulat sutra merupakan bahan baku kain yang berkualitas dan harganya sangat tinggi. Berdasar uji coba yang dilakukan Dinas Kehutanan, ulat sutra

cocok dibudidayakan di Kalimantan Timur, termasuk media penanaman murbay sebagai pakan ulat sutra. Sarang Burung merupakan komoditas andalan yang cukup penting. Selama ini sarang burung diperoleh dari habitat alam.

6. Pariwisata dan Budaya

   Pengembangan potensi nilai-nilai adat dan budaya semakin dirasakan kepentingannya sebagai aset pariwisata yang telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata dan secara makro dapat meningkatkan pendapatan daerah serta devisa bagi negara karena kedatangan wisatawan baik asing maupun lokal.

   Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki potensi keindahan alam serta beraneka kehidupan budaya etnik masyarakatnya yang sangat unik. Panorama alam hutan hujan tropis yang dilintasi oleh sungai Mahakam dan anak-anak sungainya, tata kehidupan masyarakat Dayak yang unik, serta kejayaan Kesultanan Kutai yang merupakan kelanjutan dari kerajaan tertua di Indonesia, kesemuanya dapat disaksikan dan dinikmati di wilayah ini. Disamping wisata alam dan budayanya yang unik, panorama industri besar dan wisata kota di kota-kota utama pada daerah pesisir timur pulau Kalimantan ini pun menjadi daya tarik tersendiri.

   Beberapa objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan pada saat ini yang tersebar di 18 Kecamatan adalah :

   1. Hutan Bukit Suharto (Wisata Alam, Hutan pendidikan)
   2. Bukit Bengkirai, (Wisata Alam , hutan pendidikan)

3. Pantai Tanjung Harapan Samboja (Wisata Alam)
4. Danau Melintang (Wisata Alam)
5. Museum Mulawarman, makam para raja-raja dan kedaton (Wisata budaya, Peninggalan Sejarah)
6. Taman Rekreasi Pulau Kumala.
7. Planetarium
8. Waduk panji sukarame dan museum kayu.
9. Air Terjun Perjiwa, Air Terjun Loa Duri, Air Terjun Bukit Biru, Air Terjun Kedang Ipil.
10. Rumah Adat Lamin dan Budaya Dayak Kenyah merupakan wisata Budaya yang terdapat di Kecamatan Tabang desa Ritan Baru.
11. Peninggalan Sejarah Bekas Kerajaan Hindu yang terdapat di kecamatan Muara Kaman yang merupakan wisata budaya.
12. Asal muasal Kerajaan Kutai Mulawarman yang merupakan peninggalan sejarah yang terletak di desa Kutai Lama Kecamatan Anggana
13. Lamin Adat dan Seni Budaya Dayak Punan yang merupakan wisata sejarah dan purbakala terdapat di Kecamatan Loa kulu.
14. Peninggalan Belanda, Jepang dan Sumur Minyak Tua yaitu Tempat Wisata Historis/bersejarah yang terdapat di Kecamatan Sanga-sanga.
15. Taman Anggrek alam di Pulau Nusa Dua Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara wis
16. Danau Semayang dan danau melintang yang merupakan wisata danau yang terletak di kec Muara Muntai dan kec Kahala.

7. Pertambangan dan Energi

   Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya mineral cukup besar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Produk unggulan sektor Pertambangan adalah migas, batubara, dan bahan galian golongan C. Penambangan dan pengolahan minyak mentah dan gas bumi saat ini dikelola oleh perusahaan swasta di sepanjang pantai timur wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan daerah lepas pantai dengan total produksi sekitar 16.439 juta barrel per tahun.

   Sedangkan gas alam cair (*liquid natural gas*) dikelola oleh PT Badak NGL.Co. di Kecamatan Muara Badak dengan produksi 10.371 juta Mcf. Untuk pertambangan batubara saat ini terdapat tujuh perusahaan yang beroperasi dengan total produksi 21.925 juta ton per tahun. Produk unggulan lain yang masih berupa keunggulan komparatif adalah pasir kuarsa dengan sebaran luas 7.029 Ha, sumber daya 424.265.930 m^3 dan batu gamping dengan sebaran luas 1.627 Ha, sumber daya 138.050.762 m^3. Pada sub sektor energi, Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempunyai komparatif untuk memproduksi energi listrik baik melalui Hidro Elektrik Power maupun Pembangikit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU).

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

   Sebagai salah satu daerah penghasil migas, Kabupaten Kutai Kartanegara masih mampu menciptakan nilai tambah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Peningkatan produksi dan harga barang dan jasa merupakan faktor penyebab utama kenaikan nilai PDRB atas

dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2001 hingga tahun 2009.

Pasca otonomi daerah yaitu tahun 2001 terlihat bahwa total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar 26,361 triliun rupiah. Sejak tahun 2005 nilai PDRB sudah berada diatas 50 trilun rupiah yaitu sebesar 59,181 triliun rupiah. Nilai ini meningkat terus di tahun 2006 menjadi 66,354 triliun rupiah, kemudian tahun 2007 mencapai nilai 72,112 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2008 mencapai angka 99,559 trilun rupiah.

Terakhir pada tahun 2009 nilai tambah yang mampu dihasilkan oleh Kabupaten Kutai kartanegara sebanyak 91,571 triliun rupiah. Kondisi ini memang disebabkan melemahnya produksi migas dibandingkan dengan produksi migas tahun 2008. Apabila kita bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009, yang besaran nilai tambah sub sektor pertambangan migasnya sebesar 68,279 triliun rupiah, maka 97,81 persen berasal dari pertambangan migas Kutai kartanegara yang nilanya mencapai 66,784 triliun rupiah.

Lain halnya bila PDRB diamati atas dasar harga konstan 2000, yang hanya berada di kisaran dibawah 30 triliun rupiah. Lihat saja pada tahun 2001 nilai PDRB dengan migas sebesar 25,262 triliun rupiah dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 28,008 triliun rupiah. Sayangnya pada tahun 2006 nilainya turun menjadi 27.299 triliun rupiah atau terjadi penurunan sebesar – 2,53 persen. Demikian juga pada tahun 2007, masih terjadi penurunan nilai tambah

menjadi 26,203 triliun rupuah atau penurunan sebesar -4,02 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi penurunan produksi migas pada periode tahun 2006 hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa harga migas dunia yang melambung tinggi mampu memacu produksi migas yang berimbas pada peningkatan nilai PDRB menjadi 27,346 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2009 masih mampu menghasilkan nilai PDRB sebesar 28,108 triliun rupiah.

Pekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat lebih riil apabila kita melihat dari sisi PDRB tanpa migas. Pada tahun 2001, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas mencapai angka 6,009 Triliun Rupiah, sementara tahun 2007 sudah mencapai angka 17,542 triliun rupiah. Sejak tahun tahun 2005 capaian nilai PDRB sudah berada diatas 10 triliun rupiah, yaitu tahun 2005 mencapai 11,610 triliun rupiah, tahun 2006 mencapai 14,302 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2008 sudah mampu mencapai nilai 22,045 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2009 menghasilkan nilai sebesar 24.786 triliun rupiah.

Sementara itu PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan bahwa tahun 2009 mencapai nilai 9,112 triliun rupiah atau ada kenaikan sebesar 5,34 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang nilainya sebesar 8,596 triliun rupiah atau ada kenaikan sebesar 5,34 persen. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2001 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2001-2009

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rupiah)		PDRB ADH Konstan 2000 (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2001	26.361.802	6.009.398	25.262.051	5.010.617	7,94	5,26
2002	26.837.948	6.956.958	26.697.543	5.245.098	5,68	4,68
2003	33.548.764	7.882.728	26.754.490	5.602.802	0,21	6,82
2004	42.409.272	8.682.805	27.279.521	5.960.847	1,96	6,39
2005	59.234.845	11.636.105	28.008.486	6.650.958	2,67	11,58
2006	66.354.536	14.302.874	27.299.950	7.437.449	-2,53	11,83
2007	72.112.720	17.542.150	26.203.625	8.148.612	-4,02	9,56
2008	99.559.220	22.045.057	27.346.014	8.596.411	4,36	5,50
2009	91.571.294	24.786.622	28.109.265	9.112.167	2,79	6,00

Untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan yang telah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun 2000 hingga tahun 2009 ini, dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa, walaupun masih bersifat makro.

Karena Kutai Kartanegara sangat bergantung pada sektor migas yang produksinya turun pada 2006 dan 2007 lalu, maka pertumbuhan ekonomi tahun-tahun tersebut juga menurun yaitu masing-masing sebesar -2,53 persen dan -4,02 persen. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian sebesar -4,23 persen pada tahun 2006 dan -6,22 persen pada tahun 2007. Tetapi dengan adanya

peningkatan produksi migas tahun 2008, maka sektor pertambangan dan penggalian bisa mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 3,92 persen. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara hingga mencapai 4,36 persen. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhannya melemah menjadi hanya sekitar 2,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini sangat didukung oleh pertumbuhan dari semua sektor pembentuk PDRB. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor Jasa-jasa yang tumbuh sebesar 26,96 persen, lalu sektor Listrik, Gas dan Air minum yang tumbuh sebesar sebesar 9,74 persen. Kemudian disusul oleh sektor bangunan yang menempati urutan berikutnya yaitu sebesar 6,84 persen. Setelah itu sektor Perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 4,88 persen.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 3,89 persen, kemudian disusul sektor Pengangkutan dan komunikasi yang mampu tumbuh sebesar 3,80 persen. Sektor Industri pengolahan tahun 2009 ini tumbuh sebesar 2,92 persen dan Sektor Pertambangan dan penggalian pertumbuhannya masih masih mampu tumbuh yaitu sebesar 2,34 persen. lalu setelah itu sektor pertanian dalam arti luas yang pertumnuhannya menurun yaitu – 1,05 persen. Penyebab menurunnya pertumbuhan sektor ini adalah dengan menurunnya pertumbuhan sub sektor kehutanan yang besarnya mencapai -7,01 persen, sehingga secara komulatif sektor ini mengalami penurunan pertumbuhannya.

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	{9)
Pertanian	-3,13	7,88	-2,25	4,80	0,45	0,40	0,03	-1,05
Pertambangan & Penggalian	5,67	-1,28	1,36	1,81	-4,23	-6,22	3,92	2,34
Industri Pengolahan	6,13	5,24	5,68	4,41	4,32	5,77	1,67	2,92
Listrik, Gas, & Air Bersih	12,43	8,37	10,47	5,77	9,00	9,02	9,44	9,74
Bangunan	39,93	13,85	21,19	15,36	5,96	6,82	14,97	6,84
Perdagangan, Hotel, & Restoran	10,94	8,72	9,83	6,75	14,50	10,46	8,94	4,88
Pengangkutan & Komunikasi	4,94	5,86	3,63	4,68	7,66	6,37	6,86	3,80
Keuangan, Persewaan & jasa Perush.	3,95	6,25	6,02	-0,07	-1,76	2,59	3,51	3,89
Jasa-jasa	4,29	4,90	3,15	5,97	13,59	12,93	13,20	26,96
Total PDRB	**5,68**	**0,21**	**1,96**	**2,67**	**-2,53**	**-4,02**	**4,36**	**2,79**
Total PDRB (Tanpa Migas)	***4,68***	***6,82***	***6,39***	***11,58***	***11,83***	***9,56***	***5,50***	***6,00***

c. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih di dominasi oleh sektor primer yaitu sektor yang berbasis pada sumber daya alam seperti sektor minyak dan gas bumi dan sektor pertanian. Pada tahun 2009 relatif tidak mengalami pergeseran dibanding tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya yaitu dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanagara yaitu sekitar 85,84 persen. Hal ini berarti lebih dari 80 persen ekonomi Kutai Kartanegara berasal dari kegiatan ekonomi yang basisnya adalah sumber dayam alam. Sehingga mengakibatkan sangat tergantungnya pertumbuhan ekonomi dari sektor migas ini. Sementara sektor lain hanya sisanya yaitu sekitar 14,23 persen saja.

Bila dilihat dari besaran PDRB, maka Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009, bisa dikatakan sebagai daerah yang kaya. Namun perlu diingat bahwa pendapatan ini merupakan pendapatan yang semu dan bukan merupakan pendapatan yang riil yang diterima masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyumbang terbesar adalah sektor migas yang kita semua mengetahuinya bahwa hasil dari migas ini merupakan devisa negara, yang berarti masuk dahulu ke kas negara, baru kemudian dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk sektor lainnya hanya disisakan peluang sebesar 14,23 persen saja. Porsi ini diisi oleh sektor Pertanian dalam arti luas, sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 5,43 persen, kemudian disusul oleh sektor bangunan yang menyumbang sebesar 3,15 persen serta sektor perdagangan menyumbang sebesar 2,56 persen. Sektor Industri Pengolahan masih mampu menempati urutan lima dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 yaitu sebesar 1,24 persen.

Sementara sektor lainnya secara berurutan yaitu Sektor Jasa-Jasa, sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta sektor Listrik, Gas dan Air Bersih hanya mampu menyumbang dibawah 1 persen.

Tabel 1.5. Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2002-2009 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertanian	9,28	8,18	6,39	5,37	5,42	5,75	4,47	5,43
Pertambangan & Penggalian	79,40	81,48	84,03	86,68	86,54	85,65	88,05	85,84
Industri Pengolahan	2,12	1,88	1,71	1,33	1,31	1,36	1,09	1,24
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
Bangunan	3,64	3,42	3,36	2,90	2,83	2,99	2,62	3,15
Perdagangan, Hotel, & Restoran	2,90	2,69	2,44	2,08	2,23	2,50	2,00	2,56
Pengangkutan & Komunikasi	0,62	0,55	0,48	0,39	0,42	0,43	0,34	0,39
Keuangan, Persewaan & jasa Persh	0,73	0,64	0,56	0,43	0,40	0,39	0,31	0,35
Jasa-jasa	1,25	1,11	0,98	0,79	0,82	0,89	0,77	0,99
J U M L A H	100	100	100	100	100	100	100	100

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 tanpa migas berbeda distribusinya dibanding dengan migas. Struktur perekonomian tanpa migas ini telah terjadi pergeseran antara sektor pertanian dengan sektor pertambangan. Pada tahun 2000 hingga tahun 2009, peranan sektor pertanian cenderung berkurang atau menurun sedangkan sektor pertambangan dan penggalian malah sebaliknya yaitu menunjukkan trend yang meningkat.

Namun hal ini bisa dipastikan tidak akan bertahan lama, karena sektor pertambangan dan penggalian adalah merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*unrenewable*). Apabila potensinya sudah habis, maka kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak ada. Hal ini sudah

semestinya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mulai menggali sumber-sumber potensi perekonomian lainnya sebagai pengganti sektor pertambangan dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2000 sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan mampu berperan sebesar 40,56 persen terhadap total PDRB tanpa Migas, namun pada tahun 2009 ini hanya mampu menyumbang sebesar 20,06 persen. Padahal tahun sebelumnya, sektor ini masih bisa berkontribusi sebesar 21,56 persen. Sementara itu pertambangan non migas dan penggalian yang pada tahun 2000 hanya sebesar 16,93 persen namun pada tahun 2008 ini meningkat pesat menjadi 47,69 persen. Sehingga menjadikan sektor ini menjadi sektor yang terbesar kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan pada tahun 2008 lalu, sektor pertambangan non migas dan penggalian berkontribusi sebesar 46,05 persen.

Sektor Bangunan menempati urutan yang sama dengan tahun lalu yaitu urutan ketiga setelah sektor pertambangan dan sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa migas yaitu sebesar 11,62 persen. Kemudian disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran juga cukup besar peranannya dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 9,45persen.

Sektor Industri Pengolahan mampu menyumbang sebesar 4,58 persen pada tahun 2009 dan angka ini melemah sedikit bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 4,94 persen. Sektor jasa-jasa tahun 2009 ini menyumbang sebesar 3,65 persen dalam pembentukan PDRB tanpa migas. Namun sektor lainnya seperti sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor listrik, gas dan air bersih, hanya mampu memberikan kontribusi dibawah 2 persen, yaitu masing-masing sebesar 1,46 persen, 1,31 persen dan 0,18 persen.

Tabel 1.6. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2001-2009 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(2)
Pertanian	35,79	34,81	31,22	27,24	25,15	23,64	21,56	20,06
Pertambangan & Penggalian	20,52	21,16	22,00	32,29	37,54	40,99	46,05	47,69
Industri Pengolahan	8,16	7,99	8,36	6,76	6,08	5,58	4,94	4,58
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,23	0,23	0,24	0,19	0,20	0,19	0,17	0,18
Bangunan	14,04	14,55	16,41	14,76	13,14	12,28	11,82	11,62
Perdagangan, Hotel, & Restoran	11,20	1,14	11,92	10,63	10,34	10,26	9,05	9,45
Pengangkutan & Komunikasi	2,40	2,35	2,34	2,00	1,93	1,78	1,56	1,46
Keuangan, Persewaan & jasa Persh	2,82	2,74	2,74	2,16	1,84	1,60	1,39	1,31
Jasa-jasa	4,84	4,73	4,78	3,81	3,79	3,68	3,46	3,65
J U M L A H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

d. PDRB Perkapitan dan Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkaita merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian, juga sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir, perkembangan nilai PDRB perkapita dan pendapatan perkapita

Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung selalu meningkat baik itu dengan migas maupun tanpa migas.

Seperti sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa pengaruh sektor migas sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian juga halnya dengan PDRB perkapita dan pendapatan perkapita, juga terlihat sangat dominan. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara PDRB perkapita dengan migas dan non migas.

Pada tahun 2001 dimana baru dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, nilai PDRB perkapita dengan migas di Kutai Kartanegara mencapai nilai 57,291 Juta Rupiah, sedangkan PDRB perkapita tanpa migas sebesar 13,060 Juta Rupiah. PDRB perkapita tanpa migas hanya 22,79 persen dari PDRB dengan migas. Hal yang sama juga terjadi dengan pendapatan perkapitanya yaitu pendapatan perkapita dengan migas mencapai 52,905 juta rupiah, sementara tanpa migas hanya 13,293 juta rupiah. Terjadi selisih sebesar 38,430 juta rupiah, atau pendapatan perkapita tanpa migas hanya 25,70 persen dari pendapatan perkapita dengan migas.

Trend PDRB perkapita dan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun selalu meningkat dan mulai tahun 2005 hingga 2008, PDRB dengan Migas sudah berada diatas 100 juta rupiah dan pendapatan perkapita sudah berada diatas 20 juta rupiah. Tahun 2009 telah tercipta PDRB dengan migas sebesar 91,571 triliun rupiah dan apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka didapat PDRB perkapita dengan migas sebesar 171.681.476 rupiah. Demikian juga halnya dengan PDRB tanpa migas yang secara total sebanyak 24,786 triliun rupiah, apabila dibagi dengan jumlah penduduk, maka didapat PDRB perkapita sebesar 46.470.937 rupiah. PDRB perkapita tanpa

migas tahun 2009 hanya 27,07 persen saja dari nilai PDRB perkapita dengan migas.

Tabel 1.7. Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-2009

Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)		Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	57.291.701	13.060.133	52.905.554	11.754.119
2002	56.981.023	14.770.676	51.724.468	13.293.608
2003	69.585.920	16.350.138	64.289.948	14.715.124
2004	87.082.694	17.829.169	81.773.949	16.046.253
2005	120.264.763	23.572.046	114.018.385	21.207.617
2006	131.296.323	28.301.226	124.478.084	25.466.012
2007	136.940.481	33.312.160	128.295.802	30.905.127
2008	188.533.421	41.746.309	177.673.733	38.278.795
2009	171.681.476	46.470.937	158.995.334	41.641.491

Pendapatan perkapita dengan migas di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2001 sebesar 52,905 juta rupiah dan tanpa migas sebesar 11,754 juta rupiah atau perdapatan perkapita dengan migas sebesar 4,50 kali lebih besar dari pendapatan perkapita tanpa migas. Sedangkan pada tahun 2005 pendapatan perkapita dengan migas 5,36 kali lebih besar dari pendapatan perkapita tanpa migas.

Pendapatan perkapita dengan migas di Kutai Kartanegara tahun 2009 sebesar 158,995 juta rupiah sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas sebesar 41,641 juta rupiah. Terlihat adanya selisih yang sangat besar yaitu sekitar 117,353 juta rupiah atau capaian pendapatan perkapita tanpa migas hanya 26,19 persen dari pedapatan perkapita dengan migas atau 3,82 kali lebih besar

pendapatan perkapita dengan migas daripada pendapatan perkapita tanpa migas.

Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi antara pendapatan yang dinikmati oleh pendudk yang bekerja pada sektor minyak dan gas bumi dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor-sektor lainnya.

BAB II.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah ke depan masih mengalami kendala yang tidak kecil. Sistem pemerintahan daerah dipengaruhi bermacam-macam masalah otonomi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan melihat pengalaman pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemerintahan daerah sebelumnya, maka diperlukan antisipasi kedepan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Belajar dari pengalaman keberhasilan (*Success Story*) dan proses pembelajaran (*Lessons Learned*) pada pelaksanaan pembangunan Gerbang Dayaku periode 1999 – 2004 yang lalu, maka setelah melalui proses Pilkada langsung yang pertama di Indonesia tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mencanangkan kembali program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam konsep Gerbang Dayaku yang telah *divitalisasi* dan *diaktualisasi*. Dengan demikian, prosesnya menjadi lebih sistematis sekaligus terkoordinasi.

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010 merupakan Visi dan Misi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dalam Pilkada Langsung.

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa

yang ingin diwujudkan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan suatu Visi yaitu :

"*Menghasilkan **Pemerintahan Kabupaten** yang **baik dan bersih**, berlandaskan azas **keadilan**, **kesetaraan**, **keragaman** dan **demokrasi** menuju terbentuknya **masyarakat yang berkualitas**, **maju**, **mandiri**, **sejahtera***"

visi daerah ini adalah gambaran Kutai Kartanegara di masa depan, namun signifikasi visual pencapaiannya dapat ditelusuri melalui beberapa aspek argumentasi yaitu :

Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih : Tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat

Berlandas asas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi : Pemerintahan yang menjalankan peraturan dan perundangan secara konsisten dan bertanggung jawab, didukung oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui proses penataan, penyuluhan, pembinaan, dan pentaatan (tidak sepihak)

Masyarakat yang berkualitas, maju : Kualitas bermakna mampu menghilangkan sekat-sekat sosial yang ada, mampu membangun komunikasi dalam dan antar masyarakat secara arif, dan mampu menciptakan *social capital*. Maju berarti mampu untuk mengawal seluruh dinamika perubahan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menghasilkan nilai tambah optimal sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Masyarakat yang mandiri dan sejahtera: Masyarakat yang sadar, tahu, dan mampu mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri, serta dapat saling mengisi di dalam memperbaiki tingkat hidup mereka pada tataran pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sejahtera terutama diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh lapisan masyarakat

Guna mewujudkan visi tersebut maka telah ditetapkan 3 (tiga) **Misi** yang harus ditempuh sbb :

1. Pemberdayaan Pemerintahan Daerah (*eksekutif dan legislatif*) dan penegakan supremasi hukum.
2. Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Kondisi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kebanyakan terdiri dari daerah rawa dan pasang surut, ditambah dengan luasan wilayahnya merupakan salah satu kendala tersendiri bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur, terutama sekali infrastruktur jaringan jalan. Akses antar wilayah masih sangat terbatas, terutama sekali pada daerah pedalaman seperti di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan Muara Muntai. Peningkatan pembangunan kewilayahan (teritorial), baik di perkotaan dan terutama sekali wilayah pedalaman serta pedesaan sangat membutuhkan perhatian khusus untuk pengembangan wilayah.

Masalah dan tantangan di atas mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Melalui perwujudan *good governance*, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara (*good governance*) melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif.

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bidang kehidupan lain dalam masyarakat secara simultan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih, berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi; menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, sejahtera. Untuk kesemua itu pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang menjadi landasan untuk pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

Strategi 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas **pelayanan publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui strategi peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, maka kebijakan yang dilaksanakan:

1. Meningkatkan mutu, disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan yg partisipatif, transparan dan akuntable, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    1.1. Peningkatan disiplin dan pengawasan, pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penghargaan sesuai prestasi

    1.2. Peningkatan pelayanan publik (pelayanan prima)

    1.3. Efisiensi dan efektifitas struktur organisasi pemerintahan daerah sesuai Tupoksi

    1.4. Perancangan dan implementasi program pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan untuk mencapai kemandirian daerah

    1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah

2. Konsolidasi lembaga dan aparatur untuk menjamin kelangsungan pemerintahan yang baik di masa depan
    2.1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah
    2.2. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
    2.3. Pembinaan dan Kaderisasi Aparatur Pemerintahan
    2.4. Konsolidasi kelembagaan Pemerintahan
3. Penyempurnaan dan penegakan peraturan dan perundangan secara tegas
    3.1. Penyusunan Peraturan Perundangan dan penegakan hukum
4. Perencanaan dan pelaksanaan Tata Ruang secara konsisten

4.1. Penyelenggaraan Penataan Ruang secara konsisten dan sistematis

4.2. Penyelesaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Detail Tata Ruang Khusus Delta Mahakam

4.3. Menyusun Rencana teknik Kawasan tertentu berdasarkan skala prioritas (kawasan bandara, Kawasan Industri Pendingin, Kawasan Kekambang, Kawasan Wisata Pulau kumala, Pusat-Pusat perbelanjaan)

4.4. Tapal Batas antar wilayah di dalam Kabupaten dan Antar wilayah Kabupaten-Kota

5. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana serta prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

5.1. Peningkatan mutu dan jumlah sarana/prasarana sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi

Strategi 2. Memacu pemerataan dan **pertumbuhan ekonomi**

Dalam upaya mewujudkan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran atas dasar keadilan sosial maka kebijakan yang dilaksanakan :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal

1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi wilayah

1.2. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usaha di pedesaan dan perkotaan

2. Penataan pemerintah yang wirausaha *(entrepreneurial Government)* serta meningkatkan peran pemerintah sebagai katalisator bagi pengusaha kecil, menengah dan besar.

2.1. Mengelola aset dengan seksama agar setiap investasi yang sudah ada dapat memberikan keuntungan yang lebih besar

2.2. Peningkatan kreatifitas dalam menentukan peluang investasi baru yang menentukan keuntungan lebih cepat (*quick yielding ventures*)

2.3. Mengembangkan agro-industri untuk mengolah lebih lanjut hasil produksi/panen/petik masyarakat

2.4. Peningkatan peran aktif pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pembangunan

3. Meningkatkan investasi bagi penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi

3.1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha

3.2. Peningkatan dan Pemerataan Investasi

3.3. Pengembangan Bisnis Daerah

3.4. Peningkatan dan Efektivitas dan efisiensi regulasi investasi

4. Meningkatkan kemampuan daya saing pelaku ekonomi lokal dalam memanfaatkan dan menghadapi peluang dan tantangan globalisasi

4.1. Peningkatan daya saing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif

5. Mendorong usaha yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tak terbarui *(unrenewable resources)* kepada sumber daya alam yang terbarui *(renewable resources)*

5.1. Mengarahkan investasi pada usaha-usaha non ekstraktif, penciptaan lapangan usaha baru yang melibatkan rakyat kecil

5.2. Meningkatkan produksi dan ekspor komoditi non ekstraktif

5.3. Memelihara komitmen untuk konsisten dalam pemanfaatan sumberdaya yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development)*

Strategi 3. Meningkatkan **pembangunan teritorial**

Strategi ini mengarahkan pembangunan yang berorientasi pada wilayah teritorial; perdesaan dan perkotaan. Dengan strategi ini diharapkan mampu mengembangkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan sehingga memberikan efek percepatan dan pemerataan pembangunan yang berfungsi sebagai pemicu untuk mempercepat gerak roda pembangunan dan pemerataan hasi-hasilnya. Untuk strategi meningkatkan pembangunan teritorial melalui kebijakan:

I. Kebijakan Pembangunan Pedesaan
   1. Meningkatkan keberpihakan pada Rakyat Kecil melalui pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah pedesaan
      1.1. Membuka lapangan kerja dan peluang usaha bidang agribisnis
      1.2. Membuka lapangan kerja dan peluang usaha dibidang agroindustri
      1.3. Menyediakan sumber energi yang terjangkau masyarakat
      1.4. Integrasi Program pengembangan/pemberdayaan masyarakat oleh pihak swasta *(corporate Community Develompentl corporate social responsibility)* dilaksanakan melalui sistem yang telah ada sehingga tercapai tujuan pemberdayaannya secara riil tanpa pemanjaan terhadap masyarakat
   2. Melanjutkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
      2.1. Meningkatkan kualitas belajar mengajar
      2.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan di perdesaan
      2.3. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan
   3. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kondisi dan kebutuhan desa

3.1. Memelihara dan meningkatkan jalan dan jembatan yang sudah ada

3.2. Membangun jalan baru untuk membuka isolasi dan membuka akses jalan yang menghubungkan sentra-sentra ke pusat desa, kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten

3.3. Meningkatkan pembangunan bidang pengairan untuk menunjang mekanisasi pertanian

3.4. Pemenuhan keperluan listrik, air bersih, telekomunikasi di perdesaan secara bertahap

3.5. Melanjutkan pembangunan sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perkantoran berdasarkan skala prioritas

4. Melestarikan dan mengaktualisasi nilai-nilai luruh warisan budaya lokal

4.1. Memelihara dan mengemas nilai-nilai luhur warisan budaya lokal untuk meningkatkan kualitas obyek wisata daerah

5. Memberdayakan seluruh komponen desa dalam memperbaiki dan melestarikan Lingkungan Hidup

5.1. Mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

5.2. Meningkatkan pengawasan lingkungan hidup oleh masyarakat

II. Kebijakan Pembangunan Perkotaan

1. Meningkatkan infrastruktur kota sebagai sarana pelayanan publik

1.1. Memelihara infrastruktur yang sudah ada dan membangun infrastruktur baru sesuai keperluan

2. Menjadikan kota sebagai pusat perkembangan usaha jasa, perdagangan dan industri

2.1. Membangun sentra-sentra industri jasa dan perdagangan

3. Melanjutkan upaya menjadikan kota sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya
   3.1. Mengembangkan pusat-pusat pendidikan
   3.2. Pengembangan Kepariwisataan daerah
   3.3. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
   4.1. Penguatan sistem pendidikan agama, moral, sikap, etika dan pengetahuan umum
   4.2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat
   4.3. Pemberdayaan wanita dan anti diskriminasi gender
   4.4. Pengembangan Pemuda dan Olah Raga
5. Memberdayakan seluruh komponen kota dalam memperbaiki dan melestarikan Lingkungan Hidup
   5.1. Menata Pembangunan Kota yang berwawasan lingkungan

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah sesungguhnya merupakan cerminan atas performa penyelenggaraan pemerintahan, begitu sebaliknya. Oleh karena itu kedepan kita perlu melakukan langkah-langkah konsolidasi terhadap cara berfikir seperti ini dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tujuannya adalah agar kita tidak salah kaprah dalam mewujudkan visi pembangunan dalam kerangka otonomi daerah.

Konsepsi Gerbang Dayaku yang telah divitalisasi dan diaktualisasi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2005-2010 menggambarkan bahwa kejayaan Kutai Kartanegara ke depan dapat tercapai melalui transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dpat diperbaharui (*non reneable resources*) kepada sumber daya yang dapat diperbaharui, dikembangkan, ditingkatkan (*reneable resources*)

Seiring dengan konsepsi Gerbang Dayaku, sebagai paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative adventage*) dan keunggulan kompetitip (*competitive adventage*), dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerag, arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan memprioritaskan tiga bidang pengembangan, yaitu:

1. **Peningkatan Sumber Daya Manusia**
2. **Pengembangan Agrikultur dalam arti luas**
3. **Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata**

Mendaras pada konsepsi Gerbang Dayaku yang telah divitalisasi dan diaktualisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2006 juga memprioritaskan pembangunan pada tiga bidang pengembangan diatas, yaitu Pengingkatan Sumber Daya Manusia; Pengembangan Agrikultur dalam arti luas serta Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pendekatan pembangunan yang lebih menyandarkan peranan SDA tidak tepat lagi, karena ketersediaannya semakin terbatas dan menipis, terutama SDA yang tidak bisa diperbaharui. Maka, pembangunan harus lebih mengandalakan Kekuatan SDM. *Thesis* bahwa SDM memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat *aksiomatik*. Berbagai kajian akademis dan emperis telah membuktikan keabsahan itu.

Upaya Kutai Kartanegara di dalam meningkatkan SDM didorong kesadaran, bahwa pembangunan yang bertumpu pada SDA yang tidak bisa diperbaharui yang bertumpu pada SDA yang tidak bisa diperbaharui, pada suatu saat akan menemui permasalahan. Sebaliknya dengan mengembang SDM seperti dilakukan negara maju, masa depan Kutai Kartanegara akan bersinar.

Dalam konteks ini, arah peningkatan SDM Kutai Kartanegara akan terus dikembangkan berbagai potensi pendidikan, antara lain penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun dan penerapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA), termasuk pembebasan biaya pendidikan mulai SD sampai SLTA (Negeri dan Swasta), insentif dan fasilitas guru, rehabilitas sarana fisik gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan juga mendirikan Politeknik Migas dan Pertanian dan banyak lagi. Dalam hal ini, Pemkab Kutai Kartanegara mengalokasi anggaran pendidikan pendidikan antara 20 – 25 persen dari total APBD.

Semua itu bertujuan agar sumberdaya manusia makin berkualitas, dan Kutai Kartanegara akan mampu mengelola sekaligus mempertahankan sumberdaya alam migas, mineral pertambangan dengan baik. Sejalan dengan itu, sumber daya yang bisa diperbaharui seperti agrikultur dan pariwisata juga bisa berkembang pesat karena dikelola oleh sumberdaya manusia yang cerdas. Harapannya adalah agar terjadi pergeseran ketergantungan pembangunan dari sumberdaya alam yang tak terbaharui menjadi ke yang bisa diperbaharui".

2. Pengembangan Agrikultur dalam Arti Luas

Pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari pembangunan sektor agrikultur yang merupakan salah satu pilar penggerak roda perekonomian masyarakat. Apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki cakup luas dan potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.

Usaha pengembangan lahan potensial tersebut telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, baik melalui program intensifikasi, ektensifikasi dan diversifikasi pangan maupun penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di wilayahnya.

Salah satu upaya yang cukup penting dilakukan adalah bagaimana hasil-hasil pertanian itu dapat bernilai agribisinis sehingga hasil-hasil produksi pertanian dapat lebih meningkatkan kesejateraan dan taraf hidup petani. Dengan melihat agribisinis sebagai sistem,

maka agribisnis mencakup agroindustri, yakni industri yang mengolah produksi hasil-hasil pertanian, yang meliputi sub sektor perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura kehutanan. Dengan demikian, agribisnis meliputi sektor pertanian dan industri.

Dalam konteks ini, arah pembangunan agrikultur dalam arti luas, ditujukan untuk meningkatkan potensi yang ada seperti pembangunan agribisnis, dan agroindustri termasuk pembentukan perkebunan rakyat di seluruh Kutai Kartanegara untuk industri kelapa sawit.

Adapun tujuan dari pengembangan agrikultur dalam arti luas adalah untuk mewujudkan kondisi pembangunan pertanian yang tangguh, maju efisien serta mandiri menuju terciptanya usaha tani yang berorientasi pada agribisnis dan agroindustri. Dengan sasaran membuka kesempatan bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

Langkah strategis dalam arah pengembangan agrikultur dalam arti luas adalah dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian dan diserasikan dengan kondisi global yang terus menerus berkembang secara dinamis merupakan suatu langkah yang telah dikaji secara cermat. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian, yakni antisipasi dengan cara mencari alternatif komoditi unggulan pengganti dari sektor sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dengan minipisnya deposit tambang dan bahan galian.

3. Pengembangan Industri Pariwisata

Bagi Kutai Kartanegara gelombang pariwisata adalah gelombang emas yang secara berkesinambungan akan terus dimanfaatkan sekuat tenaga. Segenap sumber daya sosial, budaya dan alam yang bernilai kepariwisataan akan dikembang secara serius. Oleh karena itu, berbagai langkah yang dapat meningkatkan daya saing industri pariwisata di Kutai Kartanegara akan terus digagas dan diupayakan perwujudan dalam berbagai bentuk.

Harus diakui secara jujur bahwa industri pariwisata di Kutai Kartanegara belum sanggup menjadi pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, industri pariwisata di Kutai Kartanegara belum menjadi sektor unggulan. Namun, melihat potensi wisata yang dimiliki, Kutai Kartanegara menyimpan potensi besar bagi pengembangan industri pariwisata. Bagi Kutai Kartanegara prosepek pariwisata adalah masa depan yang cukup menjajikan, lantaran Kutai Kartanegara memiliki obyek-obyek wisata berupa wisata alam; laut, danau maupun sungai dan sektor lainnya seperti kehutanan yang jika dikelola dengan baik akan berkembang menjadi industri pariwisata.

Karena pariwisata sifatnya multisektoral dan memiliki dampak *multiplier effects* yang luas, maka arah pengembangan pariwisata sebagai sebuah industri adalah :

1. Pencipataan iklim bersaing yang sehat, yang mengarah pada penguatan industri dan citra kepariwisataan secara keseluruhan. Langkah ini dapat diwiujudkan dengan mencitrakan daerah yang kondusif bagi kunjungan wisatawan dalam arti luas.

2. Menggalakan berbagai upaya untuk menarik masuknya investor (baik dalam maupun luar negeri) untuk masuk dalam usaha-usaha kepariwisataan di Kutai Kartanegara.
3. Pengembangan obyek dengan tema-tema khusus, selain untuk menciptakan alternatif pilihan baru bagi wisatawan, juga diharapkan mampu mendorong peluang-peluang usaha dan investasi baru bagi masyarakat.
4. Penciptaan jaringan informasi yang menghubungkan seluruh pelaku pariwisata dan wisatawan serta calon wisatawan secara elektronik, disamping faktor marketing.

Adapun yang menjadi tujuan dari arah pengembangan industri pariwisata di Kutai Karatenagara adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan industri pariwisata yang bertumpu pada ekonomi kerakayatan dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan lingkungan alam.

Sedangkan sasarannya adalah peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesempatan kerja dan usaha serta pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pelestarian nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dalam kerangka "*nation* dan *charater building*".

Dari kesadaran yang matang ini akan tumbuh kemampuan untuk menciptakan kesempatan dan kebijakan yang harus dilakukan agar industri pariwisata yang merupakan prioritas pembangunan di Kutai Kartanegara terwujud sukses. Dan potensi kepariwisataan yang memungkinkan harus terus digali dari bumi Kutai Kartanegara sehingga mampu bersaing secara nasional, intraregional dan internasional.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah **pengelolaan keuangan daerah**. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan ditujukan agar pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah mampu mendukung tujuan dan sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun dan ditetapkan setiap tahun merupakan bentuk perencanaan keuangan jangka pendek yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Penyusunan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Secara umum gambaran mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun yaitu Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan melalui sumber pendanaan yang dituangkan dalam Penerimaan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 – TA. 2009 Pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi pendapatan dari Dana Perimbangan Pusat – Daerah melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menggali sumber pendanaan daerah lainnya dari pihak ketiga;
3. Menetapkan prakiraan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU serta DAK melalui perhitungan yang cermat dan ditindak lanjuti dengan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat;
4. Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola. Tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya;
5. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai;
6. Melaksanakan review terhadap sistem dan mekanisme opersional pemungutan yang dapat menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.

A.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pengelolaan Pendapatan Daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 pencapaian target rata-rata adalah sebesar 99,05%. Pada TA. 2005, TA. 2006 dan TA. 2008 realisasi Pendapatan Daerah melebihi target yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran yaitu sebesar 107,74% (2005), 111,71% (2006) dan 106,01% (2008). Sedangkan pada TA. 2007 dan TA. 2009 terjadi *under estimated* pada realisasi Pendapatan Daerah yaitu sebesar 83,65% (2007) dan 86,53% (2009).

Pada Tahun Anggaran 2005 realisasi Pendapatan Daerah yang melebihi target diperoleh dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang mencapai realisasi sebesar 243,61%. Semua komponen yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dengan sumbangan terbesar dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 403,88%.

Tabel. 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005.

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
1.	**PENDAPATAN**	**2.950.402.957.674,85**	**3.178.827.064.753,89**	**107,74**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**23.708.040.578,70**	**57.755.765.028,89**	**243,61**
1.1.1.	Pajak Daerah	5.262.598.116,60	6.660.129.767,57	126,56
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.654.978.750,00	8.656.595.036,78	185,96
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.720.000.000,00	13.882.879.168,40	206,59
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.070.463.712,10	28.556.161.056,14	403,88
1.2.	**BAGIAN DANA PERIMBANGAN**	**2.902.523.233.139,92**	**3.097.325.830.625,00**	**106,71**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.572.759.233.139,92	2.744.779.677.825,00	106,69
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	297.814.000.000,00	297.814.000.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	-	11.299.840.000,00	-
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	31.950.000.000,00	43.432.312.800,00	135,94
1.3.	**LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**	**24.171.683.956,23**	**23.745.469.100,00**	**98,24**
1.3.1.	Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang dari Pemerintah	16.060.000.000,00	16.060.000.000,00	100,00
1.3.2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	3.891.356.695,00	-	-
1.3.3.	Dana Darurat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
1.3.4.	Penerimaan Lain-lain	1.220.327.261,23	4.685.469.100,00	383,95

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2005, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun untuk realisasi Dana Perimbangan juga terjadi pencapaian realisasi yang melebihi target yaitu sebesar 106,71%. Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak menyumbang nilai realisasi sebesar Rp. 172.020.444.685,08 atau sebesar 106,69%. Sedangkan Bagi Hasi Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi memberikan kontribusi realisasi yang paling besar pada komponen Dana Perimbangan yaitu sebesar 135,94%. (Tabel 3.1.)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2006 juga memberikan kontribusi paling besar terhadap realisasi Pendapatan Daerah yaitu sebesar 193,92%. Kecuali Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tidak mencapai 100%, komponen lainnnya pada Pendapatan Asli Daerah melebihi target yang telah ditetapkan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2006 yaitu komponen Pajak Daerah sebesar 208,58%, Retribusi Daerah sebesar 154,81% dan Lain-lain Pendaptan Daerah yang Sah sebesar 213,35%.

Adapun untuk Bagian Dana Perimbangan mencapai realisasi sebesar 110,63% di mana komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mencapai surplus pendapatan sebesar Rp. 373.636.001.133,55 atau sebesar 11,36% dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi terbesar pada Bagian Dana Perimbangan adalah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) di mana dari rencana sebesar Rp. 12.700.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.754.462.000,- atau 383,89%. Sedangkan komponen Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah tidak melampaui target dengan hanya terealisasi sebesar 6,48% meskipun secara keseluruhan Pendapatan Daerah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 111,71%.(Tabel 3.2.)

Tabel. 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006.

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
1.	**PENDAPATAN**	**3.788.082.682.153,05**	**4.231.670.392.162,35**	**111,71**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**58.883.328.968,60**	**114.184.733.947,35**	**193,92**
1.1.1.	Pajak Daerah	3.768.100.000,00	7.859.321.175,60	208,58
1.1.2.	Retribusi Daerah	8.461.150.000,00	13.098.331.429,48	154,81
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.550.000.000,00	5.529.638.944,44	99,63
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.104.078.968,60	87.697.442.397,83	213,35
1.2.	**BAGIAN DANA PERIMBANGAN**	**3.721.503.137.548,45**	**4.116.987.080.115,00**	**110,63**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.289.339.137.548,45	3.662.975.138.682,00	111,36
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	297.814.000.000,00	322.631.833.333,00	108,33
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	12.700.000.000,00	48.754.462.000,00	383,89
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	121.650.000.000,00	82.625.646.100,00	67,92
1.3.	**LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**	**7.696.215.636,00**	**498.578.100,00**	**6,48**
1.3.1.	Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimban dari Pemerintah	4.393.784.000,00	498.578.100,00	11,35
1.3.3.	Dana Darurat	3.000.000.000,00	-	-
1.3.4.	Penerimaan Lain-lain	302.431.636,00	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007.

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
1.	**PENDAPATAN**	**3.825.497.479.775,80**	**3.200.049.176.642,01**	**83,65**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**60.807.075.000,00**	**157.418.420.484,01**	**258,88**
1.1.1.	Pajak Daerah	6.327.500.000,00	2.919.854.996,70	46,15
1.1.2.	Retribusi Daerah	7.555.575.000,00	8.980.151.945,27	118,85
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.570.000.000,00	10.118.347.644,50	181,66
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.354.000.000,00	135.400.065.897,54	327,42
1.2.	**BAGIAN DANA PERIMBANGAN**	**3.609.638.974.775,80**	**2.805.707.134.158,00**	**77,73**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.266.296.512.775,80	2.529.620.367.491,00	77,45
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	297.814.000.000,00	272.996.166.667,00	91,67
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	45.528.462.000,00	3.090.600.000,00	6,79
1.3.	**LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**	**155.051.430.000,00**	**236.923.622.000,00**	**152,80**
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	41.396.430.000,00	60.198.622.000,00	145,42
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	300.000.000,00	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	113.355.000.000,00	176.725.000.000,00	155,90

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2007, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk TA. 2007 terjadi *under estimated* terhadap target yang telah ditetapkan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2007 yaitu hanya sebesar 83,65%. Meskipun komponen Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi yang melebihi pencapaian target, tetapi komponen Bagian Dana Perimbangan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi hanya sebesar 77,73% disebabkan komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang merupakan komponen terbesar pada struktur Pendapatan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mencapai realisasi sebesar 77,45% atau dari target anggaran sebesar Rp. 3.266.296.512.775,80 hanya mencapai Rp. 2.529.620.367.491,00 atau terjadi defisit sebesar Rp. 736.676.145.284,80.

Berbeda halnya dengan realisasi TA. 2008, Pendapatan Daerah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106,01%. Persentase tertinggi dalam pencapaian target adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. (Tabel 3.4.)

Tabel. 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
1.	**PENDAPATAN**	**3.968.214.296.530,00**	**4.206.847.702.770,32**	**106,01**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**141.168.083.801,00**	**175.248.208.980,32**	**124,14**
1.1.1.	Pajak Daerah	11.870.000.000,00	16.470.759.054,86	138,76
1.1.2.	Retribusi Daerah	15.564.737.500,00	23.219.466.045,01	149,18
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.020.000.000,00	10.586.367.859,00	66,08
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.713.346.301,00	124.971.616.021,45	127,90
1.2.	**BAGIAN DANA PERIMBANGAN**	**3.606.149.782.729,00**	**3.756.458.602.790,00**	**104,17**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.520.413.959.801,00	3.663.369.536.176,00	104,06
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	74.453.500.000,00	87.403.441.300,00	117,39
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	11.282.322.928,00	5.685.625.314,00	50,39
1.3.	**LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**	**220.896.430.000,00**	**275.140.891.000,00**	**124,56**
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.496.430.000,00	95.740.891.000,00	230,72
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	179.400.000.000,00	179.400.000.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.5. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
1.	**PENDAPATAN**	**3.747.536.224.465,03**	**3.242.718.252.697,78**	**86,53**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**168.109.223.595,03**	**196.567.389.225,78**	**116,93**
1.1.1.	Pajak Daerah	7.077.500.000,00	13.589.546.867,25	192,01
1.1.2.	Retribusi Daerah	39.255.575.000,00	25.360.868.099,17	64,60
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.484.210.057,67	11.464.210057,67	99,83
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.291.938.537,36	146.152.764.201,89	132,51
1.2.	**BAGIAN DANA PERIMBANGAN**	**3.348.708.038.178,00**	**2.768.412.790.730,00**	**82,67**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.310.333.038.178,00	2.730.037.790.730,00	82,47
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	38.375.000.000,00	38.375.000.000,00	100,00
1.3.	**LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**	**230.718.962.692,00**	**277.738.072.742,00**	**120,38**
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.650.000.000,00	107.048.199.990,00	145,3
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	709.880.692,00	14.330.590.752,00	2.018,73
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156.359.082.000,00	156.359.082.000,00	100,00

Sumber : Laporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2009.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah TA. 2009 menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan (Tabel 3.5.), disebabkan komponen Dana Perimbangan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah realisasi mencapai Rp. 196.567.389.225,78 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 116,93%.

Dana Perimbangan mencakup pos Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum mencapai target yang ditetapkan dari nilai Rp. 3.348.708.038.178,00 atau hanya mencapai Rp. 2.768.412.790.730,00 (82,67%). Sementara untuk pos penerimaan dari sumber pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dari target Rp. 230.718.962.692,00 realisasi telah melampaui target sebesar Rp. 277.738.072.742,00 atau 120,38%. Dengan demikian target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.747.536.224.465,03 hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 3.242.718.252.697,78 atau mencapai 86,53%. (Tabel 3.5.)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan data realisasi Pendapatan Daerah TA. 2005 – 2009 maka secara kumulatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.6. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 – TA. 2009.

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Defisit / Surplus (Rp.)	%
1	2	3	4		6
1.	2005	2.950.402.957.674,85	3.178.827.064.753,89	228.424.107.079,04	107,74
2.	2006	3.788.082.682.153,05	4.231.670.392.162,35	443.587.710.009,30	111,71
3.	2007	3.825.497.479.775,80	3.185.826.565.620,00	(639.670.914.155,80)	83,28
4.	2008	3.968.214.296.530,00	4.206.129.179.212,77	237.914.882.682,77	106,00
5.	2009	3.747.536.224.465,03	3.242.718.252.697,78	(504.817.971.767,25)	86,53
Jumlah		18.279.733.640.598,70	18.045.171.454.446,80	(234.562.186.151,94)	98,72

Dari tabel 3.6. tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan Pendapatan Daerah secara kumulatif selama TA. 2005 – TA. 2009 melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara ditargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 18.279.733.640.598,70 dengan

realisasi sebesar Rp. 18.045.171.454.446,80 atau 98,72%; yang berarti terdapat defisit dalam pencapaian target atau *under estimated* hanya sebesar Rp. 234.562.186.151,94 atau sebesar 1,28%.

A.2. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Rendahnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (walaupun melebihi target) pada tahun 2008 disebabkan oleh perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah yang belum berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola, semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
2. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah masih bertumpu pada intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, belum mengarah pada penumbuhan investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang pada akhirnya akan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
3. Selama ini kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih tergantung dana dari pusat berupa dana perimbangan, karena pendapatan asli daerah hanya mampu memberi kontribusi dalam pembiayaan rata-rata sebesar 1,70 persen per tahun
4. Belum diterapkan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah

5. Perusahan daerah dan aset daerah yang belum dikelola secara profesional, yang secara langsung berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.

Lebih lanjut, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, maka pada kesempatan ini dicoba untuk menyampaikan beberapa langkah kebijaksanaan secara umum sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya pada perangkat daerah yang membidangi atau mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Diharapkan dalam menyusun rencana dan menentukan target Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.
2. Pemungutan Retribusi Daerah yang potensial perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta secara selektif dan melalui pengkajian mendalam.
3. Perlu dilakukannya analisis dan pengkajian terhadap penumbuhan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai sentra ekonomi yang dapat memberikan konstribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Diperlukannya pengelolaan yang profesional pada perusahaan milik daerah sehingga diharapkan bisa mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya, yang pada akhirnya akan memberikan konstribusi pada Pendapatan Asli Daerah.
5. Perlu dilakukannya peningkatan dan pengembangan fasilitas serta pengelolaan yang lebih baik terhadap aset daerah yang menjadi tujuan wisatawan, dengan demikian diharapkan

optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dicapai lebih baik lagi.

6. Perlu dikembangkan sistem "*self-assesment*" bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
7. Perlu diterapkan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2006 ini memuat petunjuk dan ketentuan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin anggaran pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menjabarkan Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sasaran kinerja makro pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 – 2010, yang secara rinci dioperasionalkan melalui belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2010. Terdapat tiga strategi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik
2. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan pembangunan teritorial

Adapun arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memprioritaskan tiga bidang pengembangan, yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)
2. Pengembangan Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*)
3. Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata (*Tourism*).

Dalam mencapai arah pembangunan tersebut di atas, maka dilaksankakan beberapa Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Penerapan Kepemerintahan yang baik dan bersih
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Pengembangan perencanaan daerah
4. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5. Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM termasuk SDMnya
6. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
7. Pemberdayaan Usaha Kecil
8. Penataan Ruang Wilayah
9. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
11. Perencanaan Peraturan Daerah
12. Penyusunan perangkat perangkat peraturan publik
13. Peningkatan mutu dan prasarana pelayanan publik
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung
15. Pengembangan Industri kecil dan menengah
16. Peningkatan dan Pemetaan Investasi
17. Pengembangan Bisnis Daerah
18. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur, Telekomunikasi dan Suplai Energi
19. Pemberdayaan *stakeholder* dalam pengembangan investasi
20. Peningkatan Efektifitas dan efisiensi regulasi investasi
21. Peningkatan daya kompetitif dan memanfaatkan Keunggulan Komparatif
22. Pembinaan Perencanaan di tingkat Kecamatan dan Desa
23. Peningkatan mutu dan prasarana pelayanan publik
24. Penyediaan sarana/prasarana keagamaan
25. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur olah raga
26. Pengembangan Prasarana Pariwisata
27. Pembangunan prasarana Pemukiman
28. Pembangunan prasarana perhubungan
29. Pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa
30. Pengembangan Pusat-pusat Pendidikan
31. Peningkatan kualitas pendidikan
32. Pemberdayaan wanita
33. Pengembangan usaha agrobisnis dan agroindustri
34. Peningkatan pelayanan kesehatan
35. Pemeliharaan jalan dan jembatan
36. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi

Pelaksanaan Program-program tersebut di atas diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 – TA. 2009.

Dalam pelaksanaannya APBD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada sistem penganggaran sebagai berikut :

1. Pada TA. 2005 – TA. 2006 mengacu pada KEPMENDAGRI Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja daerah, dengan melaksanakan Anggaran pengeluaran yang diklasifikasikan menurut Belanja Operasi, Modal dan belanja Tak Terduga.
2. Pada TA. 2007 – 2009 mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 berikut revisinya pada PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

B.1. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Secara umum kebijakan anggaran untuk belanja daerah sebagai berikut :

1. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat luas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran kegiatan dengan menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas.
3. Anggaran disusun dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.
4. Menerapkan disiplin anggaran yang didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama program-program yang ditujukan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pembangunan territorial di perdesaan dan perkotaan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi kegiatan secara terbuka baik teknis maupun ekonomi kepada pihak legislatif dan masyarakat.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari *urusan wajib* dan *urusan pilihan* yang dibagi atas belanja SKPD.

Perkembangan alokasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 114,92% setiap tahunnya. Meskipun alokasi belanja daerah mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya, akan tetapi realisasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 tidak terealisasi sampai dengan 100% setiap tahunnya.

Belanja untuk membiayai Pegawai atau melalui Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Tidak Langsung mempunyai alokasi rata-rata sebesar 22,54% jika dibandingkan dengan jumlah belanja daerah secara keseluruhan, sisanya 72,46% dialokasikan untuk belanja pembangunan yang dialokasikan pada Belanja Pelayanan Publik atau Belanja Langsung. Adapun rata-rata realisasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 adalah sebesar 75,43%, dengan realisasi belanja daerah terendah terdapat pada TA. 2007 yaitu hanya sebesar 67,96% dan tertinggi pada TA. 2005 yaitu sebesar 89,75%.

Tabel. 3.7. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
2.	**BELANJA**	**2.998.441.511.229,00**	**2.691.188.526.602,56**	**89,75**
2.1.	**BELANJA APARATUR DAERAH**	**773.802.111.775,25**	**657.853.950.712,76**	**85,02**
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	678.691.853.337,25	602.756.297.724,76	88,81
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	35.265.686.761,00	22.026.246.000,00	62,46
2.1.3.	Belanja Modal	59.844.571.677,00	33.071.406.988,00	55,26
2.2.	**BELANJA PELAYANAN PUBLIK**	**2.224.639.399.453,75**	**2.033.334.575.889,80**	**91,40**
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	318.645.440.320,00	297.566.771.878,00	93,38
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	350.274.724.809,50	274.115.567.556,13	78,26
2.2.3.	Belanja Modal	1.173.676.489.413,25	1.105.360.009.811,67	94,18
2.3.	**BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN**	**372.042.744.911,00**	**351.092.477.696,00**	**94,37**
2.3.2.	Belanja Bantuan kepada Pemerintah Bawahan	35.684.060.750,00	35.684.060.750,00	100,00
2.3.4.	Belanja Bantuan Kepada Instansi Vertikal dan Bidang Pendidikan lainnya	57.745.739.000,00	38.177.706.500,00	66,11
2.3.5.	Belanja Bantuan Kegiatan Kepariwisataan Daerah	5.700.000.000,00	5.699.978.259,00	100,00
2.3.6.	Belanja Bantuan untuk Organisasi Sosial	192.541.103.161,00	191.162.492.187,00	99,28
2.3.7.	Bantuan untuk Organisasi Profesi dan Lembaga Ibadah	80.371.842.000,00	80.368.240.000,00	100,00
2.4.	**BELANJA TIDAK TERSANGKA**	**10.000.000.000,00**	**5.199.748.948,00**	**52,00**
2.4.1.	Belanja Tidak Tersangka	10.000.000.000,00	5.199.748.948,00	52,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2005, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel. 3.8. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
2.	**BELANJA**	**4.252.589.261.985,00**	**3.584.915.417.703,10**	**84,30**
2.1.	**BELANJA APARATUR DAERAH**	**1.071.572.845.715,61**	**866.760.915.216,95**	**80,89**
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	875.995.163.375,50	732.636.731.207,95	83,63
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	130.268.851.957,91	91.346.955.371,00	70,12
2.1.3.	Belanja Modal	65.308.830.382,20	42.777.228.638,00	65,50
2.2.	**BELANJA PELAYANAN PUBLIK**	**3.181.016.416.269,39**	**2.718.154.502.486,15**	**85,45**
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	328.499.211.121,70	310.663.672.236,40	94,57
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	635.180.332.732,88	534.957.732.831,64	84,22
2.2.3.	Belanja Modal	1.774.457.919.039,81	1.460.735.137.628,11	82,32
2.3.	**BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN**	**432.878.953.375,00**	**410.457.701.475,00**	**94,82**
2.3.2.	Belanja Bantuan kepada Pemerintah Bawahan	44.549.800.000,00	44.549.800.000,00	100,00
2.3.4.	Belanja Bantuan Kepada Instansi Vertikal dan Bidang Pendidikan lainnya	43.845.880.000,00	40.421.930.000,00	92,19
2.3.5.	Belanja Bantuan Kegiatan Kepariwisataan Daerah	8.994.073.900,00	7.995.004.700,00	88,89
2.3.6.	Belanja Bantuan untuk Organisasi Sosial	259.565.722.150,00	250.116.110.300,00	96,36
2.3.7.	Bantuan untuk Organisasi Profesi dan Lembaga Ibadah	75.923.477.325,00	67.374.856.475,00	88,74
2.4.	**BELANJA TIDAK TERSANGKA**	**10.000.000.000,00**	**1.340.258.315,00**	**13,40**
2.4.1.	Belanja Tidak Tersangka	10.000.000.000,00	1.340.258.315,00	13,40

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.9. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
2.	**BELANJA**	**4.936.755.000.000,00**	**3.355.125.402.826,58**	**67,96**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**720.147.447.669,96**	**632.559.578.246,00**	**87,84**
2.1.1.	Belanja Pegawai	450.771.173.249,96	388.616.586.246,00	86,21
2.1.4.	Belanja Hibah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	206.265.711.920,00	188.152.107.760,00	91,22
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	51.510.562.500,00	47.969.510.540,00	93,13
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.221.373.700,00	62,21
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**4.216.607.552.330,04**	**2.722.565.824.580,58**	**64,57**
2.2.1.	Belanja Pegawai	413.727.837.245,00	330.767.780.830,00	79,95
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.115.994.132.062,62	720.847.555.313,10	64,59
2.2.3.	Belanja Modal	2.686.885.583.022,42	1.670.950.488.437,48	62,19

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.10. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
2.	**BELANJA**	**4.886.786.651.231,40**	**3.690.320.384.133,63**	**75,52**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**925.213.956.060,63**	**801.462.986.688,00**	**86,62**
2.1.1.	Belanja Pegawai	549.455.160.266,63	548.239.869.313,00	99,78
2.1.4.	Belanja Hibah	103.854.709.600,00	71.111.859.300,00	68,47
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	92.426.908.760,00	82.949.871.700,00	89,75
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	169.477.177.434,00	94.404.300.000,00	55,70
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	4.757.086.375,00	47,57
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.961.572.695.170,77**	**2.888.857.397.445,63**	**72,92**
2.2.1.	Belanja Pegawai	454.370.730.295,08	376.446.709.124,00	82,85
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.965.001.230,87	818.703.276.967,00	68,17
2.2.3.	Belanja Modal	2.306.236.963.644,82	1.693.707.411.354,63	73,44

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.11. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
2.	**BELANJA**	**5.022.795.190.035,06**	**4.000.300.138.358,61**	**79,64**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.415.781.111.251,79**	**1.309.898.319.263,61**	**92,52**
2.1.1.	Belanja Pegawai	773.967.224.601,79	696.453.749.180,94	89,98
2.1.4.	Belanja Hibah	108.275.984.350,00	102.214.599.350,00	94,40
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	90.440.550.000,00	79.568.300.730,00	87,98
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	439.847.225.000,00	429.936.464.702,67	97,75
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.250.127.300,00	1.725.205.300,00	53,08
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.607.014.078.783,27**	**2.690.401.819.094,00**	**74,59**
2.2.1.	Belanja Pegawai	409.009.606.237,00	241.611.230.477,00	59,07
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	995.206.210.424,46	995.206.210.424,46	64,35
2.2.3.	Belanja Modal	2.202.798.262.121,81	1.808.422.839.220,58	82,10

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, 2009.

Tabel. 3.12. Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 – TA. 2009.

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Defisit / Surplus (Rp.)	%
1	2	3	4		6
1.	2005	2.998.441.511.229,00	2.691.188.526.602,56	(307.252.984.626)	89,75
2.	2006	4.252.589.261.985,00	3.584.915.417.703,10	(667.673.844.282)	84,30
3.	2007	4.936.755.000.000,00	3.355.125.402.826,58	(1.581.629.597.173)	67,96
4.	2008	4.886.786.651.231,40	3.690.320.384.133,63	(1.196.466.267.098)	75,52
5.	2009	5.022.795.190.035,06	4.000.300.138.358,61	(1.022.495.051.676)	79,64
Jumlah		22.097.367.614.480,50	17.321.849.869.624,50	(4.775.517.744.856)	79,43

Berdasarkan tabel di atas, nilai anggaran untuk alokasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 adalah sebesar Rp. 22.097.367.614.480,50 dengan realisasi sebesar Rp. 17.321.849.869.624,50 (79,43%) atau tidak terealisasi sebesar Rp. 4.775.517.744.856,-.

B.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang dihadapi pada pelaksanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan belum tersedianya *Standard Analisa Belanja* (SAB) sebagai instrumen kendali.
2. Berkenaan dengan implementasi kebijakan pembangunan, ada beberapa kegiatan dalam program yang sampai dengan triwulan ke empat belum dapat dilaksanakan.
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.
4. Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.
5. Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja.
6. Belum digunakannya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah.
7. Pemahaman secara komprehensif atas pengelolaan keuangan daerah dan perubahan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh atas realisasi pelaksanaan belanja daerah.

Solusi yang diperlukan sebagai tindak lanjut mengatasi permasalahan tersebut ke depan adalah :

1. Perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat terhadap prioritas program dalam perencanaan program tahunan dan penggunaan Standar Analisa Belanja dengan benar yang dimulai dengan penyusunan SAB dan sosialisasi pemanfaatannya dalam perencanaan program termasuk penerapannya dalam evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan. Untuk itu pada TA. 2009 telah digunakan Analisa Standar Belanja (ASB) dalam memverifikasi program dan kegiatan prioritas.

2. Perlu dibangun komitmen dan konsistensi dalam pengambilan kebijakan khususnya terhadap program dan kegiatan yang diperkirakan akan memerlukan waktu pelaksanaan cukup lama supaya lebih cepat dilaksanakan dan sedapat mungkin dihindari terjadinya penumpukan jadual pelaksanaan dan pembiayaan pada triwulan ke empat.

3. Perlu dilakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap penetapan tujuan dan sasaran kegiatan dan dilakukan secara terkoordinasi, terukur berdasarkan indikator kinerja dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

4. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 terus-menerus dilakukan disertai dengan implementasinya dalam rangka pelaksanaan anggaran yang efektiv dan efisien serta dapat dipertanggungjawab.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

C.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas dua komponen yaitu Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran. Berikut diuraikan Pembiayaan Daerah TA. 2005 – TA. 2009.

Tabel. 3.13. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
3.	**PEMBIAYAAN**	**48.038.553.554,15**	**9.051.041.680,62**	**18,84**
3.1.	**PEMBIAYAAN PENERIMAAN**	**48.038.553.554,15**	**9.051.041.680,62**	**18,84**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	48.038.553.554,15	9.051.041.680,62	18,84
3.2.	**PEMBIAYAAN PENGELUARAN**	**-**	**-**	**-**
3.2.1.	Penyertaan Modal	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2005, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.14. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
3.	**PEMBIAYAAN**	**464.506.579.831,95**	**464.502.545.764,95**	**100,00**
3.1.	**PEMBIAYAAN PENERIMAAN**	**496.689.579.831,95**	**496.685.545.764,95**	**100,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	496.689.579.831,95	496.685.545.764,95	100,00
3.2.	**PEMBIAYAAN PENGELUARAN**	**32.183.000.000,00**	**32.183.000.000,00**	**100,00**
3.2.1.	Penyertaan Modal	32.183.000.000,00	32.183.000.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.15. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
3.	**PEMBIAYAAN**	**1.111.257.520.224,20**	**1.109.338.710.726,85**	**99,83**
3.1.	**PEMBIAYAAN PENERIMAAN**	**1.111.257.520.224,20**	**1.109.338.710.726,85**	**99,83**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	1.111.257.520.224,20	1.109.338.710.726,85	99,83
3.2.	**PEMBIAYAAN PENGELUARAN**	**-**	**-**	**-**
3.2.2.	Penyertaan Modal	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2007, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.16. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
3.	**PEMBIAYAAN**	**918.572.354.701,40**	**918.245.615.942,61**	**99,96**
3.1.	**PEMBIAYAAN PENERIMAAN**	**981.283.032.342,40**	**978.294.023.262,61**	**99,70**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu			
3.2.	**PEMBIAYAAN PENGELUARAN**	**62.710.677.641,00**	**60.048.407.320,00**	**95,75**
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	62.500.000.000,00	60.000.000.000,00	96,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	210.677.641,00	48.407.320,00	22,98

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 3.17. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
3.	**PEMBIAYAAN**	**1.275.258.965.570,03**	**1.317.359.944.111,09**	
3.1.	**PEMBIAYAAN PENERIMAAN**	**1.433.320.030.794,30**	**1.378.359.944.111,09**	**96,17**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	1.433.320.030.794,30	1.378.359.944.111,09	96,17
3.2.	**PEMBIAYAAN PENGELUARAN**	**158.061.065.224,27**	**61.000.000.000,00**	**38,59**
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	78.445.838.234,00	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	29.615.226.990,27	11.000.000.000,00	37,14

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2009.

Tabel. 3.18. Rekapitulasi Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA. 2005 – TA. 2009.

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	2005	496.685.545.764,95
2.	2006	1.143.449.110.625,20
3.	2007	954.262.484.542,28
4.	2008	1.434.772.934.579,30
5.	2009	559.778.058.450,46

Sumber : BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara (TA. 2005 – 2008)
Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (TA.2009)

Berdasarkan tabel 3.18 tersebut di atas, terdapat kenaikan pada komponen SILPA pada TA. 2006 sebesar 230,22% jika dibandingkan pada TA. 2005. Demikian juga pada TA. 2008, terdapat kenaikan sebesar 150,35%. Dapat dilihat bahwa rata-rata Saldo Kas Anggaran

per 31 Desember setiap tahunnya tersisa cukup besar. Hal ini dapat disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Daerah yang pencapaiannya melebihi target (TA. 2005, TA. 2006 dan TA. 2008).
2. Tidak terserapkan anggaran disebabkan penyerapan Belanja yang tidak maksimal (TA. 2007 dan TA. 2009).

C.2. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dalam pelaksanan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyusun anggaran untuk Penyertaan Saham kurang memperhatikan payung hukum yang mendasarinya.
2. Dalam mengalokasikan Pembentukan Dana Cadangan dan Pembayaran Pokok Utang belum dipersiapkan administrasi dan aturan hukum yang mendasarinya, sehingga penyerapan rendah.

Adapun Solusi yang diperlukan adalah :

1. Pada proses Penyertaan Saham perlu dilakukan persiapan perangkat hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaannya, sehingga pada proses perencanaan pembiayaan daerah bersifat efektif dan mengacu pada prinsip efisiensi anggaran.
2. Agar dalam mengalokasikan anggaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Pembayaran Pokok Utang terlebih dahulu memperhitungkan peraturan dan landasan hukum yang mendasarinya.

BAB IV.
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri ususan pemerintahan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebaiamana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan sederhana dan cepat.

Dalam RPJMD 2005–2010, melalui vitaliasi dan aktualisasi Gerbang Dayaku menitik beratkan pada tiga pilar pemberdayaan; (1) Pemberdayaan Pemerintahan Daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum, (2) Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi, (3) Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

Ketiga pilar pemberdayaan tersebut, menitikberatkan pada optimalisasi pemberdayaan semua komponen; pemerintahan, masyarakat dan ekonomi yang bersinergi dalam membangun daerah. Melalui pemberdayaan ketiga komponen tersebut diharapkan dapat mempercepat pergerakan roda perekonomian sesuai dengan amanat rakyat. Untuk itu dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, pemerintah juga memberdayakan seluruh komponen pelaku ekonomi, baik masyarakat, pengusaha maupun para pemilik modal yang ingin menanamkan

modalnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, sinergi antara ketiga komponen tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berkualitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan perubahan terhadap cara-cara melaksanakan kegiatan pembangunan. Perubahan menuju Kutai Kartanegara yang lebih baik, yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut merupakan amanah reformasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dijalankan bersama, serta merupakan ceminan suara dan harapan rakyat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal sebagaimana tertuang dalam "*Grand Strategy*" yang dikenal dengan Program Gerbang Dayaku, maka Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan ke dalam tiga bidang pengembangan yaitu : 1) peningkatan sumber daya manusia, 2) pengembangan agrikultur dan 3) pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata.

Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara maka pelaksanaan program – program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sbb :

I. URUSAN WAJIB

i. PENDIDIKAN ;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Arah kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru; penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya; penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus; serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Partisipasi sekolah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah dibidang Pendidikan. Semakin banyak anak usia sekolah yang masih aktif sekolah maka program pemerintah di sektor Pendidikan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya jika persentase anak usia sekolah yang masih sekolah cenderung menurun maka program pemerintah dapat dinilai gagal.

1. Program dan Kegiatan

   Secara umum kebijakan di bidang pendidikan ditujukan untuk mencetak manusia dewasa yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertanggung jawab dan tahu akan kelebihan serta kekurangan dirinya sehingga menjadi pribadi yang penuh perhatian dan peduli terhadap sesamanya. Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan

bidang pendidikan yaitu, (1) kualitas pendidikan, dimana di dalamnya termasuk kualitas kurikulum, kualitas guru, dan kualitas manajemen pendidikan, (2) kesetaraan dan aksesibilitas (*equality and accessibilty*) untuk memperoleh pelayanan pendidikan (baik sarana maupun prasarananya).

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencanangkan berbagai program yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan antara lain melalui.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 menegaskan bahwa, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan pendidikan ini menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional, bahasa dan komunikasi, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Tujuan Program PAUD adalah membantu mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral dan agama secara optimal dalam

lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis dan kompetitif.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama tahun 2005-2010 melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

1) Pembangunan Gedung dan Pengadaan sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak;
2) Pengadaan alat peraga/Praktik,
3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun tidak hanya dilihat dari sisi tersedianya pendidikan saja, tetapi bagaimana mengelola masyarakat wajib belajarnya. Kewajiban

pemerintah adalah memberikan kapasitas pendidikan yang mencukupi, melalui berbagai kegiatan antara lain :

1) Pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), Laboratorium dan Ruang Praktikum;
2) Rehabilitasi sedang dan Berat Ruang Kelas, Bangunan Sekolah;
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
4) Pengadaan Alat-alat Praktik Siswa;
5) Pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas Siswa;
6) Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar serta Pendidikan Paket A dan B.

c. Program Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah diselenggarakan sebagai kelanjutan dari Pendidikan Dasar, yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berinteraksi secara produktif dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan menengah dikelompokkan kedalam 2 jenis pendidikan yaitu Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2005-2010 adalah melalui

1) Pembangunan Gedung Sekolah,
2) Penambahan Ruang Kelas,
3) Pembangunan Laboratorium atau Ruang Praktikum,
4) Rahabilitasi berat/sedang sekolah atau ruang kelas,
5) Pengadaan Perlengkapan Sekolah,
6) Pengadaan alat-alat praktik/peraga,
7) Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa,

8) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM),
9) Pengembangan SMA Unggulan, Pembinaan Kemampuan Siswa/Sekolah.

d. Program Pendidikan Non Formal

Sejauh ini, anggaran yang berkaitan dengan pendidikan masih terbatas, sehingga berbagai upaya untuk dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalamnya.

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi, pendidikan luar sekolah berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai dan diminati serta berakar dalam masyarakat. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

Dalam hubungan ini pendidikan termasuk pendidikan nonformal yang berbasis kepentingan masyarakat lainnya, perlu mencermati hal tersebut, agar keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya pembangunan di masyarakatnya. Ini berarti bahwa pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau rujukan dalam penyelenggaaraan program pendidikannya. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melalui

1) Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C;
2) Pengadaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKB;
3) Kecakapan hidup melalui berbagai pelatihan;
4) Serta berbagai pembelajaran seperti workshop, Pembekalan teknis dll.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Keberhasilan dalam bidang pendidikan tidak hanya terfokus pada berhasil atau tidaknya masyarakat yang mengikuti program pendidikan, baik di jalur formal maupun non formal, akan tetapi juga ditentukan oleh Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu 2005-2010 dalam upaya peningkatan pendidikan melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan antara lain melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

1) Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik,

2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi,
3) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik,
4) Peningkatan Mutu Guru Mata Pelajaran.

f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga minat dan budaya baca masyarakat kita belum sebagaimana yang diharapkan. Faktor adat istiadat atau kebiasaan, faktor tingkat kebutuhan, faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan dan sebagainya, menjadi salah satu penyebab masih rendahnya minat baca. Jika sejumlah faktor atau penyebab itu dikaitkan dengan Human Development Index (HDI) ternyata tidak pernah ada data konkrit yang menunjukkan adanya korelasi yang erat antara rendahnya peringkat HDI Indonesia yang diukur dari tingkat kemiskinan, kesehatan dan pendidikan dengan kondisi rendahnya minat dan budaya membaca. Tetapi secara logika saja, dapat diasumsikan, jika minat dan budaya baca masyarakat kita sudah terbentuk, maka seharusnya tingkat pendidikan atau pengetahuan di Indonesia juga cukup tinggi.

Salah satu upaya yang merupakan kunci untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, adalah melalui kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca, karena tingkat kemajuan suatu bangsa juga ditentukan oleh kemampuan bangsa itu untuk mengakomodasi

perkembangan pengetahuan dan teknologi yang menjadi ciri dan penentu kemajuan bangsa.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain melalui

1) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang kelembagaan pendidikan,
2) Kegiatan Perencanaan, Pendataan, Pembinaan dan Penginformasian Pendidikan,
3) Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan,
4) Pembuatan Kalender Pendidikan dll.

h. Program Pendidikan Tinggi

Salah satu faktor yang memiliki daya dukung kuat dalam peningkatan mutu pendidikan pada suatu daerah adalah dengan tersedianya pendidikan tinggi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri telah memiliki beberapa fasilitas Pendidikan Tinggi.

Untuk itu dalam beberapa tahun terakhir kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Pembangunan Gedung Kampus Unikarta,
2) Pembangunan RKB STT Tenggarong,

3) Pembangunan RKB Perkuliahan D2 PGSD UT Kudungga,
4) Pendidikan Politeknik Muara Jawa.

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2005-2010 pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari besaran Indek Kinerja Kunci pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang pada tahun 2005 sebesar 47,8% dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan mencapai 97%; Penduduk usia 15 tahun melek huruf pada tahun 2009 sebesar 73,47% mengalami penurunan dibanding tahun 2005 yang sebesar 95,01%; Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD tahun 2009 sebesar 78,36% mengalami penurunan dibanding tahun 2005 sebesar 91,25%, tingkatan SMP tahun 2009 sebesar 81,34 mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 sebesar 70,12% dan jenjang SMA tahun 2009 sebesar 81,37% mengalami kenaikan penurunan dibanding tahun 2005 yang sebesar 81,53%. Sementara untuk Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD, SMP dan SMA masing-masing dibawah 1 %.

Disamping itu juga untuk Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD, SMP dan SMA pada tahun 2009 mencapai rata-rata diatas 99 % meningkat bila dibanding tahun 2005 yang sebesar 85%, sedangkan banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP pada tahun 2005 sebesar 83% dan pada tahun 2009 mencapai 100 % serta dari SMP ke SMA pada tahun 2005 sebesar 78% dan tahun 2009 mencapai 97 % dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada

tahun 2005 mencapai 0% dikarenakan pada tahun 2005-2006 Dinas Pendidikan belum melaksanakan standar Kualifikasi guru dan baru dilaksanakan pada tahun 2007-2009 sedangkan tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 50,87 %.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Bidang pendidikan Selama Tahun 2005-2009

Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
PAUD	47,8%	55%	46,2%	4,59%	97%
AMH	95,01%	97,54%	96,35%	54%	73,47%
APM – SD	91,25%	95,20%	87,35%	76%	78,36%
- SMP	70,12%	75,79%	83,31%	63%	81,34%
- SMA	81,53%	83,05%	82,60%	69%	81,37%
APS - SD	0%	0%	1%	1%	0%
- SMP	1,76%	1,43%	1,27%	0,9%	0,21%
- SMA	2,06%	1,46%	1,03%	1%	0,87%
AL - SD	100%	100%	98,45%	100%	100%
- SMP	93,59%	97%	99,87%	99,79%	99,51%
- SMA	89%	96%	99%	98,24%	99,02%
AM SD-SMP	83%	88%	95%	90%	100%
AM SMP-SMA	78%	84%	88%	90%	97%

Sedangkan apabila ditinjau dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan selama tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang pendidikan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	292.999.214.041	185.815.066.314	63,42
2006	91.308.024.877	75.692.552.474	82,90
2007	483.907.092.490	385.241.047.369	79,61
2008	431.752.924.768	332.223.846.656	76,95
2009	327.298.628.534	264.742.051.772	80,89
2010	368.715.029.747	-	-
Jumlah	1.995.980.914.457	1.243.714.564.585	62,31

3. Permasalahan dan Solusi

   Permasalahan yang ada pada urusan pendidikan adalah kondisi bangunan sekolah banyak yang tidak layak, selain itu jumlah RKB tidak sesuai dengan rombong belajar dan fasilitas penunjang (perpustakaan, Laboratorium, UKS, Ruang guru dan instalasi listrik) tidak memadai.

   Solusinya perlu adanya pembangunan gedung sekolah baru, rehabilitasi berat / ringan dan pemasangan instalasi listrik pada beberapa gedung sekolah yang sudah ada namun masih kekurangan perlengkapan.

ii. KESEHATAN;

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok dan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang nomor 23 / 1992 menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Oleh karena itu negara bertanggung jawab dalam pengaturan hak hidup sehat bagi penduduknya. Pembangunan Kesehatan adalah pembangunan manusia seutuhnya dimana faktor kesehatan turut berperan mulai dari pra konsepsi, bayi, balita, remaja, dewasa hingga usia lanjut.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Kutai Kartanegara Sehat 2010 maka tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatkan pelayanan kesehatan secara bermutu, merata dan terjangkau, tersedianya sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta terwujudnya kesamaan persepsi dan kesadaran serta komitmen *stakeholder* terhadap aspek kesehatan dalam seluruh kegiatan pembangunan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi untuk menuju perubahan ke arah yang

lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

1. Program dan Kegiatan

   Adapun program-program pembangunan kesehatan yang akan diterapkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

   a. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

      Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat, meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat baik bagi individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Sasaran program meliputi meningkatnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat, terwujudnya komitmen semua unsur atau *stakeholders* kesehatan akan pentingnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat.

   b. Program Lingkungan Sehat

      Tujuan program ini adalah mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan. Sasaran program ini adalah meningkatnya persentase keluarga penghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan, meningkatnya persentase keluarga pengguna air bersih, meningkatnya

keluarga pengguna jamban yang memenuhi syarat kesehatan, meningkatnya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan serta meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat.

c. Program Upaya Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum, puskesmas dan jaringannya, meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan di desa serta posyandu. Sasaran program ini adalah meningkatnya cakupan rawat jalan, meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4), cakupan neonatus (KN2) dan cakupan kunjungan bayi terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi kelurga miskin secara gratis di Puskesmas.

d. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Tujuan program ini adalah menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Sasaran programnya adalah persentase desa UCI mencapai 100 %, meningkatnya temuan kasus penyakit TB dan meningkatnya keberhasilan pengobatan penderita TB, semua penderita DBD bisa ditangani, penderita malaria semua bisa diobati, terselenggaranya sistem surveilans dan kewaspadaan dini, serta penanggulangan kejadian luar biasa.

e. Program Perbaikan Gizi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keluarga sadar gizi dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif. Sasaran program yakni mencegah meningkatnya prevalensi kegemukan dan KEP pada balita, anak sekolah dan orang dewasa, meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe, menurunnya prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil dan ibu nifas, meningkatnya cakupan ASI eksklusif, serta meningkatnya cakupan balita mendapatkan Vitamin A dengan pemberian 2 kali pertahun serta meningkatnya konsumsi garam beryodium dan zat gizi mikro lainnya.

f. Program Sumber Daya Kesehatan

Tujuan program adalah untuk meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan lainnya, serta pemberdayaan profesi kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Sasaran program ini adalah tersedianya SDM kesehatan yang kompeten dan didistribusikan secara proposional serta dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada dan pengembangan pembinaan karir seluruh tenaga kesehatan, tersedianya jaringan pemberi pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu baik pemerintah maupun swasta, tersedianya peralatan kesehatan baik medis maupun non medis yang memenuhi standar dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat akan pelayanan kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta sarana penunjang lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.

g. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan.

   Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika. Sasaran program yakni ketersediaan obat esensial maupun generik di sarana pelayanan kesehatan serta meningkatnya anggaran untuk obat esensial di sektor publik.

h. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

   Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kebijakan serta manajemen kesehatan sehingga berguna dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Sasaran program meliputi tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersedianya berbagai kebijakan serta pedoman kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah, tersedianya informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan untuk proses pengambilan dan pengelolaan pembangunan kesehatan, serta untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi program kesehatan, tersusunnya perencanaan kesehatan yang mendukung desentralisasi dan pembangunan daerah,

tercapainya target program, proyek dan kegiatan yang telah ditetapkan secara tepat waktu, berkualitas dan berkesinambungan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

   Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun (th 2005 – 2010) pada bidang Kesehatan dapat dilihat dari besaran Indek Kinerja Kunci antara lain :

   - **Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani**, pada tahun 2005 sebesar 16,5%, tahun 2006 18,17%, tahun 2007 18,17%, tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 3,77% dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan mencapai 5,35%.
   - **Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan** pada tahun 2005 sebesar 57,2%, tahun 2006 66,2%, tahun 2007 58,73%, tahun 2008 64,25% dan tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 59,37%.
   - **Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)** pada tahun 2005 sebesar 42%, tahun 2006 58,18%, tahun 2007 59%, tahun 2008 68,33% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan mencapai 55,51%.
   - **Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan** pada tahun 2005 sebesar 2,1%, tahun 2006 1.6 %, tahun 2007 0,29%, tahun 2008 1,54 % dan tahun 2009 terjadi penurunan 0,72%.
   - **Cakupan penemuan dan Penanganan penderita TBC BTA** pada tahun 2006 sebesar 34,37 % tahun 2007 sebesar 42,41 % tahun 2008 sebesar 32,92 % dan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 26,21 %.

- **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD** dari tahun 2005-2009 sebesar 100%.
- **Cakupan pelayanan kesehatan rajukan pasien masyarakat miskin** pada tahun 2006 30,32%, tahun 2007 terjadi penurunan menjadi 27,41%, tahun 2008 16,22%, tahun 2009 meningkat menjadi 22,47%.
- **Cakupan Kunjungan Bayi kebidanan** pada tahun 2005 sebesar 7,31%, tahun 2006 27,35%, tahun 2007 6,35%, tahun 2008 10,49% dan tahun 2009 meningkat menjadi 20,53%.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Selama Tahun 2005-2009 (%)

Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
Cakupan komplikasi kebidanan	16,5%	18,17 %	18,16 %	3,77 %	5,35 %
Cakupan pertolongan persalinan	57,2 %	66,2 %	58,73 %	64,25 %	59,37 %
Cakupan desa/kelurahan UCI	42%	58,18 %	59 %	68,33 %	55,51 %
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	2,1 %	1,6 %	0,29 %	1,54 %	0,72 %
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		34,37 %	42,41 %	32,92 %	26,21 %
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		30,32 %	27,41 %	16,22 %	22,47 %
Cakupan kunjungan bayi	7,31 %	27,35 %	6,35 %	10,49 %	20,53 %

Sementara apabila dilihat dari pelaskaan program dan kegiatan pada tahun yang sama dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kesehatan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	44.541.735.082	11.371.088.150	25,53
2006	34.149.776.651	26.650.263.810	78,04
2007	72.817.836.751	15.795.753.853	21,69
2008	149.998.249.417	48.382.628.574	32,26
2009	110.938.281.484	84.141.320.894	75,85
2010	136.344.457.866	-	-
Jumlah	548.790.337.251	186.341.055.281	33,95

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada pada urusan Kesehatan adalah tejadinya Fluktuasi cakupan dari beberapa program kesehatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini mengingat pelaporan dan sistem informasi yang masih belum bisa berjalan dengan baik dan turunnya Dana APBD yang tidak tepat waktu.

Solusinya yaitu perlu adanya komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik lintas program maupun lintas sektoral untuk bersama sama meningkatkan capaian program sesuai dengan target yang sudah ada, mengingat bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi seluruh

elemen pemerintah serta masyarakat dan diharapkan turunnya dana APBD tepat waktu sesuai perencanaan anggaran, sehingga program dan kegiatan berjalan sesuai dengan Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Meningkatnya derajat kesehatan yang optimal pada masyarakat.
2. Terwujudnya jaminan pelayanan kesehatan yang baik, adil, merata, bermutu, aman dan memenuhi standar pelayanan serta bertanggung jawab.
3. Semakin meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang bermutu, profesional dan mudah dijangkau masyarakat.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.
5. Dimilikinya produk kebijakan kesehatan yang dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, dalam seluruh kegiatan pembangunan kesehatan.

4. Hal-hal yang perlu dilaporkan

Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2005-2010 telah mencapai sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatatan yaitu :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan terciptanya lingkungan sehat.
b. Terciptanya pelayanan masyarakat yang efektip melalui Jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).
c. Efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pembangunan kesehatan dengan peningkatan sumberdaya manusia.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
e. Terciptanya Jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas),
f. Sertifikasi SNI ISO 9001 pada Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tahun 2008 dan Puskesmas Loa Ipuh pada tahun 2009

iii. LINGKUNGAN HIDUP;

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya.

Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi tetapi menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya alam. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberi

kesempatan dan ruang bagi peranserta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya.

Untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka telah dilaksanakan kegiatan berupa

1) Pemantauan Kualitas Lingkungan;
2) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
3) Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
4) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup serta
6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang lingkungan hidup.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, Bantuan dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Kalimantan Timur Hijau

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
2. Pendamping DAK Lingkungan Hidup
3. Kaltim Hijau
4. Dukungan Dalam Rangka Kaltim Hijau

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
2) Pemantauan Kualitas Air.

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Renovasi TPS, Pengadaan Kendaraan Mobil dan Motor Operasional Pengangkut sampah, Pelatihan Pengelolaan Persampahan 3R (Re-Duce, Re-Use, Re-Cycle), Pengadaan Tong Sampah dan Rehabilitasi Container Serta Gerobak Sampah.

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di

kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikannya melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

1) Pemeliharaan RTH,
2) Pembuatan dan Pemeliharaan Taman Kota,
3) Pembuatan Pot Bunga,
4) Pengadaan Bibit Tanaman serta
5) Pembuatan dan pemeliharaan Sarana Penunjang.

g. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1) Pemagaran Kuburan Muslimin Mangkunegara Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.
2) Pemagaran Kuburan Muslimin Kelurahan Sukarame dan Pengurukan Kuburan Muslimin Rondong Demang Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pendayagunaan Sumber Daya Alam Kabupaten Kutai Kartanegara sebagi unsur pokok untuk kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Sebagai

implementasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup tersebut, kinerja yang ditunjukkan dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tahun 2009 yang mencapai 24 %, terdapat penurunan dibanding tahun 2005 yang mencapai sebesar 78 % serta dalam penegakan hukum lingkungan pada tahun 2009 telah menyelesaikan 53 % kasus lingkungan yang diselesaikan yang berarti terjadi penurunan dibanding tahun 2005 sebesar 100 %.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Selama Tahun 2005-2009 (%)

Indikator Kinerja Kunci	2005	2006	2007	2008	2009
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	78 %	79 %	61 %	58 %	24 %
Penegakan Hukum Lingkungan	100 %	75 %	62 %	74 %	53 %

Sementara alokasi dan realisasi anggaran yang telah disediakan untuk bidang Lingkungan Hidup selama Tahun Anggaran 2005-2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Lingkungan Hidup selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	10.792.031.147	10.203.184.847	94,54
2006	4.736.207.000	4.421.625.698	93,36

2007	13.746.317.625	13.005.953.800	94,61
2008	2.048.990.000	1.802.762.560	87,98
2009	8.479.988.610	7.860.188.010	92,69
2010	31.611.384.487	-	-
Jumlah	71.414.918.869	37.293.714.915	52,22

3. Permasalahan dan Solusi

   Permasalahan yang ada pada bidang lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan laju degradasi lingkungan yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, danau serta ekosistem pesisir dan laut.

   Solusinya adalah dengan meningkatkan laju degradasi lingkungan yang meliputi sumberdaya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, danau serta ekosistem pesisir dan laut.

4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

   Untuk Bidang Lingkungan Hidup Prestasi Nasional yang dicapai Tahun 2009 adalah Juara I Tingkat Nasional Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tingkat Kabupaten/ Kota.

iv. PEKERJAAN UMUM;

1. Program dan Kegiatan

   Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil sebagai

penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, beberapa rincian kegiatan per program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jalan dan jembatan serta penambahan kapasitas jalan dan jembatan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

1) Pembuatan Jembatan Ulin
2) Penggantian Jembatan Ulin Menjadi Jembatan Beton
3) Pembangunan Jalan
4) Pembangunan Jembatan
5) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
6) Perencanaan Teknis Jalan
7) Studi Kelayakan Pembangunan Jalan
8) Pembangunan Badan Jalan/Jembatan Ulin
9) Pembuatan Parit Saluran
10) Pelebaran/Penurapan, Pengurukan & Semenisasi Gang.

b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem transportasi termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum dengan kegiatan utama antara lain melalui kegiatan Pembangunan Dermaga Angkutan Sungai dan Bongkar Muat.

c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

1) Pembuatan Parit /saluran air
2) Pembangunan Gorong-Gorong
3) Pembuatan Drainase
4) Pembuatan Saluran Air Untuk Kelompok Tani

d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1) Turap sheet pile beton tepi Sei Mahakam
2) Bangunan Penahan Erosi
3) Pembangunan Turap
4) Penurapan Sheet Pile Beton
5) Perencanaan Teknis Sheet Pile Concrete Kawasan Tanjung
6) Lanjutan Pembuatan Tanggul Abrasi laut
7) Pengurukan dan Penahanan Gelombang

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1) Pembangunan Pos Polisi Lalu Lintas

f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1) Peningkatan dan Pelebaran Jalan
2) Penanganan Longsoran Ruas Jalan
3) Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
4) Pengawasan Peningkatan Jalan
5) Pengerasan Jalan

g. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1) Inventarisasi Jalan, Jembatan, Irigasi dan Sarana Prasarana Bangunan di Kab Kukar

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1) Pembangunan Lapangan Olah Raga
2) Penataan Lahan Olah Raga
3) Pembangunan Asrama Atlit
4) Pembangunan Sistem Infrastruktur (Listrik, Air Bersih, Air Buangan dan Telpon)
5) Penyediaan Jaringan Infrastruktur Olah Raga

i. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

1) Pembuatan Software Inventarisasi Berbasis Map Info
2) Pembangunan infrastruktur Hardware dan software
3) Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan

j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1) Penataan Jaringan Komputer dan Sistem Informasi DPU
2) Pengadaan Tanah Workshop dan Pematangan Lahan
3) Pembangunan Lapangan Parkir Perkantoran
4) Operasional dan Pembelian Sarana Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
5) Pembangunan Gedung Lab DPU di Tenggarong
6) Pemeliharaan Workshop

k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1) Pembuatan Pintu Sekat
2) Perencanaan Pembuatan saluran Induk Daerah.
3) Pembangunan Jaringan Irigasi
4) Pembuatan pintu air
5) Operasional Pemeliharaan Pengairan Di Kab Kukar
6) Persiapan Lahan Berpengairan (PLB)
7) Normalisasi Sungai untuk Pengaman Banjir
8) Pendamping Kegiatan DAK
9) Pencetakan sawah dan Irigasi Modern
10) SID Percetakan sawah
11) Pompanisasi dan Jaringan Irigasi
12) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa
13) Pembangunan sarana Intake Sungai
14) Peningkatan Air Bersih
15) Pembuatan Kanal Penghubung
16) Rehab Pintu Air
17) Pembangunan Pompanisasi Pengairan Sawah

18) Pemeliharaan Bendungan dan Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder
19) Pembersihan dan Pengurukan saluran irigasi.

l. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1) Pendampingan DAK Non DR
2) Pembuatan Sumur Bor

m. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1) Penanganan Abrasi Sungai
2) Normalisasi Sungai
3) FS pembuatan Folder / penampung air dan hutan kota
4) Rehabilitasi Total Bendung, Pintu dan Pengerukan Waduk Panji Sukarame
5) Pemeliharaan bendungan dan normalisasi saluran primer dan sekunder
6) Pemberdayaan Petani pemakai air dan pengembangan tata guna air Kab. Kukar
7) Pencetakkan sawah
8) Persiapan Lahan berpengairan (PLB)

n. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1) Peningkatan Saluran Jaringan Air Bersih
2) Peningkatan Instalasi Air Bersih
3) Penggantian Pipa PDAM dan LPJU

4) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa distribusi SPAM
5) Penurapan Saluran Induk Pembuangan Air Limbah
6) Pembangunan Saluran Pembuangan Air

o. Program Pengendalian Banjir

1) Perkuatan Dinding Penahan Tanggul Banjir
2) Bangunan Penahan Erosi
3) Pembuatan Penahan Gelombang / Abrasi Pantai
4) Normalisasi Sungai untuk Pengaman Banjir
5) Pengerukan dan Penahan Gelombang Muara Sungai

p. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1) Pembangunan Pelabuhan.
2) Perencanaan Pembangunan Pasar Basah Tenggarong.
3) Pembangunan Pasar Di Kel Mangkurawang Kec Tenggarong
4) Perencanaan Teknis Permukiman Perkotaan
5) Pembangunan dan Rehab Gedung Perkantoran
6) Rehab Ponpes
7) Pembangunan Langgar, Mesjid dan tenpat ibadah lainnya.
8) Peningkatan Sarana Ibadah
9) Perencanaan Pemb. Perumahan Dinas
10) Pembangunan Jalan & Infrastruktur Perumahan Kopri.
11) Kegiatan SID, FS dan DED Pembangunan Pelabuhan Samboja Kuala Kec. Samboja

12) Master Plan Kota Tenggarong dan Tenggarong Seberang

q. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1) Pembangunan kantor Kelurahan/Desa
2) Pembangunan/Renovasi Tempat Ibadah
3) Perbaikan dan Pelebaran Gang
4) Semenisasi Gang.
5) Pembangunan Badan jalan dan Perkerasan jalan
6) Pembangunan jembatan gang.
7) Pembuatan Turap dan Peningkatan Gang.
8) Pembangunan / Rehab Mesjid.
9) Renovasi Area Makam.
10) Pembuatan Pagar Kuburan Desa.
11) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Mesjid.
12) Rehab BPU Desa.

r. Program Gerbang Dayaku

1) Peningkatan Sarana & sarana Kel/desa
2) Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan
3) Pengadan Konstruksi Jalan di Kelurahan
4) Pengadaan Konstruksi / Bangunan / Sarana Kelurahan
5) Kegiatan Olah Raga Kelurahan
6) Pelatihan Kewirausahaan UKM

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dilihat dari tingkat pencapaian Indikator Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pekerjaan Umum masih belum maksimal. Hal ini terlihat kondisi Jalan Kabupaten yang dalam keadaan baik hanya mencapai 18%. Demikian juga halnya dengan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi baik hanya mencapai 25,32%, namun demikian apabila dilihat dalam hal rumah tangga bersanitasi, maka kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2006 mencapai 62,49 % disusul sebesar 65,03 % pada tahun 2007, sedangkan tahun 2008 sebesar 65,58 % dan tahun 2009 sebesar 66,48 %. Sementara itu ruang terbuka hijau pada tahun 2009 baru sebesar 19, 46%.

Grafik 4.1. Kondisi dan Panjang Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 (km)

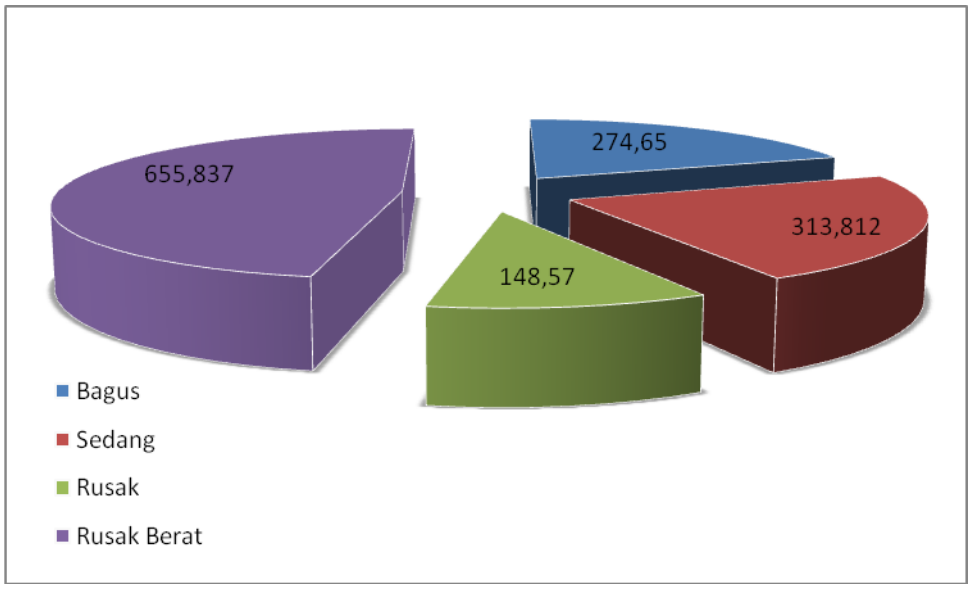

Grafik 4.2. Kondisi dan panjang jalan di 17 kecamatan tahun 2009 (km)

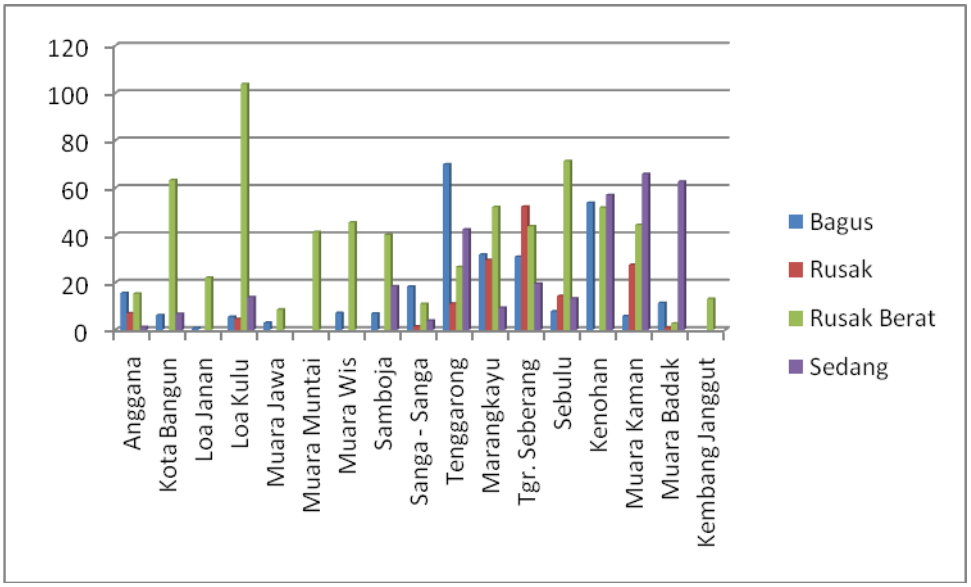

Tabel 4.7. Presentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Selama Tahun 2005-2009.

Tahun Anggaran	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Irigasi Kabupaten	Presentase
2005	6.110,00 Ha	7.038,00 Ha	86,81 %
2006	6.673,00 Ha	7.075,55 Ha	94,31%
2007	7.038,00 Ha	7.440,55 Ha	94,59%
2008	7.908,00 Ha	7.990,55 Ha	98,97%
2009	8.213,00 Ha	11.398,00 Ha	72,06%

Disisi lain apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2009, maka dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.8. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pekerjaan Umum selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	773.608.913.506	316.127.392.364	40,86
2006	1.326.020.014.391	1.135.342.045.788	85,62
2007	1.771.685.779.429	1.130.168.709.261	63,79
2008	1.490.070.325.809	1.051.510.207.094	70,57
2009	1.508.506.229.938	1.126.212.007.007	74,66
2010	1.301.116.221.940	-	-
Jumlah	8.171.007.485.014	4.759.360.361.514	58,25

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Tahap Penganggaran

Masih terdapat usulan-usulan program dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara yang tidak masuk dalam APBD yang disahkan dan disetujui DPRD. Usulan yang ada telah disesuaikan dengan Renstra, Musrenbang dan usulan-usulan dari masyarakat. Program dan usulan dimaksud telah dilakukan DED dan gambar, sehingga pada tahun berjalan tinggal pelaksanaan fisik. Dengan adanya program baru yang tidak diusulkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara

mengakibatkan kegiatan perencanaan DED dan fisik pada tahun yang sama.

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini yang paling berpengaruh adalah waktu pengesahan APBD, jika terlambat maka pelaksanaan fisik dapat terlambat juga. Keterlambatan ini akan bertambah jika program/kegiatan yang ada belum memiliki DED perencanaan (program/kegiatan tidak diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara).

Waktu pelaksanaan kegiatan proyek meliputi tahapan-tahapan :

a. Proses evaluasi pelelangan jasa konsultasi perencanaan selama 30 hari.
b. Proses penyusunan, gambar DED dan RAB selama 3 bulan.
c. Proses evaluasi pelelangan jasa konstruksi pemborongan selama 30 hari.

Diperlukan waktu 150 hari, sehingga apabila waktu pengesahan APBD terlambat maka pelaksanaan fisik yang dibatasi sampai 15 Desember 2010 akan mengurangi lingkup pekerjaan dan tolok ukur pembangunan. Dalam perjalanan waktu, terdapat kendala-kendala alam seperti curah hujan, kesulitan transportasi ke lokasi dan adanya masa libur saat lebaran. Kendala lain yang muncul adalah permasalahan lahan yang belum dibebaskan.

3) Sumber Daya Manusia (SDM)

Besarnya pagu anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara dan banyaknya jumlah paket kegiatan yang ada, menuntut adanya SDM pegawai yang mampu menangani sejumlah kegiatan dimaksud. Untuk dapat menjadi PPTK syaratnya dituntut adanya pengetahuan teknik tentang paket dimaksud. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara yang memiliki pendidikan S1 Teknik masih kurang sehingga terdapat pegawai yang mengelola beberapa paket. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara masih berimbang antara pendidikan teknis (teknik sipil dan arsitek) dengan non teknis yang bersifat administrasi.

4) Lokasi Pekerjaan

Paket pekerjaan yang berada pada lokasi yang jauh menuntut sebuah pengawasan yang kontinu terhadap pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan secara kontinu juga menuntut diperlukan adanya biaya pengawasan yang lebih besar, sedangkan biaya yang disediakan dalam anggaran telah dibatasi oleh sebuah ketentuan.

Solusi

Dalam menyikapi kendala-kendala tersebut yang selalu menjadi pokok permasalahan Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah :

a. Mempertimbangkan program-program berdasarkan renstra dan musrenbang. Untuk program kegiatan yang

memerlukan waktu pembuatan DED yang lebih dari 4 bulan (proyek besar), pekerjaan perencanaan diusulkan pada tahun sebelumnya atau pada APBD perubahan, dengan pertimbangan setelah selesai proses gambar/DED pada tahun berikutnya dapat dilaksanakan pekerjaan fisik. Diperlukan sebuah komitmen yang tinggi kepada seluruh pihak untuk mentaati hal ini.

b. Dimohonkan agar pengesahan anggaran APBD dapat tepat waktu, pada awal tahun anggaran agar pelaksanaan kegiatan tidak terlambat.

c. Pada saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara telah menghimbau kepada pegawai untuk dapat melanjutkan sekolah / kuliah setingkat S1. Selanjutnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penempatan pegawai di Dinas pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara merupakan tenaga teknis.

d. Terhadap program kegiatan yang memiliki dana yang besar dan belum meliliki DED, maka berdasarkan pertimbangan waktu pelaksanaan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran dan kemungkinan penyerapan dana, serta dalam rangka tertib administrasi diharapkan adanya persetujuan pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran berjalan / multiyears.

v. PENATAAN RUANG;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini dimaksudkan untuk mengatur dan merencanakan pemanfaatan ruang kota sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksnaan pembangunan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Sosialisasi PERDA Tata Ruang Kukar
2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
3) Percepatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
4) Grand Desain Pembangunan Jangka Panjang

b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1) Fasilitasi/Sosialisasi Tata Batas Administrasi antar Kecamatan dalam Kab. Kukar
2) Penegasan penyelesaian tapal batas wilayah admininstrasi Kab. Kutai Kartanegara dengan Kab/Kota yang berbatasan
3) Pelacakan Trayek Batas Wilayah antar Kecamatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program Perencanaan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan capaian kinerja pada Ruang terbuka Hijau per satuan Luas wil. Ber HPL/HGB sebesar 19,461 %.

Tabel 4.9. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Penataan Ruang selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	5.796.670.000	4.362.670.000	75,26
2006	31.251.169.570	24.396.572.450	78,07
2007	2.165.000.000	2.041.384.567	94,29
2008	8.256.000.000	5.918.187.350	71,68
2009	467.077.600	467.077.600	100
2010	1.500.000.000	-	-
Jumlah	49.435.917.170	37.185.891.967	75,22

3. Permasalahan dan Solusi

Untuk urusan tata ruang, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami sedikit permasalahan pada SKPD yang menanganinya. Selama ini urusan Tata Ruang menjadi kewenangan Bappeda, namun dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, urusan Tata Ruang masuk dalam wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum bidang Penataan Ruang Wilayah. Namun demikian karena sifatnya masih transisi, sehingga masih terjadi tarik ulur kepentingan.

Solusinya adalah bahwa untuk kedepannya urusan tata ruang menjadi kewenangan penuh Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tupoksinya.

vi. PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Ketersediaan data statistik yang lengkap dan akurat adalah prasyarat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Oleh karena itu keberadaan dan ketersediaan data dan informasi seharusnya dianggap pula sebagai suatu sumberdaya yang harus dikelola sama baiknya dengan sumberdaya lainnya. Guna menjamin kelancaran aliran data dan informasi, maka kegiatan yang dilaksanakan melalui program pengembangan data dan informasi secara umum adalah :

1) Pembuatan Sistem Informasi E-Book Data Base Bidang Fisik Basis Web.
2) Pengembangan Sistim Informasi Geografis (GIS) Perencanaan dan Kontrol Pembangunan.
3) Updating Data Kinerja Sistem Jaringan Jalan dan Penyusunan Tingkat Prioritas Penanganan.
4) Pembuatan Peta Dasar Digital Kabupaten Kutai Kartanegara.
5) Pendampingan Pameran Luar Daerah.

b. Program Kerjasama Pembangunan

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mensinergikan perencanan pembangunan dengan dunia usaha/lembaga, menetapkan batas wilayah, dan kerja sama antar wilayah diperbatasan, serta pemecahan masalah pembangunan di daerah.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2005-2010 antara lain :

1) Pendamping Kerjasama Pemda Kukar dengan GTZ / Jerman
2) Kerjasama Kab. Kukar dengan Washington County (Amerika Serikat)
3) Pendapingan Kawasan Transmigrasi

c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Ketertinggalan pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal termasuk pedalaman, tentunya tidak terlepas dari akibat belum berkembangnya pembangunan pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Karena secara konseptual peran wilayah strategis dan cepat tumbuh diharapkan dapat mendorong perekonomian di wilayah-wilayah sekitarnya. Namun pada tataran pelaksanaannya, pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kerangka percepatan pemerataaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara banyak ditemukan berbagai kendala dan permasalahan yang mengakibatkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh belum berperan optimal. Meski diketahui bersama, telah banyak model pendekatan

pembangunan yang diimplementasikan, namun hasilnya belum mampu mewujudkan percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal termasuk perbatasan secara optimal. Implementasi pelaksanaan program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dilaksanakan melalui kegiatan pokok antara lain :

1) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan GN-KPA
2) Kajian Kelayakan Sistem Jaringan Transportasi Strategis
3) Penyusunan Masterpalan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara.
4) Penyusunan Masterplan pelabuhan dan Terminal
5) Penyusunan detail Engineering Design Railway
6) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan permukiman (RP4D)
7) Masterplan kawasan Tradisional dan Bersejarah di Kab. Kukar

d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.

Pembangunan perkotaan di Indonesia memberikan berbagai dampak bagi masyarakat secara luas, baik yang bersifat positip, maupun yang negatif. Disadari bahwa pembangunan di kota-kota besar dan menengah di Indonesia, yang dipenuhi oleh penduduk yang berurbanisasi dari desa-desa memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah, maupun bagi masyarakat. Manfaat dimaksud di antaranya dukungan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) memberikan lapangan

kerja yang luas bagi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum serta penyediaan sarana dan teknologi untuk peningkatan pengetahuan dan kepentingan warga masyarakat. Namun disadari banyak dampak negatif yang ditimbulkan pembangunan kota-kota tersebut, diakibatkan berbagai faktor, salah satu di antaranya kesalahan pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan kota.

Untuk itu pelaksanaan program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2005-2010 dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pokok antara lain :

1) Masterplan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Wilayah Pantai Kabupaten Kutai Kartanegara.
2) Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan Terbuka dan Study Kelayakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu Kota.
3) Inventarisasi Perumahan Kumuh

e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang handal dibidang perennaan pembangunan di daerah dengan mengikutsertakan Pegawai Bappeda diberbagai Bimbingan Teknis (Bintek), memberikan Pendidikan khusus seperti Fungsional Program Perencana (FPP), dan mengirim pegawai untuk mengambil Strata dua (S2) dibidang Perencanaan pembangunan Daerah diberbagai Perguruan tinggi di Indonesia

1) Peningkatan SDM Perencanaan
2) Perencanaan aksebilitas peredesaan terintegrasi (IRAP) Kecamatan Kabupaten Kukar
3) Bintek Penyusunan Rencana Pemb. Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi program ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanan pembangunan daerah dan kebijakan yang akan ditempung pemerintah daerah untuk masa akan datang, seperti : RPJP, RPJM, Renstra, RPKD, Renja, KUA, PPAS, Dll;

1) Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah.
3) Perencanaan Pengembangan ICT (Information and Communication Technology).
4) Pendukung Kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
5) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Musrenbang Nasional.
6) Pengelolaan Administrasi Umum dan Kearsipan.
7) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
8) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
9) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
10) Perencanaan Model Pengembangan Daerah Bawahan.

11) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP).
12) Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah.
13) Analisis Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kab. Kukar

g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Penyusunan Master Plan dan Action Plan Kawasan Agropolitan Kab. Kutai Kartanegara.
2) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha Jasa Terpadu di Kab. Kutai Kartanegara.
3) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Berdaya Saing Lokal dan Internasional di Kab. Kukar.
4) Studi Keruangan Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah di Kab Kutai Kartanegara.
5) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Industri Pengelolahan Hasil Pertanian di Kab. Kutai Kartanegara.
6) Musyawarah Perencanaan Bidang Ekonomi Bappeda Kab Kutai Kartanegara.
7) Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kab. Kutai Kartanegara Melalui Pendekatan SIG (Sistem Informasi Geografi).
8) Pengembangan Sistem Database Perencanaan Bidang Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara.
9) Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar.
10) Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada Bidang Pertanian di Kab Kutai Kartanegara.

11) Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Kabupaten Kutai Kartanegara.
12) Identifikasi Sarana Perdagangan dan Koperasi Potensial di kab Kukar.
13) Survey Investigasi dan Design (SID) Industri Terpilih Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kab Kutai Kartanegara.
14) Kajian Karakteristik Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan
15) Penyusunan Neraca Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
16) Penyusunan Harga Indek Konsumen (HIK) dan Inflasi Kab. Kukar.

h. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1) Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan
2) Penyusunan Masterplan Bidang Kesehatan
3) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
4) Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial
5) Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM).
6) Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7) Model Perencanaan Sistem Informasi Pendidikan.
8) Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan.

i. Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam bertujuan untuk koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah, dan koordinasi penyusunan pengendalian sumber daya alam dan lingkunagn hidup

1) Penyusunan dan Analisis Infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah.
2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove di Delta Mahakam.
3) Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kabupaten Kutai Kartanegara.
4) Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Kutai Kartanegara.

j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana bertujuan untuk menyusun profile daerah rawan bencana dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana serta kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah dalam hal penanggulangan daerah rawan bencana tersebut. Pelaksanan program tersebut dilakukan melalui kegiatan Perencanaan Pengelolaan Lahan Kritis Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keberhasilan urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan ditandai dengan telah terpenuhinya Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan pembangunan yaitu dengan telah diterbitkannya dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sementara untuk Perda RPJPD dan RPJMD masih dalam proses. Sedangkan penjabaran RPJMD untuk setiap tahunnya telah dituangkan secara keseluruhan kedalam RKPD tahun 2005-2010.

Sementara apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perencanaan Pembangunan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	27.375.829.500	24.725.829.500	90,32
2006	27.460.397.000	23.350.590.983	85,03
2007	45.507.868.640	39.025.331.527	85,76
2008	42.726.627.000	35.421.099.600	82,90
2009	26.381.440.310	24.639.547.866	93,40
2010	58.820.160.880	-	-
Jumlah	228.272.323.330	147.162.399.476	64,47

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang berarti. Sedikit permasalahan adalah pada proses pelaksanaan realisasi anggaran yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2009, sehingga hal tersebut sangat menghambat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada awal tahun anggaran seperti Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan lain-lain.

Solusi yang perlu diambil untuk tahun yang akan datang adalah dengan menjalin koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan.

vii. PERUMAHAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
2) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran
3) Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

b. Program Pengembangan Perumahan

1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang Perumahan ditunjukkan dengan besaran Rumah tangga pengguna air bersih yang pada tahun 2006 sebesar 19,21 % kemudian berturut-turut tahun 2007-2009 sebesar 24,61 %, 25,21% dan 28,08 % serta Rumah layak huni tahun 2009 sebesar 97,44 %.

Namun apabila ditilik dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.11. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perumahan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2006	125.000.000	124.500.000	99,60
2007	99.720.000	-	-
2008	2.785.326.827	2.560.001.230	91,91
2009	383.029.600	383.029.600	100
2010	11.408.940.676	-	-
Jumlah	14.802.017.103	3.067.530.830	20,72

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan. Hal ini karena pada tahun anggaran 2009, bidang perumahan hanya diprogramkan pada Kantor Penanggulangan Kebakaran, sedangkan di Dinas

Pekerjaan Umum (Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perumahan) tidak ada memprogramkan kegiatan di pada urusan tersebut.

viii. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
3) Pembinaan Bakti Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
4) Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda, Pemuda Pelopor
5) Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)
6) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Dalam rangka pembinaan terhadap atlit-atlit olahraga pelajar, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Prestasi.

Untuk pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai

Kartanegara dalam upaya peningkatan prestasi olahraga yang penekanannya diprioritaskan pada olahraga pelajar dilaksanakan kegiatan-kegiatan :

1) Mempersiapkan dan mengikutsertakan pada PORSENI SD/MI se Kalimantan Timur di Kabupaten Nunukan, merupakan ajang lomba tingkat SD/MI yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, dengan mempertandingkan/melombakan 7 cabor dan 5 seni, dan kontingen Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Juara Umum.
2) Mempersiapkan dan mengikutsertakan pada PORPROV se Kalimantan Timur di Kabupaten Bulungan, merupakan ajang lomba tingkat pelajar SLTP/SLTA yang diselenggarakan 2 tahun sekali dengan mempertandingkan 9 cabor dan hasil PORPROV di Bulungan ini mewakili Kalimantan Timur pada POPWIL Indonesia Timur yang dilaksanakan di Kendari Sulawesi Tenggara pada bulan Oktober 2008, dan sebanyak 14 orang atlit dari Kutai Kartanegara merupakan duta Kaltim pada even tersebut. Selanjutnya hasil dari POPWIL di Kendari telah terpilih atlit Kutai Kartanegara sebanyak 8 orang untuk mengikuti POPNAS pada bulan Juli 2009 di Yogjakarta.
3) Mempersiapkan dan mengikutsertakan pada Pekan Olahraga Sekolah Dasar (POR SD) seKalimantan Timuryang dilaksakanakandi Samarinda dan diselenggarakan setiap tahun dengan mempertandingkan 13 cabor, dan kontingen Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Juara Umum.

4) Dalam rangka pembinaan lanjutan terhadap atlit berprestasi yang terseleksi, pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Dispora telah mendirikan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) pada tahun 2007, dengan membina atlit-atlit yang berprestasi darikecamatan-kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga tahun 2008 telah terbina 25 atlit dari 5 cabang olahraga, yaitu gulat, panahan, pencak silat, atletikdan renangdengan capaian prestasi masing-masing.

b. Pemasyarakatan Olahraga

1) Melaksanakan Kutai Kartanegara Aerobic Competition 2008, serta menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi instruktur senam sehat, pelatihan senam jepen.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Dalam rangka pembinaan terhadap atlit-atlit olahraga pelajar, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium fisik olahraga sebagai pendukung fasilitas peningkatan prestasi dan fisik atlit PPLOP Kutai Kartanegara.
b. Mengadakan pendataan dan inventarisasi prasaranadansarana olahraga di Kecamatan, untuk mengetahui ketersediaansarana dan prasaranaolahraga masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan untuk pengawasan dan pengendalian

terhadap pemanfaatan asset berupa sarana dan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan saat ini masih di koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada urusan kepemudaan dan olah raga dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal khususnya untuk penyediaan Gelanggang / Balai Remaja jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 0,002%, sementara untuk penyediaan Lapangan Olah Raga pada tahun 2005 mencapai 0,47% sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan dan hanya mencapai 0,042% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

Namun jika dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kepemudaan dan Olah Raga selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	268.000.000	268.000.000	100
2006	8.612.109.510	8.573.724.400	99,55
2007	30.786.279.190	27.701.827.330	89,98
2008	24.132.376.382	10.138.237.140	42,01

2009	6.709.654.240	5.997.994.668	89,39
2010	12.828.996.382	-	-
Jumlah	83.337.415.704	52.679.783.538	63,21

3. Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya permasalahan, sebagai berikut :

1. Untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, seperti pesantren kilat, pelatihan kepemimpinan OSIS, peserta pertukaran pemuda antar propinsi, Diklat Paskibraka, dan pemilihan pemuda pelopor, belum menyebar keseluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan minimnya dana yang tersedia.
2. Untuk peserta lomba olahraga Usia Dini yang diselenggarakan setiap tahun baik di tingkat propinsi maupun secara nasional, masih diikuti oleh siswa Sekolah Dasar / MI di kecamatan-kecamatan terdekat, dikarenakan belum tersedianya dana untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut hingga ke desa-desa.
3. Beberapa event olahraga pelajar dalam rangka menseleksi / mencari bibit olahragawan yang berprestasi, hanya diikuti oleh pelajar SLTP dan SLTA terdekat, dikarenakan disamping kurangnya sosialisasi juga kegiatan tersebut waktu penyelenggaraannya kurang

tepat (bukan pada liburan sekolah). Hal ini disebabkan pencairan dana kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

4. Untuk sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, persentase jumlah gelanggang/balai remaja dan lapangan olahraga tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga nilainya menurun untuk tiap tahunnya.

Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, perlunya intensifikasi dan sosialisasi yang kontinyu pada masyarakat pemuda seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perlunya alokasi dana tambahan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan lomba tingkat propinsi maupun secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa.
3. Pencairan dana kegiatan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Beberapa event olahrga pelajar dalam rangka menseleksi / mencari bibit olahragawan yang berprestasi.
4. Dibutuhkan perhatian khusus untuk menambah jumlah gelanggang/balai remaja dan lapangan olahraga sehingga diharapkan dapat memacu masyarakat untuk giat berolahraga (membudayakan olahraga).

ix. PENANAMAN MODAL;

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2010.

Sektor Penanaman Modal memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu peranannya juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan persoalan-persoalan yang mendasar seperti pengembangan sektor-sektor strategis dan komoditas unggulan, reindustrialisasi, pemerataan pembangunan serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum memiliki Sumber Daya Alam yang sangat berlimpah, namun masih sangat kurang dalam pemanfaatannya sebagai peluang investasi khususnya untuk Sumber Daya Alam yang bisa diperbaharui *(renewable resources)* seperti sektor pertanian dalam arti luas. Selain itu untuk pengembangan kedepan potensi dan peluang investasi yang sangat prospektif adalah sektor pariwisata, sektor industry, sektor jasa serta infrastruktur.

1. Program dan Kegiatan

   Secara umum kebijakan di bidang penanaman modal ditujukan untuk meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian sehingga akan dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kutai

Kartanegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan beberapa program yang berhubungan dengan penanaman modal didaerah antara lain melalui :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan / menarik minat calon investor dalam rangka melakukan kegiatan investasi di daerah. Beberapa kegiatan promosi investasi yang dilakukan lewat berbagai bentuk media diharapkan akan mampu memberikan gambaran yang jelas kepada investor maupun calon investor dalam rangka berinvestasi di daerah. Up dating dan validitas data peluang investasi serta informasi penting lainnya tentang penanaman modal di daerah sangat dibutuhkan dan akan sangat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Untuk pencapaian program di maksud, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1) Pengembangan situs investasi lewat internet.
2) Pameran Promosi Dalam Negeri.
3) Pameran Promosi Luar Negeri.
4) Pembuatan Buku Profil dan Peluang Investasi.
5) Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Investasi Antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
6) Pembuatan CD Multimedia Interaktif Di Bidang Investasi.

7) Penyusunan Data Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
8) Seminar / Dialog Investasi.
9) Optimalisasi Pemanfaatan Berbagai Media Dalam Rangka Promosi Daerah.
10) Pelatihan Manajemen Strategi Pemasaran Peluang Investasi Daerah.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih, peningkatan kualitas pelayanan public, penyusunan arah kebijakan pembangunan dibidang investasi, pengembangan bisnis daerah, peningkatan dan pemetaan investasi, pemberdayaan seluruh stakeholder dalam pengembangan investasi dan peningkatan efektivitas dan efesiensi regulasi investasi serta pemanfaatan sumber daya yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk pencapai program dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1) Penyusunan Pra Study Sistem Informasi Manejemen Investasi Terpadu.
2) Satuan Tugas Bidang Penanaman Modal.
3) Study Komperasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Investasi.
4) Pendataan Perizinan Di Bidang Investasi.
5) Bimbingan Penyuluhan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penanaman Modal Di Daerah.
7) Evaluasi dan Pelaporan LKPM.
8) Sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal.
9) Kajian Terhadap Prosedur Sistem Perizinan Investasi Secara Komprehensif.

c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan investasi.

Untuk pencapai program dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1) Pembuatan Peralatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Promosi Investasi.
2) Inventarisasi Komoditi Andalan / Unggulan.
3) Inventarisasi Lahan Tidur / Lahan Kritis Sebagai Lahan Peluang Investasi.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2005 – 2010 pada Bidang Penanaman Modal dapat dilihat dari besaran Indek Kinerja Kunci pada Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana untuk PMDN dari total rencana investasi senilai Rp. 5.390.080.660.000,- terealisasi senilai Rp. 1.689.057.180.000,- atau sekitar 31,34 %.

Tabel 4.13. Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2005-2009

NO	TAHUN	RENCANA INVESTASI PMDN (Rp. Juta)	REALISASI INVESTASI PMDN (Rp. Juta)	PMDN %	KET
1	2	3	4	5	6
1	2005	682.200,00	24.504,60	3,60	
2	2006	481.337,06	0,00	0	
3	2007	1.017.445,00	0,00	0	
4	2008	373.604,73	214.820,18	57,50	
5	2009	2.835.493,87	1.449.732,40	51,13	
Total		**5.390.080,66**	**1.689.057,18**	**31,34**	

Sumber Data : BPPMD Provinsi Kaltim, 2010

Grafik 4.3. Grafik Rencana dan Realisasi PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009

Sedangkan untuk PMA dari total rencana investasi senilai Rp. 772.137.450.000,- terealisasi senilai Rp. 88.767.250.000,- atau sekitar 11,50 %.

Tabel 4.14. Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2005-2009

NO	TAHUN	RENCANA INVESTASI PMA (Rp. Juta)	REALISASI INVESTASI PMA (Rp. Juta)	PMA %	KET
1	2	3	4	5	6
1	2005	279.544,00	0,00	0	
2	2006	150.733,47	5.761,79	3,82	
3	2007	76.752,51	40.703,07	53,03	
4	2008	224.207,47	16.593,72	7,40	
5	2009	40.900,00	25.708,67	62,86	
Total		**772.137,45**	**88.767,25**	**11,50**	

Sumber Data : BPPMD Provinsi Kaltim, 2010

Grafik 4.4. Grafik Rencana dan Realisasi PMA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009

Sehingga total keseluruhan nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2005 – 2009 dari rencana investasi senilai Rp. 6.162.218.110.000,- terealisasi senilai Rp. 1.777.842.430.000,- atau sekitar 28,85 %

Sementara apabila ditinjau dari segi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Penanaman Modal selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.934.311.575,00	1.930.475.201,00	99,80
2006	14.269.704.075,00	13.596.520.929,00	95,28
2007	11.222.672.777,89	10.770.928.881,00	95,97
2008	16.280.486.187,00	15.241.653.498,00	93,62
2009	15.779.470.658,00	13.126.971.299,00	83,19
2010	13.396.735.013,97	-	-
Jumlah	**72.883.380.286,86**	**54.666.549.808,00**	**77,98**

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada pada urusan bidang penanaman modal diantaranya adalah :

1. Dilingkungan internal BPMPD dirasakan masih kurangnya kualitas aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi memadai untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung dinamis. Untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM aparatur lewat kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis penanaman modal, kursus-kursus kompetensi,

menyelenggarakan / mengikuti seminar investasi, workshop, study kerja, dll.

2. Tidak adanya kejelasan tugas, pokok dan fungsi antara SKPD dalam memberikan pelayanan dibidang penanaman modal. Baik mulai dari tahap perencanaan, melakukan promosi, perizinan dan pengawasan penanaman modal karena masih adanya ego sektoral. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan penanaman modal terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan dibidang penanaman modal.
3. Kurangnya data berupa kajian / feasibility study terhadap proyek-proyek penanaman modal, sehingga sulit untuk menawarkan kepada pihak investor. Untuk mengatasi permasalahan ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan inventarisir data potensi dan peluang investasi serta menyusun study kelayakan terhadap proyek-proyek investasi.
4. Masih kurangnya koordinasi antara lembaga terkait pengembangan bidang penanaman modal. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi antar lembaga yang terkait bidang penanaman modal.

4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

   Secara umum rencana minat investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2005 – 2010 sangat tinggi. Namun pada tahap realisasinya masih sangat rendah. Namun demikian pada tahun 2009 Kabupaten Kutai Kartanegara

tercatat sebagai Kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai investasi di Kalimantan Timur dengan realisasi investasi senilai Rp. 1.449.732.400.000,- untuk PMDN dan Rp. 25.708.670.000,- untuk PMA sehingga total realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp. 1.475.441.070.000,-.

Untuk prestasi ini pada tahun 2009 Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai Terbaik III daerah Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur atas keberhasilan pembangunan di bidang penanaman modal.

Sebelumnya pada tahun 2007, Kabupaten Kutai Kartanegara lewat Badan Penanaman Modal telah dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan "International Training Workshop" tentang mekanisme penyelesaian permasalahan di bidang investasi bekerja sama dengan UNCTAD-PBB, NAM-CSSTC dan Departemen Luar Negeri RI yang diikuti oleh sekitar 17 negara.

Kemudian sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan yang ada khusunya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka seyogyanya Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.

x. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH;

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, UKM berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Namun, dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDRB dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk manufaktur, peran UKM masih relatif rendah. Salah satu fakta dari cukup banyak studi-studi empiris hingga saat ini yang mungkin bisa menjawabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu dalam rangka peningkatan peranan UKM, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu tahun 2005-2010 melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan
   a. **Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif**
      1) Pemberdayaan Usaha Koperasi

   b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
      1) Pengembangan Pusat Informasi dan Bisnis KUKM

   c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
      1) Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi
      2) Pemantapan Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam

3) Bantuan Kepada Koperasi dan UKM

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1) Pemeberdayaan Usaha Kecil Pedesaan
2) Operasional Lembaga Perkreditan Desa
3) Pelatihan AMT bagi Usaha IK dan Pemuda
4) Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan IKM

e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1) Bimbingan Teknis Pengembangan Produksi Kerajinan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memacu perkembangan dan pertumbuhan wirausaha melalui pengembangan Koperasi dan UKM pada tahun 2009 belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut terlihat dari indikator koperasi aktif sebesar 39,80% dan Usaha Mikro dan Kecil yang hanya sebesar 4,11%.

Namun demikian apabila ditinjau berdasarkan imlementasi program dan kegiatan dapat dilihat dari realisasi pelaksanaannya yaitu :

Tabel 4.16. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Koperasi dan UKM selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.193.000.000	1.145.300.000	96,00
2006	83.490.260.170	81.421.531.145	97,52
2007	18.541.135.300	505.530.100	2,73
2008	12.236.604.673	4.813.209.290	39,33
2009	2.588.757.000	2.078.187.950	80,28
2010	10.057.211.250	-	-
Jumlah	128.106.968.393	89.963.758.485	70,23

3. Permasalahan dan Solusi

   Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2009, tidak ada permasalahan yang berarti untuk bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

xi. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

Sejak dicanangkannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat dalam berbagai bidang, utamanya adalah bidang pelayanan publik yaitu salah satunya adalah pelayanan di bidang kependudukan.

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
2) Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
3) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
4) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
5) Pengembangan Data Base Kependudukan
6) Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
7) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
8) Tertib Hukum dan Sanksi Administrasi Kependudukan
9) Razia Kartu Tanda Penduduk
10) Pengawasan WNA
11) Pembuatan Akta Catatan Sipil
12) Pembinaan Administrasi Catatan Sipil
13) Penyajian Informasi dan Publikasi Data Kependudukan dan Catatan Sipil
14) Penataan dan Pemeliharaan Arsip Data Akta Capil dan Penduduk
15) Monitoring Pemutakhiran Data Penduduk

b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 untuk bidang kependudukan dan catatan sipil ditandai dengan telah diterapkannya KTP berbasis nasional, jumlah penduduk ber-KTP sebesar pada tahun 2005 sebesar 70,04% sedangkan tahun 2009 mencapai 77,37 % dan penduduk yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2005 mencapai 15,03% sedangkan tahun 2009 sebesar 19,24%.

Grafik 4.5. **Kepemilikan KTP penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2009**

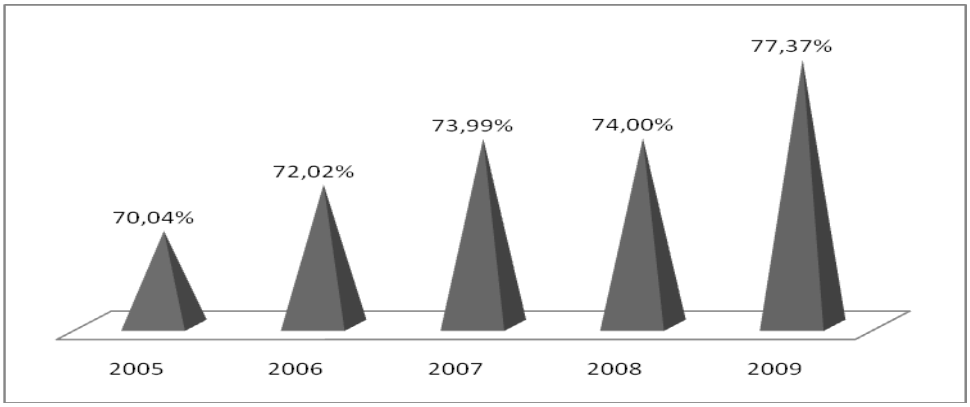

Grafik 4.6. **Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk tahun 2005-2009**

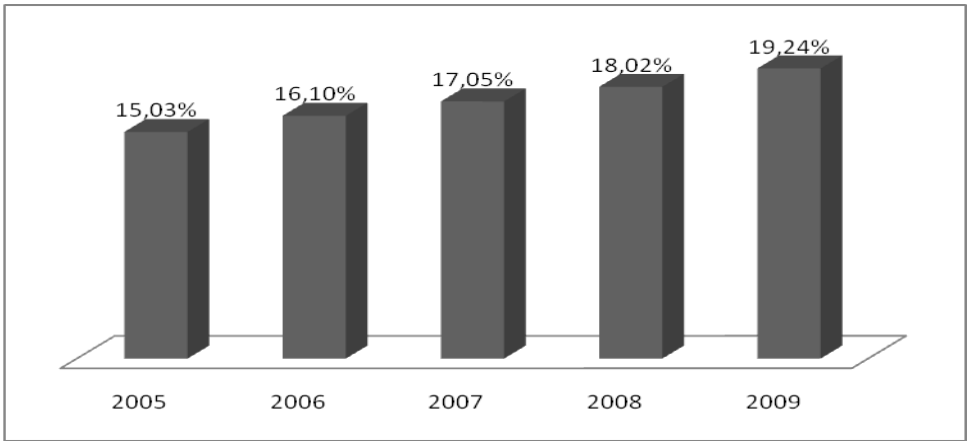

Sementara jika ditilik dari sisi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.17. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kependudukan dan Catatan Sipil selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.762.400.000	762.400.000	43,26
2006	4.765.498.975	4.704.357.375	98,72
2007	4.709.348.320	2.457.189.620	52,18
2008	7.269.000.000	6.901.013.022	94,94
2009	7.354.109.500	6.412.140.580	87,19
2010	10.479.108.764	-	-
Jumlah	36.339.465.559	21.237.100.597	58,44

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Selama ini dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat adanya hambatan mengenai operasional pelayanan publik yang berada di 18 Kecamatan.

Solusi :

- Untuk mengatasi permasalahan yang ada perlu adanya koordinasi antar Instansi terkait.

xii. KETENAGAKERJAAN;

Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah di bidang ketenagakerjaan saat ini adalah meningkatnya pengangguran terbuka. Selain pengangguran terbuka, permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan dewasa ini adalah menyangkut kualitas pekerjaan. Bahkan permasalahan dalam hal kualitas pekerjaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pengangguran terbuka. Kenaikan penduduk yang bekerja sejak krisis lebih banyak terjadi di kegiatan informal, sehingga tidak akan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Seiring membaiknya tingkat pendidikan angkatan kerja di masa yang akan datang, mengakibatkan kebutuhan kesempatan kerja di kegiatan formal akan semakin besar. Ketidakmampuan untuk menciptakan kesempatan kerja di kegiatan formal akan berdampak pada meningkatnya pengangguran terdidik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

      Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan system pengembangan SDM. Adapun untuk

mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
2) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
3) Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Latihan Swasta
4) Pelatihan pengembangan motivasi berprestasi (AMT)
5) Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja
6) Pelatihan Keterampilan Bagi Orang Tua Pekerja Anak

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di pedesaan maupun di perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1) Pelatihan/ Penerapan Pengambangan Teknologi Tepat Guna
2) Pembekalan dan Pembinaan Petugas Pengantar Kerja
3) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tujuan program ini adalah untuk menciptakan suasana hubungan kerja harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini selama kurun waktu lima tahun secara garis besar adalah :

1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang syarat-syarat kerja
3) Pengumpulan data KHL untuk penetapan UMK dan UMSK
4) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang serikat pekerja/ serikat buruh
5) Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
6) Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja
7) Pembinaan dan Pengawasan Higiene Perusahaan
8) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Di bidang ketenagakerjaan Pada tahun 2009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,15% dari Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun) sebanyak 353.419 orang. Hal ini menandakan adanya peningkatan dari tahun 2005 sebesar 62,68% dengan Pencari Kerja yang ditempatkan pada tahun 2009 sebesar 21,33% dari jumlah pencari kerja

yang mendaftar sebanyak 11.322. Memang jumlah pencari kerja yang ditempatkan ini masih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena di tahun 2009 jumlah pencari kerja yang mendaftar naik secara signifikan yaitu sebesar 11.322 orang dibandingkan pada tahun 2005 yang hanya sebesar 5.176 orang sehingga ini menimbulkan kesenjangan yang amat cukup besar. Namun dari potensi masalh itu Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya untuk memberikan stimulant-stimulan terhadap pencari kerja yang belum terserap tersebut lewat berbagai program dan kegiatan yang dilakukan selama 5 tahun terakhir. Yang mana upaya tersebut dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan dibawah ini :

Tabel 4.18. Capain kinerja bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009.

Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,68%	62,88%	63,26%	63,56%	65,15%
Pencari Kerja yang ditempatkan	33,02%	93,46%	59,38%	68,52%	21,33%

Namun demikian apabila dilihat dari segi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran 2009 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.19. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Ketenagakerjaan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.102.800.000	1.102.800.000	100
2006	6.616.925.000	4.689.555.120	70,87
2007	3.543.429.200	3.380.229.200	95,39
2008	4.980.000.000	2.453.468.500	49,27
2009	3.372.132.300	2.935.491.200	87,05
2010	8.442.976.241	-	-
Jumlah	28.058.262.741	14.561.544.020	51,90

3. Permasalahan dan Solusi

Upaya-upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah utama daerah, maka perlu terus digalakkan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada penciptaan lapangan kerja praktis dan penuh kemandirian sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja yang terbatas disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Seperti pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.

Perlu adanya pemberian bantuan dana modal usaha bagi 950 orang pencari kerja atau tenaga pengagur yang telah dilatih agar dapat mengembangkan usaha mandiri mereka.

4. Hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan

   Keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang ketenagakerjaan ditandai dengan perolehan penghargaan :

   1) Zona Bebas Pekerja Anak Tahun 2007,
   2) Keselamatan Kerja Pemerintah Propinsi Tahun 2007 serta
   3) Panji-Panji keberhasilan pembangunan bidang Ketenagakerjaan / kesempatan kerja / penanggulangan pengangguran sebagai terbaik I di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan penyerahan tropi dan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faerok Ishak usai apel dalam rangka memperingati HUT Kaltim ke-53 di halaman Gor Sempaja Samarinda.

xiii. KETAHANAN PANGAN;

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem, yaitu (a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; (b) distribusi pangan yang lancar dan mengakses pada masyarakat; dan (c) konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, serta memenuhi kaidah kesehatan.

Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap maka pelaksanaan program tetap memperhatikan penerapan kebijakan PANCAYASA yang fokus pada lima fundamental penanganan pertanian: (1) pembangunan/ perbaikan infrastuktur perbenihan, riset, dan sebagainya; (2) penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; (3) perbaikan

penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluhan; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; serta (5) penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani. Selain mengacu kepada PANCAYASA, pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan yang dikoordinasikan Badan Ketahanan Pangan tahun 2009, juga mengacu dan berbasis kepada kegiatan utama Departemen Pertanian.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.
2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.
3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
4) Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani.
5) PRA PENAS Ke XIII Tahun 2011

b. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
3) Pengembangan Desa Mandiri Pangan
4) Pengembangan Lumbung Pangan Desa
5) Pengembangan Sistem Informasi Pasar
6) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
7) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya
8) Pendampingan Kegiatan Dana Talangan DPM LUEP

9) Pameran Ketahanan Pangan

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
2) Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

1) Penelitian dan Pengembanan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
2) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keberhasilan dalam bidang Ketahanan Pangan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009

ditunjukkan dengan ketersediaan pangan utama rata-rata sebesar 180 kg/jumlah penduduk per tahun.

Tabel 4.20. Ketersediaan pangan utama (beras siap konsumsi) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2006-2009.

Uraian	Ketersediaan Beras Siap konsumsi (ton)			
	2006	2007	2008	2009
Kebutuhan	62.504,51	62.755,30	62.755,30	67.904,43
Ketersediaan	107.121,99	90.578,59	90.578,59	101.979,97
%	171,38	144,34	144,34	150,18
+/-	44.617,47	27.823,29	27.823,29	34.075,54

Kebutuhan beras siap konsumsi 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan, dibandingkan kebutuhan terjadi kelebihan beras rata-rata 33.584,89 ton per tahun hal ini disebabkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu lumbung beras Propinsi Kaltim.

Sementara jika dilihat dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.21. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Ketahanan Pangan selama Tahun 2007-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2007	11.277.640.440	5.386.414.553	47,76

2008	4.538.597.625	2.954.967.750	65,11
2009	3.585.508.000	3.231.966.000	90,14
2010	27.329.635.132	-	-
Jumlah	46.731.381.197	11.573.348.303	24,77

3. Permasalahan dan Solusi

   Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2009 untuk urusan ketahanan pangan tidak mengalami permasalahan yang berarti, hanya yang menjadi sedikit hambatan adalah pada proses pencairan keuangan yang terlambat membuat pelaksanaan program dan kegiatan juga mengalami keterterlambatan.

4. Hal-hal yang perlu untuk dilaporkan

   Sasaran makro (outcomes) pemantapan ketahanan pangan Tahun 2009 meliputi :

   1) Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya 1 persen per tahun, dengan meningkatkan kemandirian pangan dan akses pangan di tingkat Rumah Tangga (RT).
   2) Dipertahankannya ketersediaan energy minimal 3.035 kkal/capita/hari dan penyediaan protein minimal 80 gr/capita/hari.
   3) Meningkatnya kemampuan setiap penduduk untuk mengkonsumsi pangan dalam memenuhi kecukupan energy minimal 2.025 kkal/kapita/hari dan protein 57 gr/kapita/hari.
   4) Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PHH)/ Mutu Konsumsi Pangan sebesar 85.
   5) Meningkatnya peran kelembagaan ketahanan pangan dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

xiv. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;

Kebijakan nasional di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan, menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan sistem pendataan, dan koordinasi. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dimulai tahun 2009 akan dilanjutkan dan secara bertahap seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah harus menerapkannya. Kesemuanya ini adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

   Kegiagaiatn yang dilaksanakan berupa Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

   Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT

   c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

   1) Pembinaan Organisasi Perempuan
   2) Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

3) Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penguatan kelembagaan dilakukan berupa memberikan fasilitasi, penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, Pusat Studi Wanita (PSW), Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga non Pemerintah skala kabupaten, dengan kegiatan :

1) Peningkatan Kapasitas & Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
3) Pengembangan Materi & Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan & Keadilan Gender (KKG)
4) PKK Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan akan jika dilihat berdasarkan indikator kinerja kunci cukup memuaskan, hal ini terlihat dari Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 96,68% dengan partisipasi angkatan kerja mencapai 95,07%.

Demikian juga apabila dilihat dari capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.22. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2007	1.330.000.000	822.576.500	61,85
2008	3.750.000.000	2.787.782.950	74,34
2009	3.384.130.500	3.336.615.000	98,60
2010	6.257.186.169	-	-
Jumlah	14.721.316.669	6.946.974.450	47,19

3. Permasalahan dan Solusi

   Sebagai SKPD yang baru, maka dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak masih belum dapat berjalan secara maksimal, disamping itu permasalahan yang klasik terjadi adalah adanya keterlambatan proses pencairan dana yang baru bisa dilaksanakan pada bulan Juni 2009.

xv. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA;

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Keluarga Berencana

      1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
      2) Pembinaan Keluarga Berencana
      3) Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

4) Penyuluhan dan Pelayanan Kontrasepsi
5) Pembinaan Pelajar dan Mahasiswa Peduli KB
6) Peningkatan Kinerja Pelayanan KB
7) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera
8) Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009
9) Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009
10) Pelayanan KB Gratis Bagi Masyarakat Miskin
11) Pendataan Keluarga Sejahtera

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tingkat keberhasilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masih dapat dikatakan berhasil untuk ukuran suatu daerah dengan kondisi wilayah yang sangat luas dan persebaran penduduk yang masih belum merata. Hal ini terlihat dari prevalensi peserta KB aktif yang pada tahun 2006 berada pada kisaran 32,33 %, kemudian pada tahun 2007 sebesar 37,22 % dan tahun 2008 sebesar 40,06 %.

Sementara apabila ditinjau dari realisasi serapan dana untuk bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2005-2010 adalah sbb :

Tabel 4.23. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2007	1.159.050.000	978.394.000	84,41

2008	2.850.000.000	1.341.499.000	47,07
2009	2.914.837.497	2.815.863.556	96,60
2010	5.250.000.000	-	-
Jumlah	12.173.887.497	5.135.756.556	42,19

3. Permasalahan dan Solusi

   Sebagian kegiatan yang dikelola untuk bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan hibah / pergeseran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya agak dipaksakan. Selain itu pengalokasian dana tersebut masih relatif sangat minim.

   Untuk mengatasi persoalan yang ada, maka diharapkan pada tahun anggaran 2010 dapat dialokasikan dana yang lebih besar untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

xvi. PERHUBUNGAN;

Kelancaran transportasi disuatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Transportasi utamannya yang dapat menjangkau sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah transportasi darat dan transportasi air, transportasi darat merupakan transportasi pital bagi sebagian kecil kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena masih banyak wilayah di Kabupaten kutai Kartanegara yang belum terjangkau oleh

fasilitas transportasi darat dan sebagiannya dijangkau oleh fasilitas transportasi air.

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan, Bentuk elmen yang terkait dalam sistem transportasi baik sarana dan prasarana maupun penggerakan antara lain adalah kelaikan, demografi dan lain–lain.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai kartanegara dewasa ini sangat ditentukan oleh perana sektor transportasi. Karena sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola ditribusi regional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

1. Program dan Kegiatan

   Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) Dimas Perhubungan tahun 2005–2010, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dengan menguraikan arah kebijaksanaan Dinas Perhubungan serta pengelolaan keuangan dinas secara makro, termasuk pembiayaan pembangunan prasarana transportasi dan belanja langsung atau tidak langsung dinas lainnya, dalam penyelenggaraan Tugas Pemerintahan secara umum dan urusan wajib Pemerintahan bidang Perhubungan.

Dan dalam hal tersebut di atas, Dinas Perhubungan menjalankan strategi dan Kebijakan serta prioritas pembangunan bidang Perhubungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat terutama pengusaha jasa transportasi dalam memberikan penyelenggaraan pelayanan transportasi secara maksimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi yang berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk menggambarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan bidang Perhubungan yang berada pada saat ini dimana penyelengaraan transportasi yang tertib, lancar, aman dan nyaman serta biaya terjangkau sangat dibutuhkan sesuai dengan dinamika di masyarakat. Kondisi demikian, sangat berpengaruh terhadap peranserta masyarakat dalam menyelenggara dan mengembangkan transportasi yang tertib, lancar, aman dan nyaman sebagaimana amanat Undang–Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peranserta semua pihak sangatlah dibutuhkan.

Sebagai mana tindak lanjut dari amanat dimaksud, dan sesuai dengan peraturan perundang–undangan, maka

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan berbagai program pembangunan bidang perhubungan baik secara kuantitas maupun secara kualitas antara lain sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dalam mewujudkan transportasi yang tertib, lancar, aman dan nyaman sejalan dengan amanat Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bisa bekerja dengan sendirinya melaikan melibatkan peranserta masyarakat dan kerjasama antara instansi terkait, dalam kegiatan semacam ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan skala prioritas pembanunan antara lain sebagai berikut :

1) Perencanaan pembangunan prasarana fasilitas Perhubungan;
2) Pembangunan terminal;
3) Pembangunan pelabuhan / dermaga;
4) Pembangunan stop over;
5) Pembangunan tanggul pemecah gelombang;
6) Pengadaan rambu–rambu lalu lintas darat dan sungai;
7) Pengadaan trafig light & warning light;
8) Pengadaan guard rail & deliniator;
9) Penyusunan feasibility study (FS) pelabuhan Kota Bangun;
10) Pembebasan lahan untuk jembatan timbang;

b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah

1) Pembebasan Tanah Untuk Jembatan Timbang Seluas ± 1,5 Ha di Kecamatan Kota Bangun
2) Pembebasan Lahan Pelabuhan di Kuala Samboja

c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
3) Perawatan/Kalibrasi Alat Uji Kendaraan
4) Perawatan Fasilitas Lalu Lintas

d. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

1) Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
2) Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4) Pengerukan alur sungai mahakam se Kab. Kukar (Subsidi Prop 2008)/ Lanjutan
5) Pengadaan dan Pemasangan sarana dan prasarana Fasilitas Lalin Jalan (lanjutan)

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1) Pembangunan Lokasi Parkir Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

2) Pembangnan Pelabuhan Desa dan Pelabuhan Penyeberangan di Kecamatan
3) Pembangunan Dermaga Muara Jawa
4) Pembuatan Dermaga Terapung / Ponton
5) Rehab Pelabuhan Pasir di Loa Janan Ulu (Depan Gg. Kutai)

f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1) Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
2) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Kutai Lama

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum terdapat fasilitas terminal sebanyak 6 (enam) buah, baik berupa terminal angkutan dalam kota maupun angkutan antar kota dengan Terminal Timbau sebagai terminal induk, namun demikian dari beberapa terminal tersebut belum berfungsi secara maksimal yang disebabkan oleh kondisi yang belum membadai dan terbatasnya fasilitas yang ada.

Adapun tingkat pencapaian estándar pelayanan minimal / realisasi pelaksanaan program dan kegiatan atau indikator SPM sesuai dengan idikator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24. Perbandingan jumlah angkutan darat dengan banyaknya penumpang tahun 2005-2010.

Tahun	Jml Angkutan Darat	Jml Penumpang	%
2005	223	615.916	0,036
2006	223	497.479	0,045
2007	223	253.640	0,088
2008	223	250.005	0,089
2009	223	1.250.276	0,018
2010	223	225.344	0,099

Keberhasilan lainnya dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.25. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perhubungan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	5.781.661.210	1.189.047.000	20,57
2006	14.571.661.210	5.895.835.272	40,46
2007	28.879.872.716	13.955.832.554	48,32
2008	59.872.441.251	34.050.246.227	56,87
2009	157.632.903.389	123.834.403.247	78,56
2010	126.570.928.414	-	-
Jumlah	393.309.468.190	178.925.364.300	45,49

3. Permasalahan dan Solusi

Tingginya arus lalu lintas pengguna jalan serta pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat diindikasikan bahwa perkembangan sarana transportasi jalan di daerah ini meningkat, hal ini

dapat digambarkan dengan hasil survey volume lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan semana 3 (tiga) hari berturut–turut dari tanggal 4 s/d 6 Desember 2007 dari jam 07.ºº s/d 16.ºº wita, jumlah kendaraan bermotor roda 4 (empat) keatas dan roda 2 (dua) yang keluar dan masuk Kota Tenggarong yang melintas Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara sebanyak : yang keluar 14.372 unit dan yang masuk sebayak 15.486 unit.

Selanjutnya dalam rangka keamanan berlalu lintas dijalan, maka pada ruas jalan secara bertahab telah dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas berupa rambu–rambu sebanyak 3.005 buah, marka median 259.977 meter, tempat penyeberangan 43 buah lampu pengatur lalu lintas 3 unit, tempat parkir 7 (tujuh) lokasi, delineator 555 buah, guardrail 239 meter, paku marka 1.600 buah.

Dalam rangka keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum terdapat fasilitas terminal sebanyak 6 (enam) buah, baik berupa terminal angkutan dalam kota maupun angkutan antar kota dengan terminal Timbau sebagai terminal induk, namun demikian dari beberapa terminal tersebut belum berfungsi secara maksimal yang disebabkan oleh kondisi yang belum membadai dan terbatasnya fasilitas yang ada.

Sementara untuk wilayah Kutai Ulu (WPT III) dibangun pelabuhan terpadu dan satu buah terminal angkutan darat di Kota Bangun, untuk wilayah Tengah (WPT II) terdapat di

Tenggarong yang berfungsi sebagai terminal induk, sedangkan wilayah Pantai (WPT I) terdapat di Muara Jawa, sedangkan lainnya merupakan terminal desa di Tenggarong. Terminal ini berfungsi melayani banyak angkutan desa dan angkutan kota.

Sedangkan penunjang kelancaran trasportasi darat maka dikabupaten Kutai Kartanegara terdapat panjang jalan 1.443.635 Km terdiri dari jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Berdasarkan kewilayahannya maka wilayah Kutai Ulu sangat minim memiliki transportasi darat berupa prasarana jalan, sedamgkan untuk Kutai Tengah dan Kutai Pantai pada umumnya sudah terhubungkan oleh prasarana jalan darat.

a. Permasalahan :

- Transportasi umum belum mampu menunjang keseluruh daerah masih 5 (lima) Kecamatan 27,78 % yang belum terlayani untuk trasportasi darat;
- Kurangnya fasilitas terminal serta belum membadainya sarana terminal yang ada sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya;
- Masih relatif tingginya kerawanan kecelakaan lalu lintas dijalan Kabupaten kutai Kartanegara dikarenakan :
- Masih adanya fasilitas prasarana jalan berupa rambu lalu lintas rusak dan hilang ;

- Prasarana jalan yang belum membadai sehingga sangat mempengaruhi kelancaran sarana transportasi darat;
- Kurangnya personil dilapangan sehingga seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas jalan;
- Kurangnya sarana mobilitas oprasional / Wasdal;

b. Solusi :

Transportasi darat memiliki fleksibelitas yang tinggi dibanding yang lainnya, oleh karenannya bidang darat harus mendapatkan perhatian agar mobilitas masyarakat semakin lancar, untuk ini perlu peningkatan sarana prasarana transportasi secara kualitas maupun kuantitas serta perlunya kampanye dan sosialisasi atau penjuluhan ketertiban lalu lintas angkutan yang berkesinambungan.

xvii. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2) Pengembangan Konten Video Profil
3) Pendampingan / Asistensi Aplikasi SIMDA
4) Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan
5) Sosialisasi Elektronik Procurement
6) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP)

b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
2) Pelatihan Indonesia Go Open Source (IGOS)
3) Pelatihan Administrator SIMDA Keuangan

c. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3) Pengembangan Website www.kutaikartanegarakab.go.id
4) Pelaksanaan Pameran Pembangunan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak lepas dari adanya kepedulian pemerintah daerah dengan penyediaan dan pemasangan infrastruktur jaringan dari tingkat kabupaten sampai ke kecamatan, sehingga akses informasi masyarakat relatif sudah lebih baik di banding beberapa tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya website pemerintah kabupaten, maka akses informasi bagi masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur sangat terbuka luas.

Demikian juga apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diuraikan antara lain :

Tabel 4.26. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	17.500.000.000	17.500.000.000	100
2006	109.358.714.414	101.575.346.475	92,88
2007	26.810.817.704	21.494.549.192	80,17
2008	11.804.878.807	5.501.053.453	46,60
2009	3.410.008.605	3.168.456.527	92,92
2010	12.979.128.364	-	-
Jumlah	181.863.547.894	149.239.405.647	82,06

3. Permasalahan dan Solusi

   Tidak ada permasalahan selama tahun anggaran 2009

xviii. PERTANAHAN;

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

      1) Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah

   b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

      1) Pembebasan (Ganti Rugi) Lokasi Bangunan SD Bendang Raya Seluas ± 14.040 M^2 di Kec. Muara Badak kab. Kukar

2) Pembebasan Lahan Kec. Muara Muntai dan Loa Janan
3) Pembebasan Lahan Kec. Muara Badak
4) Pengurukan Tanah di Madrasah Al-Idrus Kec. Tenggarong
5) Pengadaan Lahan Lokasi Pembelajaran Lingkungan Alam dan Education Center
6) Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Gedung SMP 1 Fillial Rempanga Kec. Loa Kulu
7) Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah untuk SD Kec. Tenggarong dan Loa Janan
8) Pembebasan Lahan untuk Pasar Kec. Muara Badak
9) Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh Bangunan dan Benda-benda lainnya yang Terkena Pembebasan lahan untuk peningkatan ruas jalan jam bentong ke pal lima Tenggarong
10) Pengurukan pengembalian batas dan petas situasi lahan Korpri 50 Ha Tahun 1997 dan perluasan lahan Korpri untuk areal buffer 4,25 Ha Tahun 2009
11) Pembebasan Tanah Untuk Jembatan Timbang Seluas ± 1,5 Ha di Kecamatan Kota Bangun
12) Pembebasan Lahan Pelabuhan di Kuala Samboja
13) Pembebasan Lahan Tanam Tumbuh Bangunan dan Benda-benda Lainnya yang Terkena di Pembebasan Lahan di Kecamatan
14) Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang
15) Monitoring Ijin Lokasi dan Evaluasi
16) Pengelolaan Penerbitan SK Ijin Lokasi Daerah

17) Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepetingan Umum
18) Pembuatan Data Pokok Pertanahan Daerah
19) Pembahaharuan dan Pemeliharaan Data dan Peta Tata Guna Tanah dan Tata Ruang serta Pelaksanaan Survey Tata Guna Tanah
20) Pembinaan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)
21) Pembebasan Lahan, Tanam Tumbuh Bangunan dan Benda-benda lainnya yang terkena di Pembebasan Lahan di Kecamatan
22) Pembebasan Tanah untuk Pemakaman Umum Muslimin di Kelurahan Loa. Ipuh Kec. Tenggarong dan Pembebasan
23) Pembebasan Lahan / Tanah untuk Jalan Masuk Stadion, Lokasi Makam dan Lokasi Pemukiman/ Ujung Jembatan
24) Pembebasan Lahan Ktr Kades/BPD Gas Alam, Kantor Kades/BPD Desa Batu-Batu Kec Muara Badak, Fasum Sekolah di Kec. Ma. Badak, Sumur Bor PDAM di Sanga-Sanga
25) Ganti Rugi Lapangan Sepak Bola Marang Kayu dan Lokasi SDN 001 110x90m, 60x90m
26) Pembebasan Tanah dan Sertifikasi utk Pembangunanan Sekolah di Ds Semayang
27) Pembebasan dan Sertifikasi Tanah Untuk Bangunanan Gedung Kantor Polsek kec. Kenohan
28) Pembebasan Tanah Untuk KUA Kec. Kenohan
29) Pembebasan lahan untuk korban warga Kembang Janggut

30) Pembebasan Lahan untuk Kantor Cab. Dinas Pertanian
31) Ganti Rugi Bangunanan yang Terkena Turap Beton (Muara Kaman ilir)
32) Pembebasan Lahan Situs Sejarah Ma. Kaman Ulu
33) Pembebasan Lahan Stadion Mini Muara Jawa
34) Pembebasan Lahan Wisata Pantai Pengempang Desa Tanjung Limau seluas 8 Ha di Kec Muara Badak
35) Pembebasan lahan Pembangunan Gedung pendidikan Rt. 7 Ma Badak Ulu
36) Pembebasan Lahan Pasar Desa Badak Baru Kec. Ma Badak
37) Pembebasan Tanah Kantor Camat Tenggarong
38) Pengelolaan Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi
39) Pembebasan Lahan, Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Tersebar di Empat Kecamatan
40) Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran Seluas ± 5 Ha di Kecamatan Anggana Bangunan Pemerintahan di Kec. Kenohan, Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Kec.Muara Wis, Pembebasan Untuk Rumah Dinas Kec. Loa Janan
41) Pembebasan Tanah Untuk Musholla Rt. 21 Kec. Muara Jawa, TK Al-Qur'an, LPM, Lahan Sekolah Kec.Muara Muntai, Masjid Ukhuwah Desa Muara Badak Ulu Kec, Muara Badak
42) Pembebasan Lahan Untuk Perluasan Rumah Dinas Pemda di Jalan Wolter Monginsidi Seluas 6.893 M^2

43) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Tenggarong sebanyak 11 Lokasi
44) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Tenggarong Seberang sebanyak 13 Lokasi
45) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan
46) Pembebasan lahan untuk Lapangan Sepak Bola Kec. Loa Kulu
47) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Loa Janan sebanyak 10 Lokasi
48) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Badak sebanyak 7 Lokasi
49) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Badak sebanyak 9 Lokasi
50) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Kayu sebanyak 21 Lokasi
51) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Jawa sebanyak 4 Lokasi
52) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Samboja sebanyak 8 Lokasi

53) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Sebulu sebanyak 5 Lokasi
54) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Kaman sebanyak 12 Lokasi
55) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 10 Lokasi
56) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) Di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 8 Lokasi
57) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma.Muntai sebanyak 10 Lokasi
58) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Kenohan sebanyak 2 Lokasi
59) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Kembang Janggut sebanyak 13 Lokasi
60) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Tabang sebanyak 7 Lokasi
61) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Wis sebanyak 3 Lokasi
62) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Anggana sebanyak 2 Lokasi

63) Pembebasan Lahan untuk Kantor Cabang Dinas Pertanian Kac. Loa Janan

c. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Masalah Tanah di Luar Pengadilan

d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1) Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
2) Inventarisasi Tanah Garapan / Tanah Negara

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja pemerintah daerah dalam bidang pertanahan ditunjukkan dengan besaran luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian ijin lokasi. Untuk tahun 2009 capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai .... %

Sementara apabila ditinjau berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.27. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pertanahan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	600.000.000	-	-
2006	3.535.500.000	2.802.310.377	79,26
2007	75.835.683.546	1.641.135.190	2,16

2008	81.423.219.285	10.647.505.278	13,08
2009	78.814.596.016	8.152.433.762	10,34
2010	44.293.103.631	-	-
Jumlah	284.502.102.478	23.243.384.607	8,17

3. Permasalahan dan Solusi

   Rendahnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanahan disebabkan oleh pergeseran anggaran untuk pembebasan lahan pada APBD Perubahan 2009 dari Bagian Perlengkapan ke Dinas Teknis dan Kecamatan, sehingga tidak cukup waktu untuk proses pembebasan lahan tersebut.

   Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah dengan mengalokasikan kembali pada APBD 2010 untuk pembebasan lahan yang dikelola oleh Dinas Teknis.

xix. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI;

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar sektor yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, ketertiban yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan dewasa ini.

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.263 KM^2 dan secara administratif dibagi 18 Kecamatan, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 227 dan jumlah

penduduk 579.596 jiwa *(menurut hasil suseda 2009)*. Selain itu di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beraneka ragam suku penduduk baik yang asli maupun pendatang antara lain : Kutai, Dayak Benuaq, Dayak Bahau, Dayak Tunjung, Dayak Modang, Dayah Kenyah, Bugis, Banjar, Jawa, Bali, Madura , Batak dan lain-lain.

Sejalan dengan pertumbuhan pembangunan dengan kondisi daerah yang baru berkembang sejalan dengan Otonomi Daerah dan perubahan sistem politik di daerah yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung yang perlu adanya pendidikan politik masyarakat yang lebih ditingkatkan sehingga diharapkan meningkatnya peran/partisipasi masyarakat dalam berpolitik di daerah.

Dari kondisi yang demikian, maka banyak menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat, baik yang disebabkan oleh hubungan antar masyarakat, eskses dari pembangunan maupun yang disebabkan oleh situasi politik yang terjadi ketika adanya pesta demokrasi baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah.

Jika hal ini tidak dikendalikan secara baik (manage) akan menganggu stabilitas daerah. Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan, maka peranan Badan Kesbangpol dan linmas perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga, Pembauran Bangsa, dan Ketahanan Bangsa, perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi demokratisasi Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan

Masyarakat, dalam upaya menciptakan dan mewujudkan keamanan, dan ketertiban masyarakat Kutai Kartanegara.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta memfasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan.
2) Peningkatan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
3) sosialisasi Pementapan ketahanan bangsa dengan sasaran meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari dis-integarasi bangsa dan sebagai indikator kinerja diharapkan berkurangnya intensitas konflik di masyarakat.
4) Sosialisasi Permendagri No. 8 dan 9 tahun 2006 dan Pemendagri 12 Tahun 2006 menitikberatkan kepada kewaspadaan dini masyarakat di daerah.
5) Pendidikan dan pelatihan Non Formal Diteksi Dini Kondisi Daerah dengan harapan tersedianya SDM Intelejen daerah.
6) Mengadakan Riset dan Survei tentang Nilai-nilai.
7) Mengadakan pemantauan terhadap Warga Negara Asing (WNA), TKA dan NGO.
8) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta memfasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan
9) Peningkatan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sosialisasi Pementapan ketahanan bangsa.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1) Pengerahan dan kesiapsiagaan anggota linmas sehingga terciptanya ketentaraman masyarakat.

2) Mengadakan pemutakhiran data anggota linmas di seluruh kecamatan di kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja terdatanya seluruh anggota Linmas seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat diketahui jumlah kekuatan satuan linmas yang dapat dikerahkan dalam PAM Pemilu maupun penanggulangan Bencana.

3) Mengadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) anggota Linmas dalam PAM Pemilu dengan terlaksananya pelatihan sehingga meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam PAM Pemilu.

4) Mengadakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anggota linmas dengan indikator kinerja meningkatnya kesejahteraan sehingga termotivasinya anggota linmas dalam menjalankan tugas.

5) Mengadakan Latihan Dasar satuan linmas dengan tujuan terbentuknya linmas yang handal dalam penanggulangan bencana.

6) Memfasilitasi Anggota Linmas dalam rangka PAM Pemilu dengan indikator tugas dalam membantu PAM Pemilu sehingga terciptanya situasi yang aman dalam pelaksanaan Pemilu.

7) Pengerahan satuan linmas dalam pengamanan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009 dengan indikator

tugas dalam membantu PAM Presiden dan Wakil Presiden sehingga terciptanya situasi yang aman dan lancar dalam pelaksanaan Pilpres 2009

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Badan Kesbangpol dan linmas membuat Peta Politik yang menggambarkan potensi dan kekuatan politik di daerah dan pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan :

1) Mengadakan Koordinasi Forum-forum diskusi politik masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemahaman politik dan partisipasi masyarakat.

2) Mengadakan Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tugas Kesbangpol sebagai pembinaan partai politik.

3) Mengadakan kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan Partai.

4) Sosialisasi Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyaratan dengan sasaran peningkatan partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dan mendukung kebijakan pemerintah dan meningkatnya organisasi yang memenuhi persyaratan administrasi agar terdaftar di Kesbangpol dan linmas Kutai Kartanegara.

5) Bimbingan Teknis (Bintek) Bendaharawan Partai Politik sebagaimana tugas Kesbangpol sebagai pembinaan partai politik di daerah dengan indikator kinerja kesamaan model pelaporan keuangan partai politik

dan penyampaian laporan keuangan parpol yang tepat waktu.

6) Mengadakan penelitian dan pemeriksa administrasi Partai Politik dengan indikator kinerja semakin tertibnya administrasi partai politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1) Mengadakan Pelatihan SAR bagi anggota Linmas dengan indikator kinerja terlaksananya Peltihan SAR yang bertujuan tersedianya tenaga SAR Linmas yang handal dalam penganan bencana.

2) Fasilitasi penggaulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan sasaran mengurangi dampak korban bencana dengan indkator kinerja

e. Program Peningkatan Pemberantas penyakit masyarakat (Pekat)

1) Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
2) Penyuluhan Pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

f. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

1) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PEMILU Tahun 2009
2) Desk Pilkada

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sebagai tolok ukur keberhasilan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dinilai berdasarkan jumlah kegiatan pembinaan Politik Daerah dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Untuk Tahun Anggaran 2009, capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut mencapai masing 11 kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan 1 kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Tabel 4.28. Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	6 Keg.	6 Keg.	6 Keg.	7 Keg.	11 Keg.
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg. (5Kec)

Sementara capaian kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.29. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	200.000.000	200.000.000	100
2006	6.050.998.720	5.124.522.170	84,69
2007	4.453.268.000	4.220.708.775	94,78

2008	10.388.040.000	7.015.260.130	67,53
2009	22.070.809.000	15.956.668.895	72,30
2010	39.128.437.667	-	-
Jumlah	82.291.553.387	32.517.159.970	39,51

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam menjalankan kegiatan dan program selama tahun 2005-2009, Badan Kesbangpol dan linmas Kab. Kutai Kartanegara menghadapi hambatan dan kendala baik secara secara administratif maupun keadaan di lapangan.

Adapun hambatan dan kendala yang dapat dihimpun selama kegiatan tahun 2009, adalah sebagai berikut :

a. Sering terlambatnya realisasi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kesbangpol dan linmas Kab. Kutai Kartanegara.
b. Tidakadanya kesamaan struktur organisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan yang mengakibatkan terputusanya garis komando, sehingga sering terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan dan pembagian tugas.
c. Seringnya muncul permasalahan yang berkaitan dengan lahan masyarakat terhadap perusahaan tambang dan perkebunan yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid, sehingga Badan Kesbangpol dan Linmas Kutai Kartanegara perlu mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini

dengan instansi-instansi yang berkaitan langsung pada masalah penetapan tapal batas antara desa dan kecamatan untuk dapat membuat tapal batas yang valid serta diatur oleh peraturan daerah, sehingga diharapkan meminimalisir adanya permasalahan/konflik antara masyarakat desa/kecamatan maupun antara masyarakat dengan perusahaan.

d. Banyaknya tuntutan masyarakat di daerah operasional perusahaan kurang memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk mengingatkan perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.

e. Banyaknya Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas, OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan sebagian besar tidak dilaporkan serta sebagian besar Ormas, OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan tidak memiliki sekretariat dan tidak memiliki papan nama.

f. Kegiatan yang dilaksanakan oleh parpol sebagian besar tidak dilaporkan/tidak kegiatan dan Penyampaian Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol agak terlambat.

g. Kurangnya sarana prasarana di tingkat kabupaten maupun kecamatan dalam penanggulangan bencana, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sarana prasarana sehingga penganan bencana dapat dilaksankan secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk mengurangi dampak korban bencana.

4. **Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

   Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama periode 2005-2010, Badan Kesbangpol dan Linmas telah memperoleh prestasi/Penghargaan antara lain :

   a. Penghargaan SCUBA DRIVER kepada SAR Linmas dari Persatuan Penyelam Internasional dan Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia tahun 2009.
   b. Penghargaan SAR dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009.
   c. Penghargaan Besic Resceu dari Basarnas (Badan SAR Nasional) Kalimantan Timur tahun 2008.
   d. Penghargaan Pengamanan Pemilu Gubernur dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008.
   e. Penghargaan Kelinmasan dan Penanggulangan Bencana Alam dari Linmas Kalimantan Timur tahun 2007.

xx. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      3) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.

4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
7) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
8) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
9) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
10) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
14) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
15) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
16) Penyediaan Makanan dan Minuman.
17) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
18) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/ Teknis Perkantoran.
19) Penerapan Padat Web.
20) Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Bidan Sarana Prasarana.
21) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
22) Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari - hari Tertentu.
23) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

24) Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Se-Kalimantan Timur
25) Tertib Administrasi Kepegawaian
26) Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Perlengkapan
27) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
28) Penyediaan Jasa Teknis Perkantoran Bagian Perlengkapan
29) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelola Bantuan Keuangan Pada SKPD
30) Tambahan Perbaikan Kesejahteraan Untuk Tenaga Tidak Tetap daerah (T3D), Pasukan Kuning dan Pensiunan di Lingkungan Kab. Kutai Kartanegara
31) Pengelolaan Kearsipan Sub Bagian Keuangan Setkab. Kukar
32) Penataan dan Penyusunan Arsip / Dokumen pada Bagian Pemerintahan
33) Keolahragaan Sekretariat Daerah
34) Pendampingan Program Beasiswa dan Stimulan Bagi Mahasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
35) Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
36) Pengelolaan Data Penerima Bantuan Pendidikan
37) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
38) Pengelolaan Data Gaji PNS
39) Penyediaan Jasa Representasi
40) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Murni)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pembangunan Gedung Kantor
2) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6) Pengadaan Mebeleur
7) Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya
8) Pengadaan Mobil Pick Up Keperluan Operasi Trantib ke Kecamatan
9) Pengadaan Peralatan Dapur Lainnya
10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
13) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset
15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Insenerator
16) Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman dan Cleaning Service
17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
19) Sewa Gedung dan Alat Angkutan Lainnya
20) Pengadaan Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan
21) Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum
22) Perbaikan Instalasi Listrik
23) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
24) Land Scape dan Semenisasi Parkir Kantor Pemerintahan daerah

25) Penambahan / Perluasan Kantor
26) Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana
27) Renovasi BPU/Kantor
28) Pembebasan Lahan Korpri Desa Perjiwa Tenggarong Seberang
29) Halaman Upacara 35 m x 40 m Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga
30) Perencanaan Pembangunan Gedung
31) Pembangunan Gedung Serbaguna
32) Peningkatan Jalan dan pembuatan parit di perumahan
33) Perawatan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peningkatan Bawah Air.
34) Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa
35) Pembuatan Sekat dan Rehabilitasi Gudang Pemkab
36) Pengadaan Furniture, Interior Perumahan Pemkab
37) Pengadaan Mobil Truck Sampah untuk Keperluan Kecamatan
38) Pembuatan Pelayanan Terpadu (Copy Center, Poliklinik, Kantin) dilingkungan Sekretariat Daerah
39) Pengadaan Alat-alat Komunikasi
40) Pengadaan Alat-alat Studio
41) Perlengkapan Furniture dan Kelengkapan Kantor Kec Loa Janan
42) Pembangunan Garasi Pemkab Kukar
43) Pengadaan dan Pemasangan Instaliasi Jaringan Telepon Gedung A, B, dan C kantor Bupati Kukar
44) Pembangunan Gudang dan Arsip Sekretariat Daerah
45) Rehabilitasi & Pengadaan Kantor Perwakilan di Jakarta

46) Pengelolaan Taman Wisata Pulau Kumala
47) Pengadaan Aplikasi Elektronik Mail pada Bagian Perlengkapan Setkab. Kukar
48) Pengadaan Aplikasi Kontrak pada Bagian Perlengkapan Setkab. Kukar
49) Pengadaan Plakat Keperluan Pemkab. Kukar
50) Rehabilitasi Rumah Dinas di Kecamatan-Kecamatan
51) Rehabilitasi Sedang/Berat Pelabuhan Speed Boat Sekretariat DPRD
52) Penyediaan gedung tempat kerja
53) Pembelian Kantor untuk UPT-PAD di Kecamatan Loa Janan
54) Penunjang Kegiatan Dokumen Pendukung Para Pihak Ketiga
55) Penunjang Operasional Pembuatan Program Kerja 6 UPT Dispenda
56) Pengadaan Rumah/Garasi Speed Boat

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4) Pengadaan pakaian olah raga

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal (Intensive Pelatihan : Teachers Profesional Development Training, TESL/ESP and Cross Cultural Understanding, TOEFL Preperation Training)

2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Workshop, Sosialisasi berbagai implementasi peraturan perundangan.
3) Penyusunan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemkab. Kukar.
4) Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Suplemen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan
5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perlengkapan.
6) Bintek Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007.
7) Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Kutai Kartanegara
8) Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perhitungan Pajak & Retribusi Daerah
9) Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN
10) Implementasi Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
11) Penyusunan PROTAP Daerah
12) Koordinasi Proses Akuntansi Pendapatan Daerah
13) Pengadaan Buku-buku Literatur Perpustakaan
14) Pengelolaan Perpustakaan
15) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
16) Penunjang Kegiatan Olahraga Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara
17) Pembinaan Ormas Kepemudaan, Keagamaan dan Sosial
18) Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan
19) Pembinaan Lingkungan Desa

20) Pembinaan Dalam Hal Pendataan Aset Desa, Prasarana dan Sarana Umum
21) Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
22) Sosialisasi Pembinaan PKK dan Organisasi Sosial Lainnya
23) Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Arsip
24) Pengadaan Peta Citra Satelit Untuk Updating data Penutupan Lahan dan Penggunaan Lahan
25) Peningkatan Ketrampilan Petani dan Nelayan
26) Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
27) Revitalisasi Perikanan Pengolahan
28) Analisa Pengembangan Usaha Potensi Perikanan
29) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Renstra, Renja SKPD
2) Penyusunan RKA
3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4) Monitoring dan Evaluasi Sistem
5) Pengadaan Jaringan Wireles Untuk Aplikasi SIMDA
6) Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun
7) Peningkatan Pemahaman Mekanisme Pengelolaan Keuangan SKPD (Outsearching)
8) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9) Pendampingan Pengelolaan Keuangan SKPD

10) Verifikasi dan Audit Pertanggungjawaban Keuangan Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
11) Penyempurnaan Website dan Sarana Pendukung
12) Penyusunan Analisa Standar Belanja
13) Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pembuatan Perbup ttg Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di lingk Pemkab Kukar
14) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) di lingkungan Sekretariat Daerah
15) Evaluasi Peraturan Bupati Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Kab. Kukar
16) Penyusunan Prognosis Realisasi dan Daya Serap Perjalanan Dinas
17) Pembekalan Teknis Bendahara Pengeluaran Pembantu
18) Pengolahan dan Pendistribusian Data Gaji dan Rapel PNS se Kab Kutai Kartanegara
19) Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Bupati
20) Penyelesaian Pembayaran Daya Serap Penggajian dan Tunjangan PNS pada Setkab Kukar Tahun 2009
21) Daya Serap dan Prognosis Penggajian Tenaga Tidak Tetap Daerah Untuk Setkab Kukar Tahun 2009
22) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Kutai Kartanegara
23) Penunjang Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah
24) Pemutakhiran Database Gaji PNS Kab. Kukar Tahun 2009
25) Konversi NIP PNS se-Kab. Kukar pada Database Gaji dari 9 Digit Menjadi 18 Digit Tahun 2009

26) Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
27) Fasilitasi Efektivitas Perangkat Daerah di Wilayah
28) Penyusunan Buku SOP dan Standar Pelayanan Sekretariat DPRD
29) Bimbingan Teknis Penatausahaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
30) Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Laporan Bendahara
31) Penghimpunan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dispenda

f. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
2) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
3) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
5) Evaluasi Produk Hukum Daerah
6) Penyusunan Naskah Akademik
7) Koordinasi Pembinaan Hukum
8) Bantuan Hukum
9) Penyuluhan Hukum
10) Penyusunan Raperda dan Perbup Pengelolaan dan Pendayagunaan Asset Badan Usaha Milik Daerah
11) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Penanaman Modal Daerah

12) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Tentang Koperasi Dan UKM
13) Perumusan Perubahan Perda 13 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja PDAM Tirta Mahakam Kab Kukar
14) Perumusan Kebijakan Tarif Air Minum PDAM Tirta Mahakam Kab Kukar
15) Penyempurnaan Nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007 (KLB)
16) Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas dan Badan Lembaga Perangkat Daerah (KLB)
17) Pengkajian Tentang Keberadaan Tanah Adat/Ulayat Dalam Wilayah Kab Kutai Kartanegara Guna Persiapan Penyusunan Raperda
18) Pengkajian dan Penyusunan Perangkat Peraturan Mengenai Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
19) Sosialisasi Perbup Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara
20) Penyusunan Peraturan Bupati Pedoman Kontrak Multiyears
21) Penyusunan Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
22) Penyusunan Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan PPKD

g. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1) Fasilitas Tamu & Prosesi Acara Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
2) Penunjang Kegiatan Unsur MUSPIDA Kukar
3) Penunjang Kegiatan Acara Pemkab Kukar
4) Persiapan Prosesi Acara Pemkab Kukar.
5) Pembekalan dan Orientasi Lapangan Perangkat Kecamatan.
6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah.

h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1) Pengelolaan Halaman Website Humas dan Protokol
2) Pembuatan Booklet Selayang Pandang
3) Pembuatan Buletin Gerbang Dayaku
4) Pendokumentasian Informasi Pembangunan dari Media Cetak
5) Pameran Keliling Humas Kukar Kabupaten Kutai Kartanegara
6) Pengelolaan Bahan Hasil Liputan Bidang Fotografi
7) Mengikuti Pameran Pembangunan Peringatan Merah Putih Sanga-Sanga
8) Diseminasi Informasi Melalui Media Massa Elektronik
9) Pengoperasian TV Kabel Humas
10) Diseminasi Informasi Publik
11) Peningkatan Siaran Interaktif Pemkab dan Siaran Keagamaan
12) Peningkatan Siaran Kesenian Daerah

i. Program Pengembangan Pembangunan

1) Orientasi Kehumasan
2) Konsultasi dan kordinasi Kehumasan
3) Rapat Koordinasi Humas Tingkat kabupaten
4) Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Fisik
5) Pengolahan Data Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

j. Program Pemberdayaan Aset Milik Pemkab Kukar

1) Monitoring dan Penyusunan Laporan Aset

k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2) Pendampingan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3) Bimbingan Teknis penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD
4) Konsolidasi Laporan Akhir Tahun SKPD
5) Sinkronisasi Laporan Realisasi SP2D pada SKPD
6) Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPKD
7) Sinkronisasi Data Realisasi Anggaran pada SKPD
8) Penyusunan Laporan Keuangan Semester SKPKD
9) Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
10) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (SKPKD) Kab Kutai Kartanegara

11) Evaluasi Usulan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada SKPD
12) Pengujian Laporan Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Pada SKPD di Lingkungan PEMKAB Kukar
13) Pengujian Laporan Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD di Lingkungan PEMKAB KUKAR
14) Penyusunan Progres Laporan Bulanan Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD
15) Verifikasi Usulan Pengajuan Penerbitan SPD
16) Penyusunan Progres Laporan Semester Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD
17) Penyusunan Progres Laporan Tahunan Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD
18) Konfirmasi Penyaluran Dana Perimbangan Daerah ke Direktorat Dana Perimbangan, DJPK, Departemen Keuangan di Jakarta
19) Penghimpunan Data RKA-SKPD Dinas / Badan / Kecamatan / Kelurahan Tahun 2009
20) Pengelolaan DPA Dinas / Badan / Kecamatan / Kelurahan pada APBD Kab. Kukar
21) Pendataan Pegawai Menurut Golongan, Eselon, Non Eselon untuk Penyusunan APBD pada Lampiran IV
22) Penataan Kearsipan dalam rangka Administrasi Pelaksanaan APBD
23) Verifikasi dan Assistensi RKA-SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD
24) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Kutai Kartanegara

25) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Kab. Kutai Kartanegara
26) Pengelolaan SPD Dinas / Badan / Kecamatan / Kelurahan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara
27) Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan SIMDA BPKP
28) Pengelolaan Data Gaji PNS Pemkab. Kutai Kartanegara
29) Persiapan Data Gaji PNS se-Kab Kutai Kartanegara
30) Konsilidasi, Konversi dan Proses Data Pendukung Gaji
31) Peningkatan SDM Pengelolaan Daftar Gaji
32) Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Untuk Pegawai pindah, Meninggal, dan Pensiun se Kab. Kutai Kartanegara
33) Pengelolaan Kearsipan Keuangan Daerah
34) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparatur Sub Bagian Perbendaharaan
35) Koordinasi dan Tukar Informasi Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kelengkapan Administrasi Keuangan Dengan Daerah Lainnya
36) Pengelolaan Registrasi SPM Belanja Langsung dan Tidak Langsung se Kab Kutai Kartanegara sebagai Kontrol Kesesuaian Pengeluaran SP2D
37) Rekapitulasi dan Pengumpulan Data Surat Pencairan Dana (SP2D) Terhadap Semua Pembayaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung
38) Rekonsiliasi Register SP2D dengan Rekening Koran pada Bank Kaltim

39) Perawatan dan Perbaikan Sistem Aplikasi Komputer di Sub Bidang Perbendaharaan
40) Sistemasi Program Register Untuk Pengelolaan Entri Data SP2D dan Pelaporan Registrasi
41) Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2009
42) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2009
43) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
44) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaporan Pencairan Dana (Proses SPD dan SP2D) di SKPKD
45) Verifikasi Dokumen Permintaan Bantuan Keuangan Pada SKPKD
46) Pendampingan Penyusunan RKA pada SKPD
47) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
48) Pengujian Dokumen SPP dan SPM dari SKPD
49) Pembuatan Laporan Pengeluaran SP2D Persemester untuk belanja langsung dan tidak langsung
50) Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Desa
51) Pengelolaan SPD APBD-P Tahun 2009
52) Sinkronisasi Pengelolaan APBD-P
53) Studi Efektivitas dan Penyusunan Pedoman RKA-SKPD 2010
54) Rekapitulasi dan Sinkronisasi Data Perubahan Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Seluruh SKPD
55) Penyusunan dan Pengelolaan APBD-P Tahun 2009

56) Rekapitulasi Pergeseran Kode Rekening untuk Belanja Langsung dan Studi Efektivitas APBD-P TA 2009
57) Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyusunan APBD-P Kab. Kukar
58) Pengelolaan DPPA terkait Perubahan APBD Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan Kab. Kukar
59) Pembuatan Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik kepada PPKD untuk menjadi DPAL-SKPD
60) Penyusunan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan
61) Penyusunan Jurnal Memorial SKPD
62) Pendampingan Posting Jurnal Belanja pada SKPD
63) Monitring dan Evaluasi Program Jasa Jaminan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiunan PNS Beserta Keluarga di Lingkungan Pemkab. Kukar
64) Mengikuti Bimtek Sistem Pencairan Alokasi Dana Desa, Bansos dan Hibah
65) Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah ke DEPDAGRI
66) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
67) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Sosial, Hibah dan Tempat Ibadah
68) Monitoring Program Asuransi Kesehatan Aparatur Desa di Wilayah Pemerintah Kab. Kukar
69) Verifikasi Penerbitan SPM Bantuan Keuangan pada SKPKD

70) Rekapitulasi dan Pengelolaan Data Administrasi Pencairan Pembiayaan Pengeluaran
71) Koordinasi Teknis Pelaporan dan Rekonsiliasi DAU, DAK dan Gaji PNS Daerah Kukar dalam Kaitannya dengan WP. Askes, Taspen dan Taperum ke Depkeu dan KPPN
72) Bintek Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 55 Tahun 2008
73) Pembuatan dan Pengadministrasian Surat Perintah Perjalanan Dinas
74) Penyusunan Berkas Kepegawaian
75) Memfasilitasi Kegiatan Kerja Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekda dan Asisten-Asisten
76) Penyusunan dan Pemantapan Rancangan RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD
77) Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Keuangan SKPD
78) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
79) Penjaringan pajak / retribusi daerah untuk peningkatan PAD
80) Identifikasi potensi pajak daerah
81) Intensifikasi/Ekstensifikasi Perhitungan Penerimaan Dana Perimbangan bagi Hasil Pajak dari SDA
82) Validasi Data Produksi untuk Bagi Hasil SDA
83) Sosialisasi SPTPD / SPTRD dan Media Pajak Lainnya
84) Konsultasi Tentang Peremajaan Data Pajak / Retribusi Daerah untuk Meningkatkan SDM pada Bidang Pendataan

85) Pemutihan dan Pemungutan Ditempat Pajak / Retribusi Daerah
86) Penagihan Penerimaan Bukan Pajak dan Retribusi Daerah
87) Pengumpulan dan Analisis Pelayanan Pendapatan Daerah di Kec. Tenggarong
88) Penggalian Potensi PAD di Kec. Tenggarong
89) Penunjang Administrasi Teknis Bagian UPT Kec. Tenggarong
90) Inventarisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
91) Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah di Luar Wilayah Kab Kuka
92) Penyusunan Protap Tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
93) Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah di Dalam Wilayah kab Kukar
94) Monitoring Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
95) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
96) Pembuatan Dokumentasi Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
97) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan PAD pada UPT di Lingkungan DISPENDA
98) Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
99) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan PNS
100) Asistensi Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah

101) Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan Permintaan dan Penerimaan Benda Berharga
102) Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah
103) Bimbingan Teknis Penetausahaan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah
104) Monitoring Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
105) Pengembangan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
106) Pembuatan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah
107) Monitoring Penerimaan Benda Berharga di Kecamatan, UPT, Badan dan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara
108) Monitoring Pajak dan PBB di 18 Kecamatan
109) Pengumpulan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di 18 Kecamatan
110) Pengolahan dan Pengelolaan Data Perkembangan Pendapatan Daerah
111) Monitoring Pengelolaan Benda Berharga
112) Inventarisasi dan Monitoring Aset Barang
113) Pengendali, Penerimaan dan Pengeluaran Baran
114) Intensifikasi Pengelolaan dan Penerimaan Keuangan Daerah
115) Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pertanggungjawaban Pengguna Dana / PPTK
116) Penunjang Kegiatan Pendapatan Wajib Pajak di Kecamatan Muara Jawa

117) Penunjang Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah UPT Dispenda Muara Badak
118) Penyediaan Jasa Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
119) Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kantor UPT Dispenda Kec. Tenggarong Seberang
120) penggalian potensi pajak dalam rangka peningkatan potensi PAD diUPT Dispenda Kec.Tenggarong Seberang
121) Identifikasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kutai Kutai Kartanegara
122) Pengembangan Sistem Informasi dan Koneksifitas Dispenda
123) Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB Kab Kutai Kartanegara
124) Pembuatan dan Pengadministrasian Surat Perintah Perjalanan Dinas
125) Penyusunan Protap Tentang Pelaksanaan Penyitaan Tunggakan Pajak Daerah
126) Penunjang kegiatan penghimpunan dan penyampaian data barang Dispenda dan 6 UTPD
127) Penunjang kegiatan peningkatan inventarisasi manajemen pengelolaan dan penyaluran barang pada bagian umum Dispenda
128) Pengelolaan data bagian umum Dispenda
129) Penunjang Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Sarana Fisik Dispenda Kab. Kutai Kartanegara
130) Studi Komparatif Pemeliharaan Aset Dispenda

131) Penyesuaian Penerapan Terhadap Terbentuknya Dispenda Kab. Kukar TA. 2009
132) Studi Efektivitas, Penyusunan dan Pengelolaan serta Monitoring Data dan Pembayaran dari Bagi Hasil Pajak SDA (Pemungutan Hasil Perikanan)
133) Pemungutan Data Basis Pajak Daerah Kab. Kutai Kartanegara
134) Bimtek Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah Kab. Kutai Kartanegara
135) Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Barang - Barang Daerah
136) Monitoring dan Pelaporan Asset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di 18 Kecamatan
137) Decision Support System dan Executive Information System (penilaian asset)
138) Kerjasama pemanfaatan asset pemerintah daerah Kab Kukar
139) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Kab.Kukar Dalam Hal Pengelolahan Asset Daerah
140) Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Bangunan Menara
141) Bintek Aplikasi SIMBADA untuk penyimpan dan pengurus barang di seluruh SKPD
142) Pemeliharaan Aset Aplikasi SIMBADA se Kab Kutai Kartanegara
143) Revaluasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah se Kabupaten Kutai Kartanegara
144) Pengamanan, Sertifikasi, Pemagaran Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
145) Identifikasi aset yang digunausahaka

146) Pengumpulan dan Penyusunan Data / Informasi Aset Daerah
147) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

l. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pendayaagunaan Asset Badan Usaha Daerah
2) Bimbingan Peningkatan Pemahaman Akuntansi/ Laporan Keuangan Bagi Staf Tenaga Pembina Dan Pengawas Perusda
3) Pelatihan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan dalam Peningkatan SDM Bidang Administrasi Perekonomian
4) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

m. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1) Memfasilitasi Dalam Rangka Pengambilan Kebijakan Dalam Permasalahan Bidang Perhubungan
2) Monitoring Pasar Kontemporer/Pasar Tumpah Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
3) Monitoring Barang Sangat Strategis Dan Barang Strategis Dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
4) Monitoring Dan Evalusi Kinerja Pdam Tirta Mahakam Kab. Kukar Tahun 2008
5) Monitoring Dan Evaluasi Permasalahan Investasi Di Kecamatan

6) Fasilitasi Penyempurnaan Perda Tentang Investasi Penanaman Modal Daerah
7) Monitoring Dan Evaluasi Permasalahan Dan Peningkatan Pemberdayaan Koperasi Dan Ukm
8) Inventarisasi Dan Monitoring Unit Usaha Perusda
9) Fasilitasi Dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Tentang Perubahan Perda Perusda Tunggang Parangan Dan Penyusunan Perbub Tata Laksana Organisasi Perusda Tunggang Parangan
10) Fasilitasi Dan Koordinasi Tentang Pengembangan Dan Peningkatan Kinerja Perusda
11) Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Calon Dewan Direksi Perusahan Daerah (Perusda)
12) Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Terkait Dengan Urusan Perikanan
13) Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Terkait Dengan Urusan Peternakan
14) Monitoring dan Evaluasi Produksi Perikanan
15) Monitoring dan Evaluasi Produksi Peternakan
16) Monitoring dan Evaluasi produksi pertanian tanaman pangan
17) Monitoring Menginventarisir Masalah - Masalah Pertambangan Golongan C Tambang Batubara & Migas
18) Memfasilitasi dalam rangka pengambilan kebijakan terhadap masalah pertambangan dalam pemanfaatan lahan permukaan dalam wil. Kab. Kukar

19) Monitoring realisasi program Community Development (Comdev) Perusahaan Tambang Batubara dalam Wil. Kab. Kukar
20) Penyusunan Perda dan Perbup Ijin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet Dalam Wilayah Kab. Kukar
21) Monitoring Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Sektor Pertanian Dalam Arti Luas
22) Monitoring Pengembangan Perkebunan Tahun 2009
23) Monitoring dan Inventarisasi Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Tambang Dalam Wilayah Kab. Kuktai Kartanegara
24) Pelatihan Pengelolaan Managemen Lingkungan Tipe A

n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1) Pengolahan Dan Penyusunan Data Bagian Perekonomian Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
2) Penyusunan Data Base Pengusaha Jasa, Industri Dan Perdagangan
3) Biaya Pendampingan Pameran Dalam Negeri
4) Koordinasi /Fasilitasi Pengelolaan Bahan Dan Data Informasi Urusan Bidang Penanaman Modal Daerah
5) Pengolahan dan Penyusunan Data Bagian Sumber Daya Alam di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

o. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi

2) Study Komperatif Peningkatan Pendayaagunaan Asset Badan Usaha Milik Daerah
3) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi (Keikutsertaan Pemkab Kukar pada Regency Expo)
4) Rakor Kegiatan Tahunan PANJATAPDA
5) Pameran Dalam Rangka Kegiatan Rakor PANJATAPDA
6) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi (Pameran Agro dan Food Agribisnis)
7) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerja Sama Antar Daerah Bidang Ekonomi (Pendampingan Subsidi Ongkos Angkut Raskin 2009)
8) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik (Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan PENAS ke XIII di Kab. Kutai Kartanegara
9) Pelaksanaan Lanjutan SOA Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2008

p. Program Penataan Organisasi

1) Penyusunan Naskah Akademik Peta Jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah (AJB)
2) Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 (KLB)
3) Evaluasi Tupoksi /Uraian Tugas Jabatan Struktural SKPD

q. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1) Penanganan Permasalahan di Bidang Pemerintahan Umum
2) Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan serta Informasi Masyarakat

r. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1) Penegasan Batas Daerah Kabupaten
2) Penataan Batas Wilayah Kecamatan
3) Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
4) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan HUT RI ke 64

s. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Sosialisasi TP UKS

t. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1) Koordinasi dan inventarisasi bidang transmigrasi
2) Koordinasi dan inventarisasi bidang tenaga kerja
3) Koordinasi dan inventarisasi bidang sosial
4) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pembangunan
5) Pendampingan Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
6) Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan
7) Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD
8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

9) Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009
10) Pengawasan pengelolaan barang dan aset dispenda
11) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
12) Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
13) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
14) Sinkronisasi dan Penyusunan Raperda Pemanfaatan Asset di Kabupaten Kukar
15) Identifikasi dan Penilaian Aset Yang Akan Dihapuskan
16) Identifikasi bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta penelusuran IMB dan sertifikat tanah se Kab Kukar

u. Program Manajemen pelayanan pendidikan

1) Rapat koordinasi pendidikan
2) Koordinasi dan inventarisasi asrama pelajar / mahasiswa

v. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba

1) Sosialisasi narkoba dan aids

w. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

1) Pelayanan manasik haji dan pemberangkatan haji
2) Safari ramadhan ke kecamatan
3) Koordinasi dan konsolidasi tilawatil qur'an
4) Peningkatan Pengetahuan Syiar islam
5) Pengadaan hewan sapi kurban

6) Festival Masjid Bersejarah Nusantara dan Asia Tenggara

x. Program Optimalisasi Sistem Administrasi Bantuan

1) Monitoring Bantuan Sosial
2) Verifikasi Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah

y. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

z. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) Evaluasi Formasi T3D dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara
2) Impassing Gaji PNS dilingkungan Setda Kab.Kukar.
3) Proses Usulan dan Penyelesaian Cuti PNS
4) Proses Usulan dan Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala Setda Kab. Kukar.
5) Pemutakhiran dan Peremajaan Data PNS di Lingkungan Setda Kab. Kukar.
6) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
7) Seleksi penerimaan calon PNS
8) Penempatan PNS
9) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
10) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
11) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
12) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
13) Koordinasi penyelenggaraan diklat

14) Up Grade Data Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
15) Evaluasi Kinerja Aparatur
16) Pembinaan PNS Melalui Pelaksanaan Psikotest Pejabat Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkan Kutai Kartanegara
17) Audit Data Base Tenaga Honorer
18) Penerimaan CPNS melalui Formasi Umum
19) Proses Pengurusan Taspen, Karis/Karsu dan Karpeg
20) Penggajian T3D 12 Instansi Vertikal
21) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

aa. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Non Raperda
2) Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
3) Kegiatan Reses
4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
5) Penyusunan/Pengkajian Kebijakan Daerah
6) Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara
7) Penyusunan Buku Profil Anggota DPRD.
8) Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada Media Massa
9) Penjaringan/Seleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi-Komisi DPRD

10) Pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD
11) Rapat Paripurna, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
12) Seminar, Lokakarya dan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD
13) Penyusunan Legal Manual Komisi-komisi dan panggar Legislatif

bb. Program Pelayanan Perizinan

1) Pengembangan Sistem Pelayanan Ijin Terpadu

cc. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1) Penataan Kearsipan

dd. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyusunan Rencana Strategik Renstra

ee. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1) Pemulangan Pegawai yang Pensiun

ff. Program Pendidikan Kedinasan

1) pendidikan penjenjangan struktural

gg. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

hh. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1) Tim Pendamping Kecamatan untuk Fasilitasi terhadap Pembinaan Pengelolana Alokasi Dana Desa
2) Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan (Desa)
3) Pembinaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Desa

ii. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1) Musrenbang
2) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

jj. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya

kk. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1) Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

ll. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1) Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

mm. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

nn. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keungan Desa

1) Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Implementasi pelaksanaan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dinilai berdasarkan adanya Sistem Informasi Manajemen Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Berdasarkan kategori tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 4 buah.

Sementara apabila ditinjau berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.30. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	443.684.822.391	293.502.962.881	66,15

2006	723.378.002.203	504.894.213.482	69,80
2007	1.570.674.303.443	944.193.968.372	60,11
2008	1.172.666.486.846	707.578.441.342	60,34
2009	1.027.308.370.524	788.467.284.034	76,75
2010	903.368.496.024	-	-
Jumlah	5.841.080.481.431	3.238.636.870.111	55,45

Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola berdasarkan SKPD yang menangani urusan pemerintahan umum antara lain :

a. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD yang terdiri dari Pelayanan Adm Perkantoran, Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dimanfaatkan untuk pembiayaan jalannya roda pemerintahan pada masing-masing SKPD.

b. Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah terdiri dari :
   1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dipergunakan untuk Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan, Cetak Perda, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Publikasi Media Elektronik.
   2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan keluaran berupa Akomodasi Tamu, Rapat Koordinasi, Pembuatan Naskah Sambutan, Pembekalan dan

Orientasi Lapangan Perangkat Kecamatan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah.

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan keluaran berupa update website humas dan protokol, Booklet Selayang Pandang, Buletin Gerbang Dayaku, Pameran Keliling Humas, Diseminasi Informasi Melalui Media Massa Elektronik.
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan keluaran berupa buku ASB, Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Perbup ttg Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, buku standarisasi sarana dan prasarana pemerintah, buku standarisasi harga dasar upah, bahan dan peralatan bidang pekerjaan umum, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pedoman Pelaksanaan Rancangan APBD.
5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan keluaran berupa Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pendayaagunaan Asset Badan Usaha Daerah, Bimbingan Peningkatan Pemahaman Akuntansi/Laporan Keuangan Bagi Staf Tenaga Pembina Dan Pengawas Perusda, Pelatihan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan dalam Peningkatan SDM Bidang Administrasi Perekonomian.

6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang dimanfaatkan rapat Fasilitasi Pengambilan Kebijakan Dalam Permasalahan Bidang Perhubungan, Monitoring Pasar Kontemporer/Pasar Tumpah, Monitoring Barang Sangat Strategis Dan Barang Strategis, Inventarisasi Dan Monitoring Unit Usaha Perusda, draft Perda dan Perbup Terkait Perumusan Kebijakan pemerintah daerah.

c. Capaian Kinerja yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dikelola oleh Skeretariat DPRD dari tahun 2005-2009 diukur berdasarkan produk hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Daerah.

Grafik 4.7. Jumlah Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2009

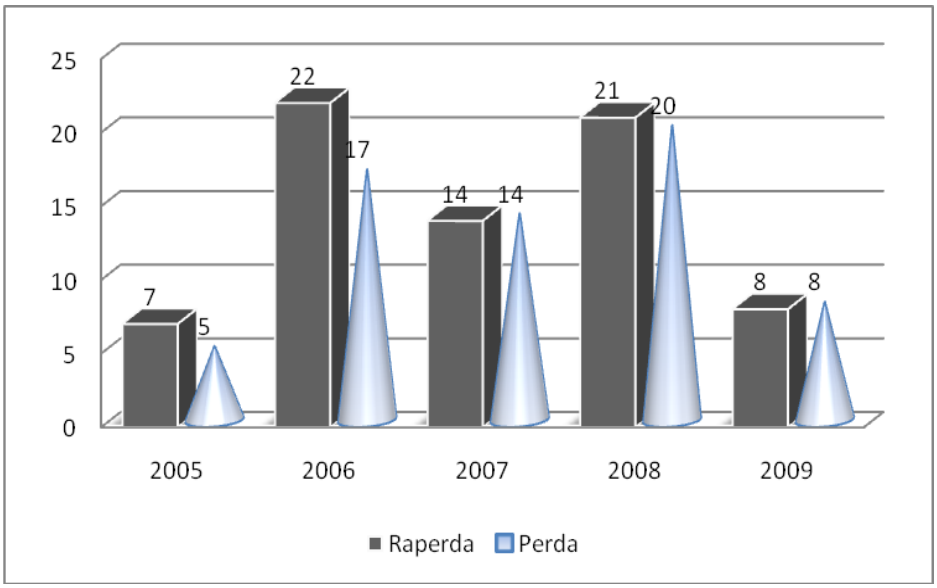

d. Program Pelayanan Perizinan dengan berupa 1 buah Sistem Jaringan Perijinan Terpadu.

3. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 12 Bagian, dengan kondisi sekarang karena terbatasnya ruangan perkantoran satu atap, khususnya dilingkungan sekretariat sehingga satu bagian yaitu Bagian Perlengkapan berada diluar lokasi kantor sekretariat, sehingga menjadikan terkendala dalam melakukan koordinasi antar bagian, disamping itu juga faktor banyaknya pegawai sedangkan luas ruangan terbatas.

Untuk itu kedepannya perlu dilakukan penataan dan penambahan ruang kantor serta rasionalisasi pegawai dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga lebih efektif dan efisien.

Untuk permasalahan yang ada di Badan Penelitian Pembangunan Daerah adalah :

- Jumlah Peneliti (Fungsional) saat ini masih belum ada secara formal, yang ada baru 1 orang akan dicalonkan secara formal sebagai Fungsional peneliti. Logikanya sebenarnya jumlah pegawai yang ada dan peneliti berbanding ; 3 : 1.
- Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara mandiri melakukan penelitian (Swakelola mandiri).

- Judul penelitian kadang kala masih kurang tepat dengan kebutuhan yang ada terutama yang berkaitan dengan Dinas Dinas atau Badan Lainnya.
- Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 33 tahun 2007 pasal 4 ayat 1.
- Hasil Penelitian belum memberikan dampak langsung dalam pembuat kebijakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemecahannya adalah melalui :

- Perlu adanya Pengangkatan baru tenaga Peneliti dengan cara mengangkat PNS yang ada dilingkungan Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara atau dari luar Balitbangda Kab Kutai Kartanegara.
- Untuk Kedepannya agar dapat dilakukan Penelitian sendiri (Swakelola Mandiri)
- Perlu adanya masukan Judul Penelitian dari Dinas / Kecamatan agar judul yang ada sesuai dengan kebutuhan.
- Perlu adanya Perda atau Perbup yang mengatur bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas/Badan di Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara

xxi. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1) Pelatihan Bagi Lembaga Adat

2) Pendidikan dan Pelatihan Tapal Batas Bagi Kepala Desa dan Lurah
3) Pendidikan dan Pelatihan Kepala Dusun Tentang Manajemen Pemerintahan Desa
4) Pembinaan Perangkat Pemerintah Desa (BPD)
5) Pelatihan dan Bimtek Bagi Anggota BPD Baru di Wilayah Kutai Kartanegara

b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1) Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
2) Pembekalan Verifikasi APB Desa
3) Pembinaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Desa
4) Penyusunan Juknis Pencairan ADD dan Pedoman Evaluasi APBDes

c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

1) Administrasi Pendamping Nasional Pemberdayaan Masyarakat
2) Survey Database Kebutuhan Masyarakat
3) Pendataan Profil Desa / Kelurahan
4) Sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan
5) Inventarisasi dan Sinkronisasi P2LDT
6) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7) Evaluasi usaha Perkreditan Desa /LPD dan Lumbung Pangan Masy.Desa (LPMD)
8) Pembinaan dan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG

9) Forum Diskusi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
10) Pelatihan P3MD Instansi Sektoral Kabupaten
11) Pembinaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
12) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten
13) Bimbingan Teknologi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan
14) Pendataan Evaluasi Tk.Perkembangan LPM se. Kabupaten Kutai Kartanegara
15) Pelantikan Pengurus LPM
16) Penyegaran Kader Posyandu Kabupaten
17) Penunjang Operasional dan Optimalisasi LPM
18) Penunjang Manajemen RT
19) Pelatihan Substantive Pemberdayaan Masyarakat
20) Peningkatan Kwalitas Aparatur BAPEMAS
21) Tertib Administrasi Kepegawaian
22) Lomba Desa / Kelurahan
23) Pembinaan Rumah Tidak Layak Huni
24) Pendataan Infrastruktur Desa / Kelurahan
25) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
26) Pembinaan dan Inventarisasi SDA
27) Administrasi Perencanaan Keuangan dan Manajemen Arsip Keuangan
28) Evaluasi Pembangunan Pedesaan

d. Penataan Peraturan Perundang-undangan

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penataan Kawasan Pembangunan Pedesaan dan

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kerjasama Desa

2) Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa/Kelurahan

e. Program Perencanaan Tata Ruang

1) Penyusunan Master Plan Tata Ruang Desa di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Model Perencanaan Partisipasif

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatu

1) Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa
2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
3) Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa
4) Pelatihan Pembuatan LPPD, LKPJ dan ILPPD bagi Kepala Desa
5) Pendidikan dan Pelatihan bagi Sekdes yang diangkat menjadi PNS tahap I

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dilihat dari aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2009 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka PKK Aktif dan Posyandu Aktif yang masing-masing mencapai 100%.

Namun demikian apabila dilihat dari aspek realiasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang sama dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.31. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	5.033.078.003	3.589.193.767	71,31
2006	11.945.000.000	11.378.723.680	95,26
2007	22.127.000.000	18.239.306.750	82,43
2008	28.559.500.000	20.137.956.913	70,51
2009	20.200.908.200	15.991.075.245	79,16
2010	10.635.190.845	-	-
Jumlah	98.500.677.048	69.336.256.355	70,39

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Untuk alokasi angaran SKPD belum memadai kemudian kapasitas Sumber Daya Manusia masih lemah dan masih belum terintegrasinya kegiatan antara bidang karena penggabungan dua organisasi tersebut serta sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas.

Solusi :

Diharapkannya penambahan alokasi anggaran SKPD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yaitu program-program pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana maksimal. Kemudian perlunya peningkatan SDM SKPD dan perlu dilaksanakan/dilakukan perencanaan

kegiatan monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan sehingga terintegrasinya diantara bidang-bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya pembaunan gedung kantor baru yang memadai.

xxii. SOSIAL;

Pembangunan sosial adalah bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Tujuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi tanggung jawab negara, yang dalam pelaksanaannya menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Secara sederhana kesejahteraan sosial dapat diketahui dari kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, mengatasi dan memecahkan permasalahan sehari-hari yang dihadapi, dan kemampuannya dalam mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesejahteraan sosial ditekankan pada 3 (tiga) hal utama yaitu : 1) mencegah munculnya permasalahan kesejahteraan sosial; 2) merehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat kembali melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya; dan 3) meningkatkan serta mengembangkan keberfungsian sosial PMKS. Dalam pendekatan ekonomi, PMKS dapat dikategorikan sebagai penduduk yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan menurut pendekatan pekerjaan sosial, PMKS

merupakan orang yang karena suatu sebab, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun lingkungan sosialnya, mengalami hambatan untuk dapat berfungsi sosial secara optimal. Dengan demikian strategi dalam penanganan PMKS tidak dapat hanya dengan mengedepankan pendekatan ekonomi semata, melainkan juga harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial dengan menitik beratkan pada interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.

Berpedoman pada logika berfikir tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartenegara dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan berikut ini :

1. Program dan Kegiatan

   Secara umum kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. beberapa program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

   Program ini didasarkan pada paradigma bahwa didalam diri setiap PMKS terdapat potensi yang dapat dikembangkan, sehingga mereka dapat mengatasi masalahnya sendiri. Secara umum program ini bertujuan untuk mengembangkan keberfungsian sosial PMKS agar

mereka dapat mengatasi masalahnya dan mencegah munculnya masalah baru.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, selama kurun waktu 2005-2009 telah dilaksanakan beberapa kegiatan berikut :

1) Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial
2) Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Muda Mandiri
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Berusaha bagi Lanjut Usia
4) Pembinaan Komunitas Adat Terpencil
5) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Trafiking
6) Pelatihan Keterampilan bagi PMKS.
7) Pemberian Santuan bagi Warga Tidak Mampu.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan program yang bersifat kuratif rehabilitatif. Dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masalah yang dihadapi klien tidak dapat diatasi sendiri, sehingga diperlukan bantuan dari institusi untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi. Tujuan akhir dari program ini adalah memperbaiki dan mengembalikan keberfungsian sosial klien sehingga dapat berfungsi kembali secara optimal.

Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 2005-2009 untuk memperbaiki dan mengembalikan keberfungsian sosial klien meliputi :

1) Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS
2) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
4) Pemberian tunjangan bagi Veteran dan Janda Veteran.
5) Pemulangan Orang Terlantar di Kabupaten Kutai Kartanegara .
6) Pelayanan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Kekerasan

c. Program Pembinaan Anak Terlantar

Periode anak merupakan masa keemasan dalam siklus kehidupan manusia. Anak yang mengalami masalah sosial akan berakibat pada tumbuh kembangnya yang tidak optimal, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial kelak setelah dia dewasa. Ketelantaran pada anak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh anak.

Program Pembinaan Anak Terlantar merupakan program yang memiliki 3 fungsi sekaligus yaitu kuratif, rehabilitatif dan preventif. Pembinaan terhadapanak terlantar dilaksanakan melalui sistem panti dan non panti. Kegiatan pembinaan anak terlantar dengan sistem non panti dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan

Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Traum

Penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami hambatan baik secara fisik, mental maupun fisik dan mental sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal. Pada kelompok masyarakat tertentu seringkali penyandang cacat dianggap sebagai beban bagi masyarakat, dan tidak dapat memberikan manfaat apapun sehingga harus selalu dikasihani.

Program Pembinaan terhadap Penyandang Cacat didasarkan pada pemikiran bahwa dibalik kondisi cacact yang mereka alami masih tersimpan potensi tertentu yang dapat, meskipun sangat terbatas. Atas dasar pertimbangan tersebut maka sepanjang tahun 2005-2009 beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina penyandang cacat meliputi :

1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
2) Pembinaan Penyandang Cacat melalui Loka Bina Karya (LBK)
3) Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Cacat.
4) Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Panti Asuhan/Panti Jompo merupakan lembaga pelayanan terhadap Anak Terlantar/Jompo Terlantar melalui sistem panti. Klien dilayani didalam panti oleh tenaga profesional yang disiapkan oleh manajemen panti. Pelayanan sistem panti dapat diterima oleh klien dengan membayar pelayanan tersebut, sistem ini biasanya digunakan oleh panti swasta yang berorientasi pada *profite*. Sedangkan bagi panti pemerintah biaya pelayanan sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara panti yang dimiiki oleh pemerintah adalah Panti Sosial Asuhan Anak. Panti ini bertujuan memberikan pelayanan kepada anak terlantar agar dapat terpenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya, terutama menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Asuhan Anak
2) Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Panti Asuhan
3) Pelayanan Anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara

f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Penyakit sosial merupakan suatu penyakit dalam masyarakat yang muncul sebagai akibat dari interaksi yang kurang sehat antara individu dengan lingkungan sosialnya. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial diselenggarakan sebagai upaya rehabilitatif terhadap eks penyandang penyakit sosial, sehingga mereka dapat hidup secara selaras dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dimaksudkan untuk memperkuat potensi dan kapasitas para eks penyandang penyakit sosial, sehingga merekadapat melaksanakan tugas kehidupannya dengan baik serta selaras dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang kurun waktu tahun 2005-2009 meliputi :

1) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
2) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
3) Pelatihan dan Magang Bidang Keterampilan (Penyandang Cacat, Eks Anak Nakal, Korban Narkotika dan Eks PSK)

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial merupakan potensi dan sumber yang ada didalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis komunitas. Kelembagaan itu

sendiri dapat berupa suatu lembaga atau kegiatan masyarakat yang sudah melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelembagaan ini pada dasarnya mewadahi partisipasi masyarakat dan dunia usaha, yang nantinya bersama-sama pemerintah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial merupakan program yang bernuansa pemberdayaan, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada. Disamping itu juga dilakukan upaya untuk memperkuat jejaring sosial diantara lembaga-lembaga sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
2) Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
3) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Usia Dini
4) Pembinaan Karang Taruna
5) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku UKS Masyarakat
6) Pembinaan dan Bantuan Organisasi Sosial dan Karang Taruna
7) Rehab Taman Makam Pahlawan dan Monumen Perjuangan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

   Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2005-2009 pada Bidang Sosial

dapat dilihat dari besaran capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Sosial selama tahun 2005-2009 berikut ini. Penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), oleh karenanya kami tampilkan secara bersamaan tabel capaian Indikator Kinerja Kunci dengan tabel data PMKS.

Indikator Kinerja Kunci Sarana Sosial terdapat 13 buah yang masih melaksanakan kegiatannya sampai dengan saat ini. Sarana sosial tersebut berupa panti asuhan untuk anak terlantar, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan yayasan swasta.

Indikator Kierja Kunci Penanganan Penyandang Masalah Sosial dan PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial angka capaiannya mengalami fluktuasi seiring dengan fluktuasi pada data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan dan strategi yang ditempuh pada kurun waktu tersebut menitik beratkan pada pemberian respon terhadap kondisi dan kebutuhan yang muncul pada tahun berjalan. Kebijakan dan strategi ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus mengikuti anggaran yang tersedia, bukannya penyediaan anggaran yang mengikuti kegiatan.

Tabel : 4.32. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2005 - 2009

No	Jenis PMKS	T A H U N				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Anak Balita Terlantar	-	682	-	351	-
2	Anak Terlantar	-	3662	1582	-	789
3	Anak Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah	-	-	30	2	-
4	Anak Nakal	-	-	66	22	-
5	Anak Jalanan	-	-	398	-	-
6	Anak Cacat	-	-	-	61	-
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	2824	85	-	55
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah	-	-	93	1500	14
9	Lanjut Usia Terlantar	-	2729	521	774	770
10	Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah	-	-	-	4	-
11	Penyandang Cacat	-	738	1160	1160	1177
12	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	-	37	149	87	-
13	Tuna Susila	-	-	1259	1112	1211
14	Pengemis	-	-	-	4	-
15	Gelandangan	-	-	-	12	-
16	Bekas Narapidana	-	-	325	85	100
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	47	44	44
18	Keluarga Fakir Miskin	-	1535	17590	900	900
19	Keluarga yang tinggal di Rumah Tak Layak Huni	-	6249	6391	182	190
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	170	-	-	-
21	Komunitas Adat Terpencil	714	498	498	498	528
22	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	-	-	-	630	-
23	Korban Bencana Alam	-	268	26330	15660	152
24	Penyandang HIV / AIDS	-	-	-	2	-
25	Keluarga Rentan	-	-	-	464	459
	J U M L A H	**714**	**19392**	**56524**	**23554**	**6389**

Tabel : 4.33. Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Sosial Selama Tahun 2005-2009

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	13 buah	13 buah	14 buah	13 buah	13 buah
Penanganan Penyandang Masalah Sosial	-	88,08%	32,35%	72,81%	75,99%
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	99,59%	99,82%	99,3%	99,4%

Tabel 4.33. menunjukkan bahwa capaian IKK Penanganan Penyandang Masalah Sosial cenderung mengalami peningkatan, terutama pada kurun waktu 2007 – 2009, yaitu 32.35% pada tahun 2007 menjadi 75.99% pada tahun 2009. Demikian pula dengan capaian IKK PMKS yang memperoleh bantuan, selama tahun 2006 – 2009 berada pada kisaran angka 99%. Kondisi pada tahun 2005 kedua Indikator Kinerja Kunci tersebut tidak dapat diukur sehubungan tidak tersedianya data PMKS yang memadai.

Kemampuan kinerja keuangan bidang sosial selama kurun waktu tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.34. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Sosial selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.250.000.000	500.000.000	40,00

2006	22.416.395.000	21.396.442.755	95,45
2007	12.342.877.140	9.993.573.930	80,97
2008	14.549.120.500	11.926.983.570	81,98
2009	11.680.027.039	10.888.034.225	93,22
2010	15.188.222.438	-	-
Jumlah	77.426.642.117	54.705.034.480	70,65

3. Permasalahan dan Solusi

   Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Sosial adalah sebagai berikut :

   a. Terbatasnya data yang valid. Adanya semacam kebiasaan bahwa setiap kegiatan pendataan akan selalu diiringi dengan datangnya bantuan, seringkali menjadikan data yang terkumpul terkontaminasi oleh berbagai kepentingan dan kurang objektif.
   b. Kurangnya SDM berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Permasalahan ini mengakibatkan penanganan PMKS lebih didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh para senior, dari pada penanganan berdasarkan pendekatan profesional Pekerja Sosial.
   c. Penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial lebih cenderung pada permasalahan yang sudah mencuat saat ini, kurang mempertimbangkan terhadap kecenderungan munculnya permasalahan dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh realitas bahwa kegiatan mengikuti anggaran, sehingga dalam jangka panjang dampaknya berupa pelayanan yang selalu ketinggalan dengan perkembangan permasalahan.

Solusi yang coba dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi :

a. Melakukan kerjasama denga Badan Pusat Statistik dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Solusi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa BPS merupakan satu-satunya badan yang memiliki kompetensi memadai dan memiliki tugas pokok sebagaiinstitusi pengumpul dan pengolah data.
b. Kebutuhan akan SDM berlatar belakang profesi Pekerjaan Sosial diupayakan pemenuhannya melalui mengirimkan pegawai untuk menempuh pendidikan profesi Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Pilihan ini memanfaatkan fasilitasi dari Departemen Sosial RI yang memberikan bea siswa Tugas Belajar bagi pegawai yang bekerja pada ranah kesejahteraan sosial.
c. Berkaitan dengan kebutuhan akan sebuah perencanaan yang baik, maka solusinya adalah dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan Bappeda dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan yang aplikatif dan memungkinkan untuk dicapai.

4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009 menganugerahkan Tropi **"Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Award"** kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penilaian tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kutai

Kartanegara memperoleh predikat **"Terbaik II"** tingkat Propinsi Kalimantan Timur.

xxiii. KEBUDAYAAN

Dalam wacana kebudayaan dan sosial, sulit untuk mendefinisikan dan memberikan batasan terhadap budaya lokal atau kearifan lokal, mengingat ini akan terkait teks dan konteks, namun secara etimologi dan keilmuan, tampaknya para pakar sudah berupaya merumuskan sebuah definisi terhadap *local culture* atau *local wisdom* ini. Sebagai sebuah kajian, kemudian saya pun mempelajari dan mencoba mengaitkannya pada konteks yang ada. Definisi budaya lokal yang pertama saya ambil adalah berdasarkan visualisasi kebudayaan ditinjau dari sudut stuktur dan tingkatannya.

Dilihat dari stuktur dan tingkatannya budaya lokal berada pada tingkat *culture*. Hal ini berdasarkan sebuah skema sosial budaya yang ada di Indonesia dimana terdiri dari masyarakat yang bersifat manajemuk dalam stuktur sosial, budaya (multikultural) maupun ekonomi.

1. Program dan Kegiatan

   Upaya pengelolaan keragaman budaya telah menunjukkan hasilnya, yaitu dilaksanakannya kegiatan strategis untuk mengatasi persoalan bangsa melalui pendekatan budaya. Kegiatan itu antara lain adalah pengkajian terhadap temuan nilainilai budaya, khususnya yang mencerminkan kebersamaan dan integrasi, serta antisipasi terhadap konflik sosial di masa depan melalui kampanye hidup rukun dan analisis tentang konsep masyarakat multikultural.

Guna memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional sehingga mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global, maka telah dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilainilai tradisional yang bernilai luhur. Dilakukan pula sosialisasi dan reaktualisasi etika kehidupan berbangsa, penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan perpustakaan, serta pengembangan minat dan budaya baca masyarakat.

Dalam rangka mengembangkan nilai budaya, telah diterbitkan pedoman *Etika Kehidupan Berbangsa*: *Rumusan dan Program Aksi* yang merupakan penjelasan operasional dari TAP MPRRI No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, sebagai tanggapan terhadap situasi krisis moral dan etika saat ini. Penyusunan Inpres nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dimaksudkan sebagai panduan langkah terpadu bagi sektor yang terkait. Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memperingati "100 Tahun Kebangkitan Nasional" pada tahun 2008 dengan nama kegiatan "Satu Abad Indonesia Bangkit". Penganugerahan penghargaan kebudayaan kepada pelaku dan pemerhati kebudayaan, bertujuan untuk dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional.

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah.

2) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.
3) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
2) Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah.
3) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sebagai daerah yang dikenal dengan kerajaan hindu tertua di Republik Indonesia, serta adanya fanatisme masyarakat terhadap warisan budaya maka sudah sewajarnya jika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempunyai perhatian lebih dalam bidang budaya. Hal ini terlihat dari adanya Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya yang dilakukan rutin setiap tahunnya masing-masing sebanyak 4 kali serta pelestarian terhadap budaya, situs dan kawasan budaya yang pada tahun 2005 sebesar 71% kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 75%.

Tabel 4.35. Indikator Kinerja Kunci Bidang Kebudayaan tahun 2005-2009

No	Indikator Kinerja Kunci	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	71 %	71 %	71 %	75 %	71 %

Demikian juga apabila dilihat dari kaca mata realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka kinerja pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.36. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kebudayaan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2006	1.125.000.000	1.075.630.150	95,61
2007	749.935.000	749.485.000	99,94
2008	5.069.716.000	4.184.560.175	82,54
2009	3.508.482.000	3.480.088.900	99,19
2010	9.860.522.189	-	-
Jumlah	20.313.655.189	9.489.764.225	46,72

3. Permasalahan dan Solusi

   Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kebudayaan.

xxiv. STATISTIK

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Pengembangan Data/Informasi

      1) Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
      2) Pengembangan Sistim Informasi Profil Daerah
      3) Penyusunan PDRB dan Potensi Ekonomi Kecamatan

4) Survey Sosial Ekonomi Daerah

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Statistik ditandai dengan tersedianya data sekunder berupa Buku Kabupaten Dalam Angka; Monografi, Sistem Informasi Profil Daerah dan PDRB serta data hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicapai melalui program Pengembangan Data dan Informasi.

Tabel 4.37. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Statistik selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	693.800.000	693.800.000	100
2006	1.050.000.000	1.049.915.000	99,99
2007	720.012.000	711.126.500	98,77
2008	1.485.000.000	1.477.500.000	99,49
2009	2.356.616.000	2.301.281.460	97,65
2010	2.650.000.000	-	-
Jumlah	8.955.428.000	6.233.622.960	69,61

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang bebarti pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Statistik.

xxv. ARSIP

1. Program dan Kegiatan

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1) Pembuatan Tata Kearsipan

b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1) Penelusuran dan Pemeliharaan Arsip Statis
2) Penelusuran Arsip Visual

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Indikator yang dapat diukur untuk penilaian kinerja sebuah instansi ataupun pemerintahan dalam bidang kearsipan adalah dengan melihat adanya penerapan pengelolaan arsip secara terpadu. Penerapan sistem kearsipan secara terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari SKPD yang sudah menerapkan sistem kearsipan baru pada Badan Arsip dan Perpustakaan.

Sementara apabila dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.38. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Arsip selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	100.000.000	100.000.000	100

2006	712.500.000	642.750.000	90,21
2007	289.758.000	288.949.000	99,72
2008	800.000.000	799.400.000	99,93
2009	405.064.400	255.064.400	62,97
2010	3.444.589.200	-	-
Jumlah	5.751.911.600	2.086.163.400	36,27

3. Permasalahan dan Solusi

   Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penelusuran arsip secara visual.

   Solusinya adalah dengan membangun sebuah sistem kearsipan baik secara statis maupun visual pada setiap SKPD.

xxvi. PERPUSTAKAAN;

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

      1) Pengadaan Bahan Pustaka / Buku-buku Bacaan
      2) Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
      3) Peningkatan Informasi Kepustakaan Melalui Pameran
      4) Seminar Tentang Pengembangan Perpustakaan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam manajemen modern, perlunya pengukuran kinerja telah disadari oleh berbagai kalangan termasuk pula perpustakaan.

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui bidang Perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2009 dirasa masih belum dapat memenuhi standar kecukupan. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang hanya 1,52% dengan jumlah koleksi judul Buku yang tersedia baru mencapai 49,67%.

Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan yang diimplementasikan kedalam Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang hanya mampu merealisasikan anggaran sebesar 57,05% dari alokasi yang tersedia senilai Rp. 1.229.807.900,- atau hanya tereliasasi Rp. 701.627.462,- dengan keluaran berupa Pengadaan Bahan Pustaka / Buku-buku Bacaan 6.000 eksemplar dan Peningkatan Informasi Kepustakaan Melalui Pameran sebanyak 1 kali.

Tabel 4.39. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perpustakaan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	100.000.000	100.000.000	100
2006	1.360.500.000	1.245.749.050	91,57
2007			

2008	2.057.639.800	1.927.261.700	93,66
2009	1.229.807.900	701.627.462	57,05
2010	6.853.370.497	-	-
Jumlah	11.601.318.197	3.974.638.212	34,26

3. Permasalahan dan Solusi

   Kondisi fasilitas dan gedung yang dipergunakan sekarang ini oleh Badan Kearsipan Dan Perpustakaan dalam melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari kurang begitu refresentatif. Impack terhadap pekerjaan kenyamanan, ketenangan dan konsentrasi tidak bisa didapatkan.

   Solusi segera menempati gedung baru dimana fasilitas, kafasitas dan volume gedung memenuhi apa yang diharapkan.

II. URUSAN PILIHAN

i. KELAUTAN DAN PERIKANAN;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan diarahkan untuk :

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

   1) Rehab Pemukiman Nelayan
   2) Pengadaan Jaring Milenium
   3) Pengadaan Fish Finder
   4) Pengadaan Gill Net
   5) Revitalisasi Perikanan Tangkap
   6) Modernisasi Armada Tangkap
   7) Pengadaan Kawat Tempirai

8) Pembuatan Jembatan Pemukiman Nelayan
9) Pembangunan TPI / PPI
10) Pembangunan TPI / PPI DAK
11) Pendamping DAK
12) Pendamping PNPM
13) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan Kota Bangun
14) Pendamping Dana DAK

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

1) Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
2) Pengawasan Pemanfaatan Embung Bekas Tambang Batu Bara
3) Koordinasi Penataan Hukum Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
4) Sosialisasi Pokmaswas
5) Bantuan Musibah Banjir Gulma
6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1) Pengembangan Keramba Jaring Apung
2) Penanggulangan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan
3) Penggemukan Kepiting di Tambak
4) Pengembangan Rumput Laut dan Pembangunan Hatchery Mini
5) Pembangunan Tambak Percontohan, Panti Benih dan Bak Pentokolan udang Galah

6) Pengembangan BBI
7) Revitalisasi Perikanan Budidaya
8) Pengembangan Budidaya Udang Galah dan Gurami
9) Pelatihan Pembenihan Ikan Betutu dan Magang Budidaya udang Galah
10) Bantuan Musibah Air Bangar
11) Pengembangan Kolam Mina Padi
12) Pengembangan Sawah Tambak
13) Pembuatan dan Pengembangan Irigasi Tambak
14) Pelatihan Pembenihan Patin bagi Pembudidaya
15) Peninggian Tanggul Tambak

d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1) Pengembangan Read Down Sattion Satelit Noa dalam mendukung penempatan dan monitoring fishalter di perairan Kukar
2) Penyusunan Renstra Perikanan Kab. Kutai Kartanegara

e. Program Pengembangan Data / Informasi

1) Penyusunan Data Base Ekonomi Perikanan
2) Inventarisasi dan Identifikasi Kelompok Nelayan
3) Pengembangan Perencanaan Pengendalian dan Sistem Informasi Perikanan
4) Pemutakhiran Data Statistik Perikanan

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1) Pameran Industri Bahari

g. Program Peningkatan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati Perairan

1) Penanaman mangrove pada budidaya tambak
2) Penanaman mangrove di Delta Mahakam
3) Pengadaan pakan dan benih ikan nila, ikan mas, lele dumbo, ikan patin untuk kelompok nelayan.
4) Pengadaan pakan dan benih ikan untuk kelompok perikanan.

h. Program Pemberdayaan Kelompok Tani dan Nelayan

1) Pengadaan Kapal dan Mesin untuk Nelayan di Marangkayu.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan transformasi ketergantungan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah melalui bidang Perikanan dan Kelautan yang pada tahun 2009 produksi perikanan mencapai 79,2 % dari target daerah dengan konsumsi ikan mencapai 157,78 %.

Apabila dilihat dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan dan kelautan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.40. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	2.882.412.750	2.879.061.750	99,88
2006	11.619.275.009	8.020.003.900	69,02
2007	14.259.160.650	10.001.921.415	70,14
2008	28.838.086.375	17.387.691.755	60,29
2009	20.495.932.075	15.834.916.407	77,26
2010	21.790.099.136	-	-
Jumlah	99.884.965.995	54.123.595.227	54,19

3. Permasalahan dan Solusi

   Permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

   - Terlambatnya dana yang turun ke dinas sehingga berakibat pada penggeseran jadwal kegiatan yang sudah direncanakan.
   - Akibat masalah keuangan di atas maka berakibat pada kesulitan mencapai target yang sudah ditetapkan karena sektor ini sangat sensitif terhadap pengaruh dari faktor eksternal yaitu musim dan cuaca.
   - Penilaian kinerja baru sampai pada indikator input, output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact belum bisa diukur karena belum adanya parameter untuk pengukurannya.

Solusi :

Strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan adalah dengan cara mengerahkan segenap sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sarana dan prasarana yang ada, mendorong kinerja aparatur, dan meningkatkan koordinasi antar bidang maupun dengan instansi terkait.

Menyusun Rencana Operasional dan Rencana Tindak secara matang dari setiap kegiatan. Rencana Operasional dan Rencana Tindak tersebut digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan.

ii. PERTANIAN;

Pertanian yang merupakan salah satu sektor penting sebagai tulangpunggung Negara dan juga sebagai tolok ukur untuk peningkatan taraf hidup dipedesaan selalu menjadi perhatian sehingga wajar jika Presiden melalui Instruksinya di tahun 2007 untuk melakukan peningkatan ketahanan pangan dengan melalui program dan kegiatan baik yang berupa swa sembada beras, peningkatan mutu, juga peningkatan produksi.

Adapun Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai barometernya pertanian yang menjadi lumbung pangan Propinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk memperhatikan, mempertahankan dan meningkatkan produk produktivitas mutu padi baik itu melalui perluasan areal, bantuan benih dan bibit pertanian dan

mekanisasi pertanian sehingga apa yang telah menjadi visi dan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat diwujudkan.

Keberhasilan dibidang pertanian tidak terlepas dari peran serta pemerintah pusat dan daerah yang juga dukungan luasnya lahan baik tidur dan fungsional, petani, juga peningkatan SDM aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan didalam melakukan pembinaan dan monitoring sehingga indikator peningkatan produksi padi selalu dapat ditingkatkan tahun ke tahun yang juga merupakan Rencana jangka menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Program dan Kegiatan

   Untuk bidang Pertanian sendiri program dan kegiatan disusun berdasarkan dari Rencana Strategis yang disesuaikan dengan kondisi disetiap tahunnya sehingga arah kebijakan dari Pemerintah Daerah selalu dapat di konduksifkan.

   Penyusunan program dan kegiatan yang dimaksud ada yang diluncurkan ketahun selanjutnya ada pula yang mengalami penambahan program untuk mengejar target visi dan misi yang hendak dicapai.

   Adapun program yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan sejak tahun 2005 hingga 2009 pada tujuan dan sasarannya akan tetap sama hanya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berbenah baik itu dalam penyusunan RKA hingga pengalokasian anggaran sesuai dengan kode rekening yang benar dapat dipertanggungjawabkan.

a. Program Pengembangan Data/Informasi

1) Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
2) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Peternakan
3) Survey Investagasi dan Design (SID) Pengembangan Peternakan Sapi Bali

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
4) Pemberdayaan Kelompok Peternak

c. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan pangan karbohidrat dan non karbohidrat dengan primadonanya, yakni padi dengan suatu harapan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lumbung beras di Kalimantan Timur tercapai, sedangkan komoditi unggulan hortikultura adalah durian, rambutan dan pisang. Adapun kegiatan operasional program peningkatan ketahanan pangan diantaranya :

1) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3) Pengembangan Lumbung Pangan Desa
4) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
5) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

6) Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian
7) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
8) Pendampingan Kegiatan Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air
9) Pencetakan Sawah
10) Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian
11) Pendampingan DAK Pertanian
12) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
13) Pembinaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemitraan Petani dan Pelaku Agrobisnis
14) Pendukung Kegiatan APBN

d. Program Pengembangan Agribisnis

Sementara itu program pengembangan agribisnis bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha tanaman pangan dan hortikultura yang berwawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing tinggi, menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan produsen sehingga mendukung pendapatan nasional. Sasaran lain program Pengembangan Agribisnis adalah terbentuknya sentra-sentra produksi unggulan (padi, jagung, durian dan pisang) melalui sistim/pola perwilayahan komoditas.

Kegiatan utama Program pengembangan Agribisnis adalah sebagai berikut :

1) Pemanfaatan pengembangan sentra produksi durian

2) Pengembangan sentra produksi durian, rambutan dan pisang skala agribisnis
3) Pengembangan sentra produksi padi skala agrisnis di Kecamatan prioritas (kantong pangan)
4) Pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian dalam upaya perbaikan kualitas produksi pertanian dan diversifikasi olahan bahan pangan sehingga meningkatkan nilai tambah

e. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Titik berat Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian adalah penyediaan alat mesin pertanian, peningkatan kelengkapan unit teknis (BBP dan kebun buah langka) serta infrastruktur pendukung pengembangan sektor pertanian tanaman pangan. Kegiatan utama program ini adalah :

1) Pengembangan mekanisasi pertanian melalui pola revolfing bersubsidi 50 persen serta pemberdayaan sistim pengembangan jasa alsin (UPJA) terutama alsintan; hand traktor, power thresser, RMU, pompa dan hand sprayer
2) Pengembangan sumberdaya lahan pertanian dalam bentuk optimalisasi lahan dan pencetakan sawah
3) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usahatani, pondok pertemuan, lantai jemur dan gudang penyimpanan benih
4) Penyediaan dan rehabilitasi peralatan data iklim, khususnya alat penakar curah hujan ditingkat lapangan

f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
2) Bantuan Pengadaan Saprodi (Padi, Jagung, Kedelai, Identifikasi, CPOL dan Pembinaan)
3) Bantuan Pengadaan Pupuk (Urea, Superphoa, NPK, Pestisida dan Benih Padi)
4) Pengembangan Kawasan Industri Pangan Berbasis Padi
5) Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit
6) Pengembangan Tanaman Karet Rakyat
7) Pengadaan Bibit Unggul Tanaman Karet Rakyat
8) Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat
9) Perlindungan Tanaman Perkebunan
10) Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat di 13 Kecamatan.
11) Usaha Pembibitan Kelapa sawit dan karet
12) Pengembangan pembibitan sawit sistem home industri
13) Pembibitan karet pola home industri

14) Pembangunan jalan usaha tani dan produksi perkebunan
15) Pemeliharaan tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat
16) Pendukung Tugas Pembantuan Kabupaten.

i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan

j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1) Pembangunan Pintu Air dan Drainase

k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2) Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan
3) Pelayanan Kesehatan Hewan
4) Pengamanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5) Pembinaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
6) Pengadaan Obat-obatan dan Peralatan Medis Peternakan

l. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
2) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Sapi Bali, Babi, Kerbau, Kambing, Ayam Buras.

3) Pengembangan Ternak Ruminansia dan Ternak Non Ruminansia.
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Ternak Kerbau Pada Lahan Ex-Batu Bara.
5) Pengembangan IB da Embrio Transfer.
6) Pengembangan Pakan Ternak.
7) Penataan Data Statistik Peternakan.
8) Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pusat Pembibitan Ternak Kerbau Rawa.

m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
2) Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang Akan Dipasarkan.
3) Peningkatan Pelayanan Usaha dan Permodalan.
4) Pembebasan Lahan Untuk Peternakan Kambing.

n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna.

o. Program Peningkatan Sarana Produksi Hasil Peternakan

1) Pengadaan Bahan Material Pusat Pembibitan.
2) Pengadaan Inventaris Pusat Pembibitan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengembangan Pertanian dalam arti luas merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

sejak dicanangkannya program Gerbang Dayaku. Untuk tahun anggaran 2009 sendiri, pencapaian indikator keberhasilan di bidang Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai 5,17% dengan kontribusi terhadap PDRB dengan migas sebesar 5,43%.

Grafik 4.8. Presentase Produksi Padi atau bahan pangan utama lainnya dan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009.

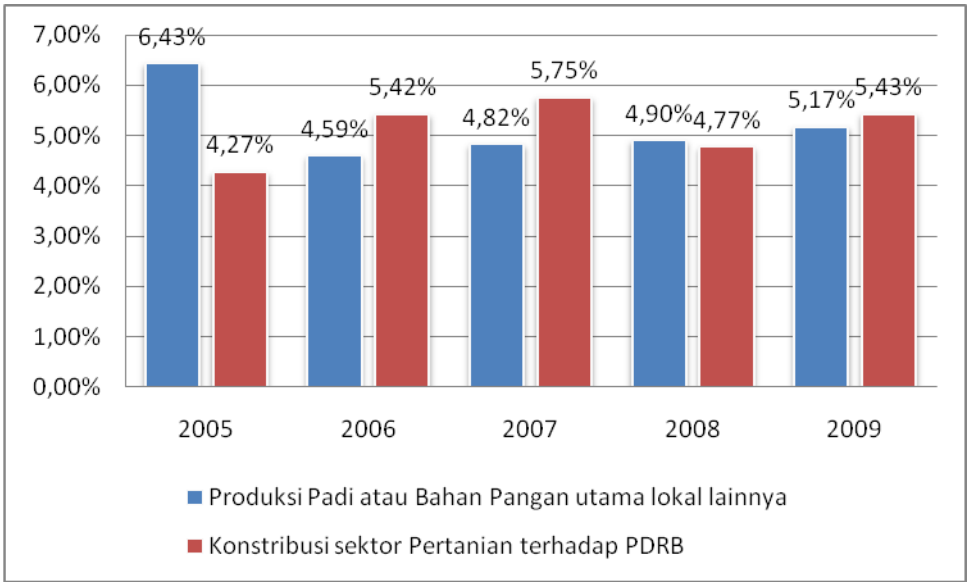

Sementara apabila dilihat berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.41. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pertanian selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	20.877.586.646	10.316.842.000	49,42

2006	62.310.231.360	47.957.134.527	76,97
2007	61.693.829.929	42.679.134.485	69,18
2008	60.716.499.684	47.812.704.480	78,75
2009	97.225.179.822	87.392.295.120	89,89
2010	117.423.473.607	-	-
Jumlah	420.246.801.048	236.158.110.612	56,20

Tabel 4.42. Jenis Komoditi, Produksi dan Hasil Panen Perkebunan Rakyat (PR) Tahun 2005-2009

Jenis Komoditi	Produksi (Kg/Ha)	Hasil Panen (Ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1. Kelapa	670,34	5.907,60	5.907,60	4.759,10	5.712,00	5.020,00
2. K.Sawit	4.158,98	1.470,00	1.740,00	1.998,00	3.697,70	9.854,70
3. Karet	963,33	3.759,60	3.790,00	15.435,50	15.029,00	3.843,50
4. Lada	1.547,78	7.261,50	7.249,50	7.457,00	7.958,75	7.974,95
5. Kakao	1.303,57	383,25	369,75	410,75	300,25	273,75
6. Kopi	612,41	1.231,43	1.198,08	1.632,92	1.255,34	919,84
7. Aren	555,65	21,30	26,45	46,71	96,96	91,96
8. Kapuk	225,61	21,35	21,35	21,35	9,25	9,25
9. Cengkeh	157,14	8,40	9,60	6,80	2,60	1,10
10. Panili	250,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
11.Kayu Manis	150,00	0,50	0,15	0,15	0,15	0,15
12.Kemiri	746,99	262,00	272,03	258,53	114,50	93,00
13. P a l a	-	-	-	-	-	-
14.J. Mete	-	-	16,66	16,66	-	-
15. Pinang	66,67	-	-	-	0,50	0,50
16. Jarak Pagar	310,23	-	-	135,00	94,00	94,00
Jumlah	**11.718,70**	**20.327,43**	**20.601,67**	**32.178,97**	**34.271,50**	**28.176,95**

Tabel 4.43. Jenis Komoditi, Produksi dan Hasil Panen Perkebunan Besar Swasta (PBS) Tahun 2005-2009

Jenis Komoditi	Produksi (Kg/Ha)	Hasil Panen (Ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1. Karet	1.331,50	839,00	839,00	915,13	915,13	1.450,00
2. K. Sawit	11.470,98	251.000,00	251.000,00	254.887,11	254.887,11	242.680,00
3. K e n a f	833,33	-	51,00	67,55	40,00	15,00
Jumlah	**13.635,81**	**251.839,00**	**251.890,00**	**255.869,79**	**255.842,24**	**244.145,00**

Tabel 4.44. Jenis Komoditi, Produksi dan Hasil Panen Perkebunan Besar Negara (PBN) Tahun 2005-2009

Jenis Komoditi	Produksi (Kg/Ha)	Hasil Panen (Ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1. Karet	472,97	119,00	119,00	200,00	200,00	140,00
2. K.Sawit	-				-	-
Jumlah	**472,97**	**119,00**	**119,00**	**200,00**	**200,00**	**140,00**

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang berimplikasi terhadap kegiatan usahatani bidang pertanian tanaman pangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani antara lain :

- Faktor Alam seperti bencana banjir dan kekeringan dikarenakan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengandalkan pada pengairan tadah hujan. Hal inilah yang menyebabkan petani mengalami puso (gagal panen).

- Alih fungsi lahan juga mengkaibatkannya penurunan pada jumlah produksi padi yang ditargetkan pada tiap- tiap tahun.
- Sarana dan prasarana produksi seperti kelangkaan pupuk atau tingginya nilai beli pupuk yang belum terjangkau oleh para petani.
- SDM untuk pengembangan, penggunaan teknologi baik itu mekanisasi pertanian, pupuk berimbang dan pengembangan varietas-varietas unggul nasional lainnya dirasakan kurang
- Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD tidak bertepatan waktunya dengan kegiatan dilapangan
- Kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama akses jalan usahatani dan sarana jalan pedesaan (sentra produksi)
- Ketersediaan lembaga finansial dan fasilitas program dalam pelayanan pendanaan usahatani yang masih terbatas
- Terjadinya perubahan lingkungan usahatani yang kurang mendukung proses produksi yang disebabkan adanya kegiatan usaha non pertanian (kegiatan pertambangan dan perkebunan).

Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan masih terhambat adanya permasalahan yang bersifat teknis baik yang berifat internal maupun ekternal antara lain :

- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke usaha non pertanian sehingga berakibat turunnya luas panen dan produksi
- Ketersedian Sarana Produksi yang relative terbatas ditingkat petani
- Kinerja petugas teknis di Kecamatan yang belum maksimal
- Adanya alih fungsi (transisi) tenaga kerja petani ke sektor non pertanian (sektor jasa, pertambangan dan perkebunan)

Agar kegiatan pertanian tanaman pangan tetap berjalan dengan baik dan sesuai harapan, tentunya perlu adanya penanganan dan tindakan yang konkrit baik bersifat umum maupun teknis dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain ;

- Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengkaji ulang alih fungsi lahan tersebut agar tercapai peningkatan produksi padi dan pendapatan petani
- Mengajukan beberapa kegiatan bantuan baik itu sarana maupun prasarana sehingga target peningkatan produksi padi dapat diatasi
- Mengintensifkan bimbingan dan pembinaan ke Kecamatan maupun desa
- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral guna penanganan masalah degradasi lahan pertanian
- Melaksanakan bimbingan ke kelompok tani dalam upaya mengakses sarana produksi (pupuk)

- Memantapkan mordenisasi pertanian
- Meningkatkan SDM melalui beberapa kegiatan baik itu studi banding, Pembinaan, Pertemuan, hingga uji coba beberapa varietas unggul nasional lainnya

iii. KEHUTANAN;

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif,

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Program dan Kegiatan

   Secara umum kebijakan sektor kehutanan merupakan kolaborasi kebijakan kementerian Kehutanan dan otonami Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalan RENSTRA 2005 -2010 antara lain :

   a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

   1) Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu
   2) Pengembangan Sarana Budi Daya Sarang Burung Walet
   3) Pelatihan Petani Budidaya Burung Walet.
   4) Pengelolaan Hasil Hutan No Kayu
   5) Penyusunan Raperda Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu
   6) Penyusunan Master Plan RHL Tingkat Kecamatan

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Pelatihan Kelompok Tani
2) Pengadaan Hutan Kota
3) Penghijauan Lingkungan
4) Rehabilitasi Kawasan Danau dan Perairan
5) Penunjang Kegiatan Reboisasi Pneghijauan DAK/DR
6) Rehabilitasi Kawasan Delta Mahakam
7) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2) Bimbingan Teknis Pelatihan Petani Perlindungan Hutan dan Lahan
3) Penyuluhan Perlindungan Hutan dan Lahan
4) Inventarisasi Daerah Rawan Gangguan Keamanan Hutan
5) Inventarisasi Kawasan Lindung, Konservasi dan Kawasan Budidaya
6) Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara
7) Studi Kelayakan Pengelolaan terpadu Kawasan Lindung dan Hutan Lindung (Air Terjun Selerong)
8) Penyusunan database kehutanan dan pengadaan peta citra lansat kab. Kukar

9) Penyusunan database kehutanan dan pengadaan peta citra lansat kab. Kukar
10) Orientasi kegiatan batas kawasan
11) Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
12) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Regu Kebakaran Hutan dan Lahan
13) Penanggulangan Kebakaran Hutan

d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

1) Pameran Hasil Hutan
2) Pengawasan dan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan

e. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi)
2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penghijauan Sumber Dana DAK DR)

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang selama ini menjadi andalan sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat di Kutai Kartanegara. Peranan pemerintah dalam sektor kehutanan terlihat dari capaian kinerjanya dalam hal Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Pada tahun 2005 rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya mencapai 3,74 % sedangkan tahun 2009 menurun menjadi

1,62%, sementara kerusakan lahan hutan tahun 2009 sebesar 38,28 %.

Tabel 4.45. Capaian kinerja bidang kehutanan tahun 2005-2010

Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis	**3,74 %**	**32,59 %**	**3,87 %**	**29,34 %**	**1,62 %**
Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	**38,28 %**

Jika ditilik berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.46. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Kehutanan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	13.249.749.000	906.938.000	6,84
2006	15.145.799.670	11.742.650.570	77,53
2007	46.505.953.040	10.623.149.580	22,84
2008	20.582.616.302	8.469.257.725	41,15
2009	27.741.355.789	21.246.755.377	76,59
2010	31.442.312.225	-	-
Jumlah	154.667.786.026	52.988.751.252	34,26

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan ;

1. Capaian kinerja masih rendah dikarenakan realisasi dari sumber dana DAK-DR belum bisa maksimal (Tahun 2005, 2006 kuncuran terlambat).
2. Pengelolaan sektor Kehutanan tidak bisa lepas dengan kebijakan Kementerian Kehutanan (pusat) sementara sumber anggaran kegiatan SKPD Dinas Kehutanan APBD dan DAK-DR/DBH dan Tata waktu pencairan dana sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan Pemkab
3. Penegakan hukum masih lemah dibidang kehutanan dan keproyekan.
4. Dampak dari keterbatasan pencairan dana mempengaruhi pendeknya waktu kegiatan sehingga realisasi kegiatan dan fisik kegiatan kurang maksimal.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sebagai objek kegiatan belum optimal sehingga berpengaruhi tingkat keberhasilan kegiatan.
6. Realisasi anggaran mulai efektif awal triwulan III yang berdampak luas pada realisasi keuangan dan pekerjaan.
7. Kurang optimal dalam sinkronisasi, koordinasi dalam menilai kinerja kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan APBN DAK-DR.

Solusi ;

1. Perencanaan kegiatan yang komprehensif, tansparan, akuntabel dan proposional
2. Meningkatkan komitmen Penegakan Hukum secara utuh, menyeluruh.

3. Optimalisasi realisasi pencairan Anggaran cepat dan tepat
4. Peningkatan SDM aparatur dan pelaksana kegiatan melalui Pendidikan maupun Pelatihan
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi secarra internal dan ekternal terhadap semua pemangku kebijakan serta pelaksana kebijakan.

iv. ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1. Program dan Kegiatan
   a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
      1) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
      2) Monitoring Batas Wilayah KP
      3) Survey dan Memetakan Data Geologi, Geografi, Geodesi
      4) Inventarisasi Potensi dan Cadangan Bahan Galian Pemegang Izin KP
      5) Monitoring dan Evaluasi Lahan Pasca Tambang
      6) Monitoring Pelaksanaan UKP/UPL dan RKL/RPL Kegiatan Pertambangan Umum dan Energi
      7) Analisis Pengembangan Lahan Pasca Tambang di Kaitkan Dengan Rencana Penutupan Tambang dan Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
      8) Pembinaan dan Evaluasi Perizinan Migas
      9) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Air Bawah Tanah/Air Permukaan
      10) Pengawasan Distribusi BBM

11) Inventarisasi Fasilitas WKP Migas di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
12) Pelaksanaan Inspeksi K3
13) Pelaksanaan Inspeksi Pengelolaan Lingkungan
14) Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Pertambangan Umum
15) Monitoring Produksi dan Penjualan Batubara

b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1) Pameran Pembangunan dan Expo Dalam Daerah dan Luar Daerah

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian
2) Pengelolaan Penilaian Angka Kredit (PAK) Kenaikan Pangkat Inspektur Tambang

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

1) Pengadaan Solar Light
2) Biaya Pemeliharaan Rutin dan Operasional PLTD
3) Pengadaan dan Biaya Pemasangan Perawatan Berkala W4, W5 dan W6 PLTD
4) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kelistrikan
5) Inventarisasi Keperluan Energi Listrik Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
6) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik
7) Pemindahan Tiang Listrik di Kecamatan Kota Bangun Seberang

e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

f. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kontribusi sektor pertambangan yang sebesar 85,84% dari total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 menunjukkan masih dominannya peranan sektor tersebut. Dalam hal ini tujuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pada sektor migas untuk beralih ke sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata daerah masih jauh dari harapan.

Grafik 4.9. Kontribusi Sektor Pertambangan pada pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009

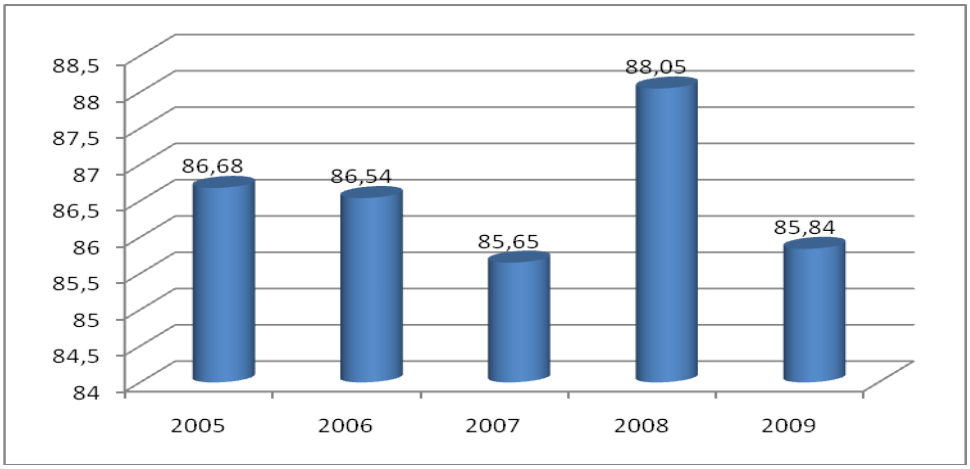

Kenyataan tersebut ditambah dari kurang maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2005 - 2010 yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.47. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Energi dan Sumber Daya Mineral selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	912.500.000	-	-
2006	2.053.700.000	1.169.036.200	56,92
2007	3.262.779.016	2.625.801.716	80,48
2008	25.152.492.666	19.749.688.800	78,52
2009	34.970.827.875	8.006.282.500	22,89
2010	17.787.619.514	-	-
Jumlah	84.139.919.071	31.550.809.216	37,50

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009, kecuali ada beberapa kegiatan yang dialokasikan pada APBD-P tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

v. PARIWISATA;

Pariwisata mengambil peranan penting dalam upaya melestarikan yang diaplikasikan tanpa mengubahnya pada saat ini sudah dikemas dalam bentuk even yang bersifat festival

tradisional daerah yang dikomunikasikan dalam bentuk kalender event/festival, seperti di Bali dan Jawa secara seremonial eksistensi budaya tetap terjaga dengan keberadaan kegiatan perayaan agama, drama tarian dan kostum didukung instrumen alat seni pukul dan tiup yang dibuat dari bambu atau kayu seperti gamelan, angklung dan suling yang ditampilkan sendiri atau dengan alat seperti wayang orang atau wayang kulit. Sebagai hasil cindera mata yang cukup terkenal seperti batik, perak dari Jawa, lukisan dari Bali, dan masih banyak lagi hasil kerajinan masyarakat seperti dari Sumatera, Sulawesi dan Papua. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman menarik.

Selain hal diatas, masyarakat memiliki menu makanan utamanya seperti nasi, jagung, sagu hingga kentang, walaupun mayoritas sudah makan nasi tapi didaerah tertentu masih dipertahankan. Dalam pengolahannya masakan dari Sumatera dan Sulawesi memiliki rasa lebih pedas dibanding daerah lainnya, namun tergantung dengan budidaya rempah-rempah masing-masing daerah.

Masyarakat Indonesia dikenal sopan dan hangat dengan keberadaan salam perkenalan dengan berjabat tangan baik untuk pria atau wanita dengan ciri khas nasional sambil tersenyum. Keramahtamahan ini yang selalu menjadi kunci dalam pelayanan bagi pengunjung dalam menikmati keindahan Indonesia.

Agar optimal dalam pembangunan pariwisata dengan slogannya yang dikenal dengan *"ultimate in diversity",* maka dalam pengemasan produk wisata selain mengidentifikasi daya tarik juga perlu menyiapkan fasilitas berupa jaringan perhubungan dan informasi agar selalu ditingkatkan. Walaupun sebagian kota besar sudah dilengkapi dengan pusat bisnis hingga akomodasi

bertaraf internasional yang ditunjang dengan dukungan sumber daya manusia yang ahli dan berstandar internasional agar memiliki nilai daya tarik

Sebagai implementasi terhadap prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata, maka pada tahun 2009 pelaksanaan program diarahkan pada program **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** dengan kegiatan sbb :

1. Program dan Kegiatan
   a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
      1) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
      2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
      3) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

   b. Program Pengelolaan Obyek Wisata

      5) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
      6) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
      7) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepariwisataan
      8) Monitoring/Penertiban Perijinan di Bidang Pariwisata

   c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
      1) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
3) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dibidang Pariwisata
4) Monitoring / penertiban perijinan dibidang pariwisata.
5) Penataan Kawasan Obyek Wisata Waduk Sukarame .
6) Bantuan Pembenahan Obyek-Obyek Wisata/Daerah Tujuan Wisata dalam rangka Tahun Kunjungan Wisata
7) Redesign Patung Lembu Suana di Pulau Kumala

d. Program Pengembangan Kemitraan

1) Bimbingan Teknis bidang Perhotelan
2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah kunjungan wisata yang pada tahun 2005 mencapai 5.077 orang, kemudian tahun 2006 turun menjadi 4.665 orang, tahun 2007 sebanyak 5.554 orang, sedangkan tahun 2008 sebanyak 28,953 orang dan pada tahun 2009 mencapai 287.259 orang. Walaupun demikian kontribusinya terhadap PDRB selama lima tahun masih sangat rendah karena hanya sebesar 0,01 %.

Demikian halnya apabila ditinjau dari segi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.48. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Pariwisata selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.840.520.000	1.340.000.000	72,81
2006	21.011.100.000	17.038.796.871	81,09
2007	69.334.641.067	23.682.318.294	34,16
2008	23.769.522.250	18.152.943.297	76,37
2009	16.211.044.600	10.945.269.025	67,52
2010	22.590.958.640	-	-
Jumlah	154.757.786.557	71.159.327.487	45,98

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Masih lemahnya SDM yang tersedia dalam hal pembinaan sektor wisata
- Lemahnya koordinasi lintas sektoral
- Belum adanya kerjasama antar pelaku usaha sektor wisata
- Sarana dan prasarana kerja yang belum refresentatif untuk menunjang kegiatan kepariwisataan
- Sering bergantinya pucuk pimpinan.

Solusi :

- Meningkatkan kemampuan SDM Pembinaan di sektor wisata
- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral secara berkala

- Memfasilitasi para pelaku sektor usaha pariwisata sesuai dengan kompetensinya.
- Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana dan prasaran sesuai kebutuhan

vi. INDUSTRI

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1) Bimbingan Teknis Pengembangan Produksi Kerajinan
2) Pengembangan Industri Energi Alternatif

b. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial

1) Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Pasar Desa di Kecamatan Samboja

c. Program Pengembangan Kelembagaan Industri Kecil Menengah

1) Bimbingan usaha dan produksi industri rumah tangga dan kecil
2) Pengawasan Teknis Kegiatan Industri
3) Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Industri
4) Pembinaan DEKRANASDA

d. Program Pengembangan Kemampuan Teknologi dan Produksi

1) Perencanaan Teknis Pengembangan Kompetensi Inti dan Industri Unggulan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pertumbuhan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2005 sampai tahun 2009 berturut-turut mencapai 4,41 %, 4,32 %, 5,77 %, 1,67 % dan 2,92 % dengan kontribusi pada PDRB sebesar 1,24%.

Grafik 4.10. Kontribusi Sektor Industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009

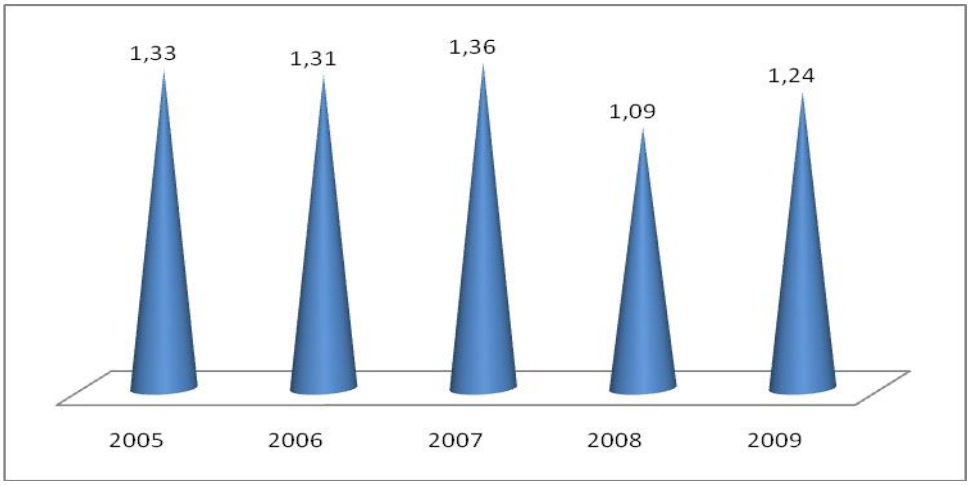

Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.49. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Industri selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.574.500.000	824.500.000	52,37
2006	3.115.000.000	1.129.376.100	36,26

2007	6.051.498.500	2.311.854.816	38,20
2008	2.853.073.625	603.114.725	21,14
2009	3.756.670.550	2.756.812.450	73,38
2010	3.676.820.000	-	-
Jumlah	21.027.562.675	7.625.658.091	36,27

3. Permasalahan dan Solusi

   Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009.

vii. PERDAGANGAN

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

      1) Pengawasan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan
      2) Pengawasan dan Penerbitan TDP
      3) Identifikasi Sembako, BBM, Semen, Bahan Bangunan dan Gas Elpiji
      4) Pengembangan Promosi/Expo Dalam Negeri
      5) Operasi Pasar Sembako
      6) Peningkatan Peluang Investasi Usaha Perdagangan
      7) Pengawasan Peredaran Barang Kadaluawarsa & Barang Terlarang
      8) Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen
      9) Identifikasi Profil Komoditi Daerah

10) Identifikasi Pengembangan Perdagangan
11) Sinkronisasi Pengembangan Perdagangan Antar Pulau
12) Identifikasi Alat UTTP
13) Sidang Tera Ulang Alat UTTP

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1) Pengembangan Pasar Desa Loa Janan
2) Pembinaan Industri Berwawasan Lingkungan

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

1) Pendataan Komoditi Eksport Daerah
2) Pengembangan Eksport Non Migas Panjatapda Satgas Pemasaran Kab.Kukar
3) Promosi/Expo Luar Negeri

d. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

1) Pengembangan Perdagangan Internasional
2) Identifikasi Pendukung Pengembangan Perdagangan Internasional

e. Program Peningkatan Kualitas Pemantapan UMKM

1) Pemantapan UMKM
2) Peningkatan Badan Pelayanan Umum Daerah

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif kecil, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB tahun 2009 yang hanya sebesar 4,88%.

Grafik 4.11. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009 (tanpa Migas)

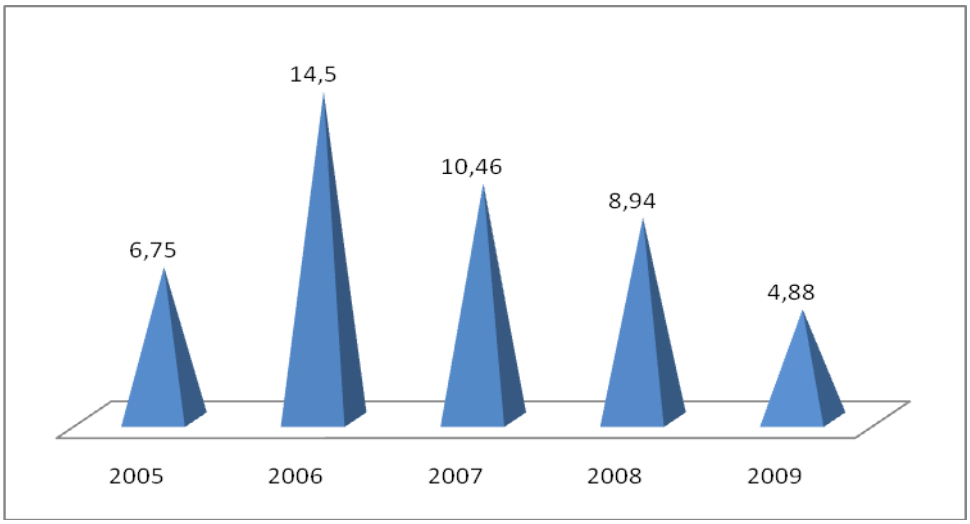

Sementara itu kinerja bidang Perdagangan dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dicinci sebagai berikut :

Tabel 4.50. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perdagangan selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	1.130.000.000	1.130.000.000	100
2006	1.440.000.000	1.160.751.431	80,61
2007	3.851.650.000	1.136.651.550	29,51

2008	6.777.792.010	2.604.583.600	38,43
2009	3.091.853.000	2.806.625.600	90,77
2010	23.636.626.355	-	-
Jumlah	39.927.921.365	8.838.612.181	22,14

3. Permasalahan dan Solusi

   Tidak ada permasalahan dalam pelaksanan program dan kegiatan selama tahun 2009.

viii. KETRANSMIGRASIAN

1. Program dan Kegiatan

   a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

   Tujuan program ini adalah untuk pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

   Adapun implementasinya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang secara garis besar adalah sbb :

   1) Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan.
   2) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

3) Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi.
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi.
5) Peningkatan UPT Desa.

b. Program Transmigrasi Lokal

Tujuan program ini adalah untuk mengurangi kesenjangan perlakuan pembinaan yang dilakukan pemerintah utamanya antara masyarakat lokal dan pendatang dalam upaya pemanfaatan potensi lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus kegiatan diarahkan pada :

1) Identifikasi Potensi Lahan dan Pemantapan Rencana Lokasi Pengembangan Transmigrasi dan Penataan Masyarakat Lokal.
2) Penyiapan Permukiman Masyarakat Lokal Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

c. **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Tujuan program ini adalah untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumberdaya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya

diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.

Kegiatan program ini adalah :

(1) Fasilitasi dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah cepat tumbuh.

(2) Peningkatan kapasitas SDM, Pemda dan masyarakat transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh.

(3) Fasilitasi pengakhiran status bina permukiman transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja pada bidang ketransmigrasian Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlihat dari adanya indikator kinerja kunci berupa transmigran swakarsa.

Grafik 4.12. Capaian indikator Kinerja kunci bidang Ketenagakerjaan tahun 2005-2009

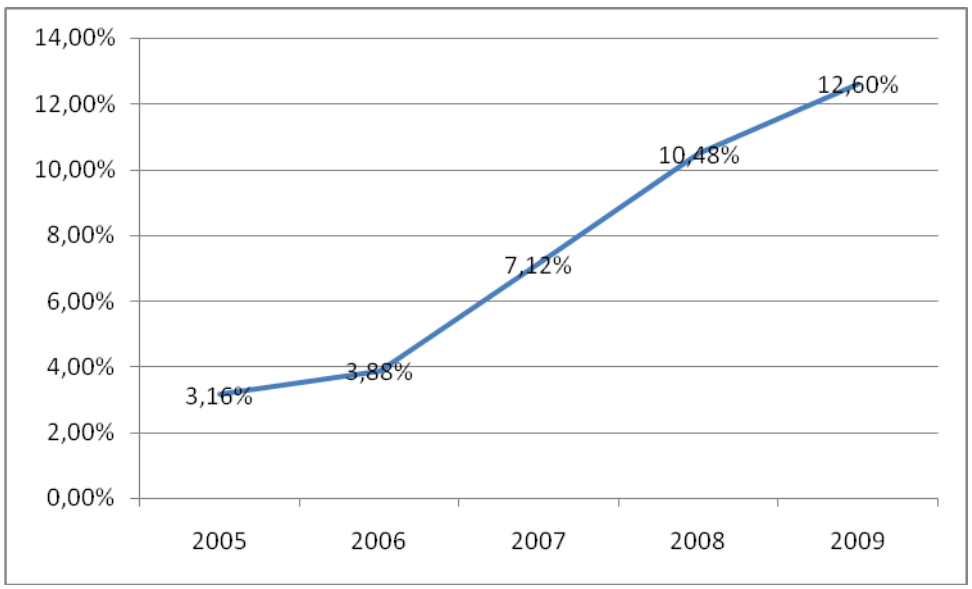

Realisasi program dan kegiatan di bidang transmigrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.51. Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Ketransmigrasian selama Tahun 2005-2010.

TAHUN ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN		
	Alokasi	Realisasi	%
2005	3.538.835.830	1.214.688.000	34,32
2006	3.625.405.000	2.713.391.850	74,84
2007	7.538.547.740	5.074.081.390	67,31
2008	8.520.540.930	5.995.331.399	70,36
2009	6.833.047.000	5.534.658.600	81,00
2010	2.479.533.000	-	-
Jumlah	32.535.909.500	20.532.151.239	63,11

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal mengingat ketersediaan lahan yang saat ini diperuntukkan/ lebih diutamakan untuk sektor perkebunan dan pertambangan Pembangunan permukiman dan penataan penduduk miskin sampai dengan tahun 2009 baru dapat membangun rumah layak huni sebanyak 513 unit atau sebesar 12,60% dari target kinerja selama 5 tahun sebesar 2500 unit, hal ini diakibatkan keterbatasan dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Solusi yang dilakukan yaitu tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah diharapkan secepatnya melakukan

upaya-upaya persuasip kepada penduduk sekitar yang mengklaim tanah warisan nenek moyang agar didapat pemecahan masalah yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan pemantapan program aksi dilapangan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang beranggotakan beberapa SKPD untuk menetapkan pola penanganan kemisikinan yang tepat dengan persetujuan seluruh anggota TKPKD dengan disesuaikan dengan dukungan dana pada masing-masing SKPD dalam melaksanakan Tupoksi setiap SKPD

4. Hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan

   Kedepan program transmigrasi masih perlu dilakukan mengingat jumlah migrasi dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan angka peningkatan sehingga hal ini perlu ditangani secara arip agar tidak menimbulkan akses social yang dapat menunggu stabilitas pembangunan di Kutai Kartanegara.

   Pertambahan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan rusaknya tata ruang yang ada, kekumuhan lingkungan dan meningkatnya angka kriminal.

BAB V.
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A.1. DASAR HUKUM

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/ Departemen Teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksudkan dana tugas pembantuan memiliki diskripsi sebagai berikut :

- Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat
- Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/atau desa
- Kepala Daerah memeberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD
- Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian /lembaga
- Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada

daerah

- Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik
- Tidak memerlukan dana pendamping
- Saldo kas dikembalikan ke kas umum negara

Sedangkan menurut PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah "Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu"

A.2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Sejak tahun anggaran 2006 hingga tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dana bantuan tugas pembantuan dari dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

- Departemen Kesehatan
- Departemen Pertanian
- Departemen Peternakan
- Departemen Perkebunan dan Kehutanan
- Departamen Perikanan dan Kelautan
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Sosial
- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Pekerjaan Umum

- Departemen Perhubungan
- Dirjen Pemberdayaan masyarakat desa

A.3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN

Tugas Pembantuan yang diberikan dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain :

- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Transmigrasi
- Dinas Sosial
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Peternakan
- Dinas Perkebunan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kehutanan
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- Balitbangda
- Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Badan Kesbanglinmas
- BPKD
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab
- Badan ketahanan pangan dan penyuluhan
- Bagian Ekonomi Setkab
- Bagian Perlengkapan Setkab.
- RSU AM Parikesit

A.4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

a. Program yang dilaksanakan pada tugas pembantuan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2006-2009 terdiri dari :

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
2. Program pembinaan anak terlantar
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
4. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
5. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
6. Program obat dan perbekalan kesehatan
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
8. Program Pengembangan Agribisnis
9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
10. Program peningkatan Kesejahteraan Petani
11. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
12. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
13. Program Pengemb. dan Wilayah Strategi dan cepat tumbuh
14. Program Perlindungan dan Pengemb. Lembaga Tenaga Kerja

15. Program Pengemb. Anak Usia Dini
16. Program Wajib belajar Pend. Dasar Sembilan Tahun.
17. Program Pendidikan Non Formal
18. Program pembangunan jalan dan jembatan
19. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
20. Program pendidikan anak usia dini
21. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun
22. Program pendidikan menengah
23. Program pengembangan budidaya perikanan
24. Program pengembangan kemitraan
25. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
26. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan.
27. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
28. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
29. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
30. Program upaya kesehatan masyarakat
31. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
32. Program pengembangan perikanan tangkap
33. Program rehabilitasi hutan dan lahan
34. Program penataan administrasi kependudukan
35. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
36. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
37. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
38. **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan**

39. Program pengembangan sumber daya perikanan
40. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
41. Program social kemasyarakatan
42. Program pendidikan politik masyarakat
43. Program pengembangan wilayah transmigrasi
44. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
45. Program pengembangan pengelolaan konservasi laut dan pengairan
46. Program pembangunan rehabilitasi gedung sekolah dasar
47. Program rehabilitasi berat gedung sekolah SMP/MTs
48. Program peningkatan pelayanan angkutan
49. Program pembangunan sarana dan prasarana olah raga
50. Program pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan

b. Kegiatan yang dilaksanakan pada tugas pembantuan selama periode 2006 – 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari :

- Bantuan Korban Bencana
- Pelayanan Penyandang Cacat
- Kegiatan Pelatihan Bimbingan Sosial dan Keterampilan Eks Narapidana
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Bantuan
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Anak Nakal
- Kegiatan Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah
- Kegiatan Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga Muda Mandiri (KMM)
- Bimbingan dan Bantuan Sosial Fakir Miskin
- Pelatihan Anak Jalanan Melalui Praktek Belajar Kerja (PBK)
- Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Bimbingan Kewirausahaan UEP Lanjut Usia
- Bimbingan Motivasi Korban Tindak Kekerasan
- Bantuan KUBE Lanjut Usia
- Bantuan Peralatan Pendidikan Anak Jalanan
- Bantuan Alat Bantu Bagi Lanjut Usia
- Bantuan UEP Lanjut Usia
- Bantuan Permakanan Panti Asuhan Anak
- Bantuan Sarana Operasional Panti Asuhan Anak
- Bantuan Sarana Penunjang Panti Asuhan Anak
- Bantuan Kelompok Barmain
- Bantuan Tambahan Permakanan Organisasi Sosial yang menangani Anak Terlantar
- Penyantunan Penyandang Cacat dan Tuna Susila (Bimbingan Keterampilan Wanita Tuna Susila)
- Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Sarana Pembuatan Kue
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Ketahanan Sosial Keluarga dalam Penanggulangan Traffiking / Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan
- Praktek Belajar Kerja (PBK) Wanita Tuna Susila
- Bimbingan Sosial Anak Jalanan
- Pembangunan Rumah Pejuang Sanga-Sanga
- Pengadaan obat-obatan
- Pembangunan Ruang Perawatan Kelas III
- Pengemb. Agribisnis Peningkatan Ketahanan Pangan
- Peningkatan Ketahanan Pangan

- peningkatan Kesejahtraan Petani
- Pengembangan Agribisnis
- Pengembangan Pertanian
- Bantuan Hand Tractor untuk kelompok Tani Marang Kayu (Pengembangan Mekanisasi Pertanian)
- Bantuan Ternak sapi Kec. Ma. Kayu
- Pengadaan Bibit Sapi di Kec. Samboja
- Peningkatan Ketahanan Pangan
- Bantuan Bibit Karet untuk Kelompok Tani Badak Makmur Desa Badak Ulu Muara Badak
- Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
- Pengemb. dan Wilayah Strategi dan cepat tumbuh
- Perlindungan dan Pengemb. Lembaga Tenaga Kerja
- Pengembangan Transmigrasi (lanjutan)
- Pengembangan Anak Usia Dini
- Wajib belajar Pend. Dasar Sembilan Tahun.
- Pendidikan Non Formal
- Pembangunan Merry Go Round & Mini Bumper
- Pembangunan Sky Tower (Lanjutan)
- Peningkatan Jl. Ma. Wis- Ma. Muntai
- Peningkatan Jl. Ds. Sebuntal Kec. Ma. Kayu
- Pemb.Jalan Penghubung Antara Jonggon C dengan Jonggon D 3,5 Km
- Peningkatan Jalan Desa UPT.Rapak Lambur2,5 Km
- Penyelesaian Jalan Desa Bunga Putih Kec. Ma. Kayu
- Renovasi Jembatan di Kec. Muara Muntai
- Pengembangan Perguruan Tinggi Unikarta (Lanj)
- Renovasi SMPN 2 KP. Baru Tenggarong
- Pembuatan Pagar SDN 004 Tenggarong.
- Pengadaan Meubelair SMPN 2 Tenggarong

- Pengurukan SDN 032 Tenggarong
- Rehab dan Pembangunan 3 RKB SDI Muara Muntai
- Rehabilitasi Peralatan dan Aula SDN 001 Muara Muntai
- Bantuan Perguruan Muhammadyah Tgr
- Pemagaran Universitas Kutai Kartanegara
- Rehab dan Pembangunan 2 RKB SMK HWM Muara Muntai
- Lanjutan Pembuatan Saluran Induk Irigasi Rapak Penjuluk Kel.
- Pembangunan Stadion Olah Raga
- Pembangunan Stadian Balap Sepeda Mangkurawang
- Bantuan Pengembangan Sarana Perkantoran PEMKAB KUKAR (KANTOR BAPPEDA)
- Penurapan Sheet File Beton Ds. Loa Tebu
- Pengembangan Perikanan
- Paket Tenologi Ikan Betutu Kec. Ma. Muntai
- Penelitian Situs Cagar Budaya Muara Kaman
- Air Bersih Loa Janan/Loa Duri (Lanjutan)
- Pengadaan & Pemasangan PLTS (Lanjutan)
- Normalisasi & Pembersihan Alur Sungai (5 Kecamatan)
- Pemeliharaan Bendungan & Normalisasi Saluran Primer & Sekunder (4 Kecamatan)
- Normalisasi Saluran Pembuangan di Kec. Marangkayu
- Pembersihan/Pemeliharaan, Pendalaman Danau Semayang & Melintang
- Pembangunan Ruas Jalan Muara Belayan (20 Km)
- Pembangunan Ruas Jalan Sungai Siring - L2 Tenggarong Seberang (24 Km)
- Pembangunan Jalan Muara Belayan - Pela ke Muara Wis (15 Km)
- Pembangunan Jembatan Kutai Lama Kec. Anggana

- Penataan Lingkungan Perumahan & Pemukiman di Tenggarong
- Pembangunan Jalan Tembus Muara Muntai - Muara Wis (Lanjutan)
- Pemb. Jalan Pendekat ke Jembatan Ing Martadipura
- Peningkatan air bersih di Sebulu
- Peningkatan air bersih di Marangkayu
- Pembuatan jaringan Irigasi Desa Santan Ulu-Semangkok-Kersik Kec. Marangkayu
- Pembuatan pintu air di Handil 8 dan Handil 9 Kec. Muara Jawa
- Pembuatan sumur pompa 200 Unit di UPT Jonggon
- Pembuatan parit jalan penghubung Desa Gas Alam I Desa Badak Baru
- Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Gas Alam Badak I
- Peningkatan jalan Desa Samber Baru Kec. Marangkayu
- Peningkatan jalan dan jembatan di Handil D (Terusan) Kec. Anggana
- Peningkatan jalan RT. 03 sampai dengan RT. 25 Marangkayu II
- Peningkatan jalan Sungai Siring - L2 Tenggarong Seberang
- Peningkatan jalan dari Muara Leka ke Muara Muntai
- Penunjang Sarana dan Prasarana Satuan Baterai Armed Kodam VI TPR
- Pembangunan Asrama Atlit
- Pembangunan Stadion Madya
- Pembangunan Gedung Beladiri
- Pembangunan Multi Function Sport Hall
- Bantuan Pengembangan Sarana Perkantoran PEMKAB KUKAR (KANTOR BAPPEDA)

- Peningkatan Jalan Desa Selerong - Kec. Sebulu menuju Desa Rantau Hempang Kec. Muara Kaman
- Pembangunan Jembatan Timbang
- Pembuatan & Pemasangan Rambu-Rambu Jalan
- Pengembangan Listrik Pedesaan
- Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
- Kebijakan Manjemen Sumber Daya Kesehatan (PHP-III Work Bank)
- Pembangunan Gedung
- Peningkatan Pusban Menjadi Puskesmas Induk di Km 38 Samboja
- Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
- Pengadaan Fasilitas Rawat Inap RSU AM - Parikesit
- Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Muara Muntai
- Bantuan Peralatan Puskesmas di Marangkayu (Jalan Raya Bontang - Samarinda)
- Penambahan RKB SMAN 1 Muara Kaman, SMAN 1 Kota Bangun, dan SMAN 1 Marang Kayu
- Pembangunan USB SMP Muara Muntai
- Pemeliharaan Fasilitas Sekolah Dasar Negeri 180 Sekolah
- Bantuan Perguruan Muhammadiyah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bantuan Pembangunan SMP Loa Ipuh
- Penambahan Ruang Belajar SMPN 4 Loa Duri
- Bantuan Kepada SMK HWM Muara Muntai (Yayasan Muara Muntai Membangun)
- Pengadaan Alat-alat Peraga Matematika SLTP
- Pengadaan Alat-alat Peraga Matematika SLTA

- Bantuan Rehabilitasi Gedung TK, SD, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB
- Bantuan kepada SDN 008 Desa Salo Palai Kec. Ma. Badak
- Bantuan kepada SMKN di SP3 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman
- Bantuan kepada MTS. Hidayatul Mubtadin Kec. Muara Kaman
- Bantuan kepada SDN 019 Desa Handil (Terusan) Kec. Anggana
- Bantuan Sarana dan Prasarana UNIKARTA Kukar
- Pengadaan Lab. Bahasa dan Lab. Komputer Unikarta
- Peningkatan SD/SMP/SMA Kec. Ma. Badak Kukar
- Peningkatan SD/SMP Kec. Marangkayu Kukar
- Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian
- Pengembangan Pembenihan/Perbibitan
- Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian
- Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian
- Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Pengembangan Usaha Tani Komoditas Bernilai Tinggi/Pengutuhan Sentra Komoditas Unggulan Bernilai Tinggi

- Bantuan untuk Kelompok Tani di Kec. Muara Badak ("Rizky Alam" Salo Palai, "Sinar Harapan Sejahtera" Saliki, "Timbul Makmur" T. Limau, "Padaidi" Gas Alam)
- Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan
- Pengembangan Kelapa Sawit 250 Ha
- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir
- Pengembangan Perikanan Perairan Umum di 6 Kecamatan
- Pembangunan TPI di Desa Semangkok Kec. Marangkayu
- Bantuan Perahu Nelayan di Desa Sebuntal Kec. Marangkayu
- Bantuan Pengembangan Himpunan Nelayan Tradisional Mardalu Muara Badak
- Peningkatan Populasi Ternak
- Bantuan Bibit Sapi Kepada Masyarakat di Kec. Muara Jawa
- Bantuan Bibit Sapi kepada Kelompok Tani Sumber Rezeki-Kahala Kec. Kenohan
- Rehabilitasi Kawasan Delta Mahakam
- Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PLS-3 Lembaga)
- Bantuan kepada Kantor/Dinas/Badan Kependudukan Kab/Kota untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4)
- Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri
- Pengembangan Sistem dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri
- Penyelenggaraan Padat Karya Produktif

- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan
- Bantuan Pengembangan Mesjid Al-Istiqomah Kec. Loa Janan
- Bantuan Pesantren Kilat
- Bantuan kegiatan KKG PAI (Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam) MI/SD
- Bantuan kegiatan KKG Umum MI
- Bantuan MGMP PAI (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
- Bantuan MGMP Umum MTS
- Bantuan K3M (Kelompok Kuri Kulum Mata Pelajaran) MI Se-Kalimantan
- Bantuan K3M (Kelompok Kurikulum Mata Pelajaran) MTS Se-Kalimantan
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- Pembuatan Pintu Air Sungai Marang Kayu
- Pembuatan Drainase Desa Muara Badak Ulu
- Pembuatan Jalan Akses Perkebunan Rakyat Desa Muara Badak Ulu
- Pengerasan Jalan Km 7 ke Km 10 Desa Sebuntal
- Semenisasi Jalan Kasturi Rt. 06 Desa Anggana
- Pengerasan Jln Tani Jaya-Surya Bhakti & Pemb. Gedung Serba Guna Ds. Batuah Loa Janan
- Pembuatan Jembatan Ulin Desa Muara Badak ulu
- Semenisasi Jalan Lingkungan Rt. 01 s/d 04 Desa Salo Palai Kec. Ma Badak
- Pembuatan Kanal Penghubung 2 Km Desa Tunjungan-Desa Sabintulung Kec. Ma Kaman

- Kegiatan SID, FS dan DED Pembangunan Pelabuhan Samboja Kuala
- Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Ing Marta Dipura File On Slab
- Lanjutan Pembuatan Jalan Penghubung Desa Gas Alam-Desa Badak Baru
- Pembuatan Trotoar Jl. KH. Dewantara Ds. Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar
- Peningkatan Jln. Ds. Manunggal Daya Dusun Panji RT. 16 Kec. Sebulu Kab. Kukar
- Pembangunan Jalan & Jembatan Desa Manunggal Jaya Tgr Sbrng-Tanah Datar Muara Badak
- Peningkatan Jalan Kp. Sidodadi-Kp Kamal Desa Sanipah, Samboja
- Peningkatan Jalan Kp. Sidodadi-Kp Kamal Desa Sanipah, Samboja
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT 07 Desa Sanipah, Samboja
- Peningkatan Jalan Bukit Raya-Tanjungan Batu Kec. Tenggarong Seberang
- Peningkatan Jalan dari Ma. Muntai ke Jalan Poros Samarinda-Melak
- Penanganan Longsor SP. 3 Petung Kukar
- Peningkatan Jalan RT 13 Kp. Makasar Ds. Makarti
- Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian Ds. Bangun Rejo Tenggarong Seberang
- Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian Ds. Kerta Buana Tenggarong Seberang
- Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Ing Martadipura
- Pembuatan Jembatan Ulin Ds. Badak Ulu Ma. Badak Kukar

- Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Gas Alam Kec. Muara Badak
- Pembangunan Aula Balai Prajurit (Baterai Armed)
- Lanjutan Renovasi Gedung Kantor Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
- Renovasi BPU/ Kantor Desa di Kec. Ma. Badak (BPU Ds. Badak Ilir dan Ds. Batu-batu, Kantor Desa Badak Baru dan Ds. Badak Mekar)
- Pembangunan sarana dan prasarana penunjang PON
- Pembangunan Dermaga Tambat Kapal Desa Muara Pantuan Kec. Anggana
- Pengerukan Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pembangunan Stop Over di Kawasan Bukit Soeharto Dinas Perhubungan Kukar
- Rehab Berat SMPN 01 Kec. Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara
- Rehab Berat SDN 005 Ambarang Darat, Kec. Samboja Kukar
- Pembangunan SD & SMP Terpadu
- Bantuan untuk Penambahan Lokal MI As-Adiyah Kel. Senipah Samboja
- Pengembangan desa mandiri pangan
- Diversifikasi pangan
- Penanganan rawan pangan
- Kelembagaan ketahanan pangan
- Penerapan dan pemantapan prinsip Good Governance
- penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal, pulau terluar dan perbatasan
- Pengadaan Generator Diesel di Desa Tunjungan Kec. Ma Kaman
- Pengembangan fasilitas pelayanan agroindustri terpadu

- Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan
- Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3
- Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan (PNPM-P)
- pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (tdk dapat dilaksanakan)
- Revitalisasi Unit Pelayanan jasa alsistan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA)
- Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan
- Mekanisasi kegiatan produksi pertanian primer
- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan
- Perbaikan mekanisme subsidi pupuk
- Penyusunan kebijakan program
- Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung pertahanan pangan
- Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3
- Pengembangan magang sekolah lapang
- Pengembangan hortikultura
- Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan pengairan
- Bantuan perahu nelayan dan mesin kelompok nelayan kersik mandiri Kukar
- Pengembangan fasilitasi pelayanan agroindustri terpadu
- Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan

- Bantuan peternakan sistem DOC di desa Makarti Kec Marang kayu Kab Kukar
- Peremajaan tanaman perkebunan rakyat
- Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis
- Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- Bantuan bibit karet masyarakat desa Santan Ulu
- Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
- Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh
- Peningkatan Kapasitas SDM, Pemda, dan Masyarakat Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Pengembangan wilayah transmigrasi
- Peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM perdesaan dengan kecamatan
- Desk Pilkada
- Desk Pilkada Putaran ke II
- Pelaksanaan Diklat Linmas
- Pam Pilkada
- Bantuan Keuangan Untuk Yayasan Nuruddin Dalam Rangka Pengembangan MA. Di Samboja
- Bantuan Pengembangan Parisada Hindu Dharma Indonesia Tenggarong Seberang
- Bantuan Pembinaan Panti Asuhan Muhammadiyah Tenggarong.
- Pengembangan desa Mandiri pangan
- Integrasi tanaman ternak, kompos dan Bio gas,
- Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP)

- Pengembangan Agroindustri Perdesaan
- Bantuan Benih Bibit/Bibit, sarana produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan
- Mekanisme Pertanian Pra dan Pasca Panen
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina, dan Peningkatan Keamanan
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP).
- Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (TP)
- Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan agribisnis.
- Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana alam
- Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP)
- Peningkatan Sistem Penyuluhan,Sumber daya manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok tani
- Pengembangan Desa Mandiri pangan, Penanganan Daerah Rawan pangan dan dan Diversifikasin Pangan
- Diversifikasi pangan
- Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik dan Bencana Alam
- Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas (TP)
- Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP)
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Serta Pengembangan Kawasan (TP)
- Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (TP)
- Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur pertanian (TP)
- Pengembangan Agroindustri Perdesaan
- Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di wilayah Cepat Tumbuh

- Peningkatan kapasitas SDM, Pemda dan masyarakat transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Fasilitasi pengakhiran status Bina Pemukiman Transmigrasi di wilayah Strategis dan cepat tumbuh.
- Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negoisasi Bipartit
- Pengawasan Norma Keselamatan dan kesehatan Kerja
- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir
- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan

A.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Sejak tahun 2006-2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa departemen dan Pemerintah Propinsi yang langsung ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani tugas pembantuan, dengan rincian dana/barang tugas pembantuan yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006

No	Nama Instansi	APBN		APBD Propinsi	
		Alokasi (Rp.000)	Realisasi (Rp. 000)	Alokasi Dana (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)
1	Dinas Sosial	614.583	614.583	1.556.450	1.556.450
2	Dinas Kesehatan / RSU AM. Parikesit	1.500.000	1.389.815	1.000.000	1.000.000
3	Dinas Pertanian	3.751.600	2.079.340	900.000	900.000
4	Dinas Peternakan	184.150	182.250	2.000.000	2.000.000
5	Dinas Perikanan			600.000	174.890

6	Dinas Perkebunan	1.190,000	1.130.162	500.000	500.000
7	Dinas Transmigrasi	2.704.990	300.000	1.000.000	1.000.000
8	Dinas P U			69.400.000	33.135.476
9	Dinas Pendidikan	1,357,985			
10	Balitbangda			350.000	350.000
11	Bagian Ekonomi/PDAM			2.000.000	2.000.000
12	Bagian Perlengkapan			10.000.000	10.000.000

Tabel 5.2. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007

No	Nama Instansi	APBN		APBD Propinsi	
		Alokasi (Rp.000)	Realisasi (Rp. 000)	Alokasi Dana (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)
1	Dinas PU			87.350.000	53.138.602,975
2	Dinas Perhubungan	1.500.000	1.389.815	1.000.000	500.000
3	Dinas Pertambangan	3.751.600	2.079.340	750.000	520.019,450
4	Dinas Kesehatan/RSU AM Parikesit	6.622.200	804.529,64	4.000.000	4.000.000
5	Dinas Pendidikan			14.800.000	11.288.992,6
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	3.642.850	156.100	500,000	NIHIL
7	Dinas Perkebunan	463.476	13.952	1.000.000	910.756,85
8	Dinas Perikanan dan Kelautan	850.000	850.000	2.100.000	2.100.000
9	Dinas Peternakan	500.000	1.741	1.500.000	500.000
10	Kehutanan			1.000.000	1.000.000
11	Dinas Dikluspora			75.000	75.000
12	Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB			1.000.000	1.000.000
13	Dinas Tenaga Kerja	574.725	381.901		
14	Dinas Transmigrasi	966.914	226.834,6		
15	Badan Pemberdayaan Masyarakat	2.550.000	2.550.000		

16	Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab			605.000	
17	Bagian Ekonomi Setkab	550.000	133.398		

Tabel 5.3. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008

No	Nama Instansi	APBN		APBD Propinsi	
		Alokasi Dana	Realisasi	Alokasi Dana	Realisasi
1	Dinas PU			100.100.000.000	53.788.237.592
2	Dinas Perhubungan			66.000.000.000	19.112.903.390
3	Dinas Pendidikan Nasional			5.750.000.000	3.525.615.688
4	Sekretariat Kabupaten	555.000.000	383.439.000	1.000.000.000	62.131.000
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	3.999.522.000	3.219.952.600	750.000.000	691.653.500
6	Dinas Perikanan dan kelautan	145.000.000	122.183.000	500.000.000	457.600.500
7	Dinas Peternakan	431.200.000	429.270.000	500.000.000	214.550.000
8	Dinas Perkebunan	1.321.540.000	1.101.040.000	1.000.000.000	982.776.000
9	Dinas Tenaga Kerja	644.245.000	568.847.600		
10	Dinas Transmigrasi	375.909.000	254.389.780	500.000.000	500.000.000
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.764.370.000	7.764.370.000		
12	Badan Kesbanglinmas			650.000.000	617.337.500
13	BPKD			2.150.000.000	1.850.000.000
14	Ketahanan Pangan	555.000.000	435.000.000		
Jumlah		15.791.786.000	14.278.491.980	178.900.000.000	81.802.805.170

Tabel 5.4. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009

No	Nama Instansi	APBN	
		Alokasi (Rp.000)	Realisasi (Rp. 000)
1	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	4.302.865	4.302.865
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.073.214	1.073.214

3	Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan	711.500	711.500
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	926.300	926.300
5	Dinas Perternakan	437.720	437.720
6	Dinas Perkebunan	650.000	650.000
7	Bapemas/ Sekretariat Daerah	9.647.355	9.647.355
	Jumlah	18.083.454	18.083.454

A.6. Permasalahan Dan Solusi

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini sejak tahun anggaran 2006-2009, terdiri dari ;

1. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terutama tentang program-program yang akan dilaksanakan serta alokasi dana yang akan dikucurkan, sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang tidak diketahui secara jelas oleh pihak Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penanganan permasalahan yang kurang optimal pada program dan kegiatan untuk tugas pembantuan ini, karena pihak Pemda hanya dilibatkan pada saat program dan kegiatan tersebut mengalami hambatan.
3. Terlambatnya informasi alokasi dana yang dikucurkan, sehingga banyak kegiatan tidak sempat terlaksana.
4. Realisasi kegiatan APBN-TP tidak mencapai 100 persen disebabkan penyelesaian kegiatan terhambat masalah teknis administrasi keuangan dan teknis kegiatan di lapangan.
5. Masih banyak kegiatan pembangunan belum terakomodir dalam APBN dan APBD Prov setiap tahunnya.

Beberapa solusi yang disarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan peran koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penentuan program kegiatan dan alokasi dana yang akan ditetapkan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evalusi yang lebih optimal sehingga dalam penanganan permasalahan akan lebih mudah dan cepat.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Otonomi daerah pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan didaerah diarahkan kepada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, berbagai cara daerah mengali potensi yang ada baik itu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi dapat mengadopsi pengalaman daerah lain yang memiliki kesamaan potensi melalui kerjasama saling tukar pengalaman. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antar daerah sebagaimana pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan "bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Kerjasama antar daerah dimana kerjasama yang dilaksanakan baik kerjasama antar daerah maupun pihak ketiga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan".

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk ***Tim Koordinasi*** berupa Keputusan Bupati Nomor :180.188/HK-60/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar

Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana maksud dibentuknya tim koordinasi adalah untuk memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada kepala daerah mengenai kerjasama yang akan dilakukan diharapkan memberikan kontribusi kepada pembangunan didaerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sejak tahun 2005 sampai tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara formal pada tahun 2008 telah melakukan kerjasama dengan daerah lain yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentang potensi ekonomi kerakyatan, khususnya dalam bidang peternakan yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding) Nomor 180/MoU-2/HK/2008 tanggal 10 Maret 2008.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui eksekutif dan legislatif selain melakukan kerjasama antar daerah secara spesifik dengan diikat dalam MoU, dari tahun ketahun juga melakukan berbagi pengalaman dengan daerah lain berupa melakukan kunjungan kerja maupun studi banding ke luar daerah juga menerima kunjungan kerja delegasi dari daerah lain dimana dari hasil kunjungan kerja dimaksud selanjutnya sebagai masukan untuk tindak lanjut penetapan kebijakan.

3. Permasalahan dan solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi pelaksanaan kerjasama antara daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan melaui SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu masih adanya

prinsip-prinsip dari peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang tidak dipenuhi dan dilaksanakan, sehingga kerjasama yang dilakukan kurang memberikan kontribusi yang berarti untuk pembangunan didaerah, dan solusi kedepannya yang diharapkan agar sebelum dilakukan kerjasama perlu dilakukan kajian-kajian secara komperhensip sehingga kerjasama yang akan dilakukan nantinya dapat memberikan manfaat dan masukan kepada kepala daerah sebagai pertimbangan kebijakan lebih lanjut guna kesejahteraan masyarakat.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Untuk memaksimalkan penggalian dan pemanfaatan potensi SDA dan SDM didaerah perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dimaksud dapat berupa fisik maupun non fisik. Khusus dibidang non fisik dimaksudkan untuk menyerap pengetahuan serta keahlian khusus dari pihak ketiga selaku nara sumber disamping sebagai pendamping dalam hal pelaksanaan kegiatan/proyek baik dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, perusahaan swasta yang berbadan hukum baik berupa yayasan, BUMN maupun lembaga lainnya.

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten membutuhkan keikutsertaan pihak ketiga untuk turut memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana BAB I Pasal 1 poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, dimana bidang-bidang kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga merupakan lapangan kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip transparansi, efisiensi dan efektifitas. Tentunya diharapkan

hal ini akan dapat menguntungkan kedua pihak, baik pihak ketiga maupun Daerah.

2. Realisasi pelaksanaan kegiatan

Selama periode 2005 -2009 tercatat sebanyak 113 jenis kerja sama antara pemkab Kutai Kartanegara dengan Pihak Ketiga dengan data rincian sebagai berikut :

Tabel : Rincian Jumlah Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Periode 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kerja sama dengan Pihak Ketiga	4 item	11 item	74 item	10 item	12 item	2 item

Adapun rincian pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pemkab Kutai Kartanegara dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut :

- PT Kutai Energi : Rencana Kerja sama Usaha di Bidang Tenaga Listrik.
- Kerjasama tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/jasa pemerintah dan pendampingan pada tim verifikasi penyusunan anggaran pembangunan di kukar
- PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur
- Borneo Orang Utan Survival Foundation Kalimantan Timur : Pengembangan Hutan Kota.
- PSEKP-UGM : Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) TA 2008.
- Sub Panitia Besar Pekan Olah Raga Nasional XVII – 2008 Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Tim Penyelesaian Mutasi Atlit KONI Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kerjasama Turn Key Project tentang Pembangunan Sport Center PON 2008
- Beberapa Media/Harian di Kaltim : kerja sama halaman media.
- Metro TV : Liputan Acara Erau.
- PT. Bakrie Telekom, Tbk : Pemanfaatan dan Penggunaan Instruktur Telekomunikasi.
- WUSKI, WUS dan CIM Germany : Media Cetak.
- Lembaga Adat Seni Budaya Kumala : Pengisian Acara Hiburan pada acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- PT EL John Tirta Emas Wisata : Pengelolaan Aset Pulau Kumala
- PT Bakrie Graha Investama (BGI) : Pengelolaan Aset Hotel Singgasana dan Lesong Batu.

3. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu masih adanya prinsip-prinsip dari peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang tidak dipenuhi dan dilaksanakan, sehingga kerjasama yang dilakukan kurang memberikan kontribusi yang berarti untuk pembangunan didaerah

Adapun solusi kedepannya, diharapkan agar sebelum pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga kiranya perlu dilakukan kajian-kajian secara komprehensif sehingga kerjasama yang akan dilakukan nantinya dapat memberikan manfaat yang besar. Terkait hasil kajian ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi Pemkab sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan lebih lanjut

demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

Selama kurun waktu 2005-2009, Pemkab Kutai Kartanegara menjalin koordinasi serta komunikasi yang cukup intens dengan instansi vertikal yang berada di daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

Terwujudnya koordinasi dan komunikasi yang sinergis antar pimpinan pada tingkatan Kabupaten ternyata membuktikan bahwa semua permasalahan yang ada maupun yang diprediksi akan terjadi mampu diantisipasi guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Dalam hal penegakan supremasi hukum, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan koordinasi dengan Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan berbagai kegiatan koordinasi dan kerjasama, baik dengan pihak Kepolisian Resort (Polres) Kutai Kartanegara maupun dengan pihak Komando Distrik Militer (Kodim) 0906.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan koordinasi kegiatan statistik serta yang terkait dengan kehidupan beragama, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara intensif telah melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan kerjasama yang

berkaitan dengan urusan statistik maupun pembinaan kehidupan beragama masyarakat.

2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan koordinasi dalam bentuk rapat koordinasi yang dilaksanakan selama kurun waktu 2005-2009 tercatat sebanyak 49 kali ditambah beberapa kali rakor yang tidak tercatat dalam LPJ 2005 maupun LKPJ 2006, disebabkan belum masuk sebagai salah satu materi laporan. Disamping itu termasuk rakor yang dilakukan secara insidentil atau sewaktu-waktu terkait agenda yang mendesak sehingga tidak tercatat sebagai kegiatan rakor rutin. Adapun rincian realisasi koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel : Rincian Jumlah Kegiatan Rakor Rutin Periode 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rakor dengan instansi vertikal	-	-	24 kali	12 kali	13 kali	-

Materi rapat atau pertemuan dalam rangka koordinasi antara lain menyangkut bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang keamanan dan ketertiban umum, bidang pembangunan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang lingkungan hidup, penanganan bencana, penyelenggaraan Pemilu baik Legislatif, Presiden maupun Kepala Daerah, maupun bidang-bidang atau issu-issu lainnya yang aktual serta bersinggungan dengan kepentingan Daerah.

Bebeapa materi rapat dalam rangka koordinasi selama periode 2005-2009 antara lain meliputi :

- Pembahasan permasalahan di bidang pertambangan.
- Pembahasan mengenai Model Kota Layak Anak dengan Tim dari Kementerian Pemberdayan Perempuan RI Deputi IV Perlindungan Anak.
- Pembahasan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pembahasan bersama Tim Monitoring dan Evaluasi tentang persiapan Pekan Olah raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 Propinsi Kalimantan Timur
- Pembahasan mengenai persiapan penyambutan kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pembahasan mengenai persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Putaran kedua.
- Pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan Erau Adat Kutai Kartanegara
- Pembahasan pelaksanaan Peringatan Peristiwa Merah Putih di Sanga-Sanga.
- Pembahasan tentang Penggunaan Barang dan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Instansi Vertikal dilingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.
- Pembahasan tentang Persiapan Pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
- Pembahasan tentang Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI ke Kab. Kutai Kartanegara.
- Pembahasan tentang Penyerahan dan Peresmian Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Tenggarong.

- Pembahasan tentang Pemilu Legislatif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Pembahasan tentang Persiapan PILKADA Kab. Kukar.

Dalam rapat koordinasi yang digelar secara rutin dihadiri oleh unsur-unsur :

a. Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara
b. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
c. Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara
d. Komandan Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara
e. Kepala Kejaksaan Negeri tenggarong
f. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
g. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun pembiayaan untuk kegiatan ini termasuk dalam anggaran pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan Rakor, misalnya jadwal pelaksanaan yang berbenturan dengan agenda kegiatan lainnya, relatif dapat diatasi dengan segera oleh pihak-pihak terkait. Namun demikian, koordinasi dengan instansi vertikal terkait tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD terkait dengan tetap berkoordinasi dan berkonsultasi kepada unsur pimpinan instansi vertikal yang berkompeten. Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dilaporkan kembali kepada Pemkab.

Sementara manfaat yang dapat dirasakan adalah meningkatnya hubungan kerja sama dan sinergi antar unsur terkait dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Disamping itu dengan diadakannya koordinasi, maka dapat lebih efektif melakukan pengendalian serta evaluasi program maupun kegiatan yang berkenaan dengan bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh SKPD.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan krusial, yang dialami juga oleh pemerintah baik dipusat juga daerah, pada umumnya permasalahan batas wilayah timbul dilatarbelakangi beberapa faktor salah satunya potensi ekonomis yang berada disekitar lokasi titik perbatasan kedua wilayah, baik itu batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan hingga wilayah kelurahan/desa. Kebijakan penataan batas wilayah antar kabupaten/kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan untuk penataan batas antar kecamatan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996.

Untuk meminimalisir permasalahan tapal batas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya mengalokasikan anggaran guna menetapkan dan menyelesaikan masalah batas baik itu wilayah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan penataan batas antar kecamatan dalam Wilayah Kutai Kartanegara. Untuk pelaksanaan dilapangan telah dibentuk Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor

180.188/HK-265/2009 tanggal 18 Mei 2009, dimana komposisi tim penataan batas terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan
2. Bagian Administrasi Pertanahan
3. Bagian Hukum
4. Bapemas dan Pemdes
5. Bappeda
6. BPN

Dari alokasi anggaran yang tersedia merupakan kegiatan yang berlanjut dan ada juga yang baru untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan tapal batas antar wilayah antara lain :

1. Penataan dan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota.
2. Penataan dan penegasan batas wilayah administrasi antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU).
4. Pelatihan Pelacakan dan Penegasan Batas Daerah.

Dalam rangka penataan dan penegasan batas wilayah sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 dilakukan kegiatan penegasan hingga pemasangan patok batas berupa Pilar Batas Utama (PBU) baik pada batas wilayah antar kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga pemasangan pada batas wilayah antar kabupaten/kota serta pelatihan bagi petugas penyelesaian tapal batas.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun realisasi penataan dan penegasan hingga pemasangan PBU mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

KEGIATAN TAHUN 2005 meliputi :

1. KEGIATAN PENJAJAKAN/PELACAKAN DAN PEMASANGAN PBU BATAS WILAYAH ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA :
   a. Kesepakatan batas wilayah dengan Pemerintah Kota Balikpapan pelacakan trayek direncanakan sepanjang 30 Km, yang telah dilacak sepanjang 16 Km dan PBU yang akan dipasang sebanyak 6 PBU.
   b. Kesepakatan batas wilayah dengan Pemerintah Kota Bontang pelacakan trayek direncanakan sepanjang 16 Km, yang telah dilacak sepanjang 16 Km dan PBU yang terpasang sebanyak 3 PBU.
   c. Kesepakatan batas wilayah dengan Pemerintah Kota Samarinda pelacakan trayek direncanakan sepanjang 142 Km, yang telah dilacak sepanjang 50 Km dan rencana pemasangan PBU sebanyak 28 PBU, yang telah dipasang sebanyak 11 PBU.
   d. Kesepakatan batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Malinau pelacakan trayek direncanakan sepanjang 73 Km, dan rencana pemasangan PBU sebanyak 15 PBU, namun sampai berakhirnya tahun anggaran pelacakan dan pemasangan PBU tidak terealisasi.
   e. Kesepakatan batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pelacakan trayek direncanakan sepanjang 405 Km, dan rencana pemasangan PBU sebanyak 81 PBU, namun sampai berakhirnya tahun anggaran pelacakan dan pemasangan PBU tidak terealisasi.
   f. Kesepakatan batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pelacakan trayek direncanakan

sepanjang 306 Km, dan rencana pemasangan PBU sebanyak 61 PBU, namun sampai berakhirnya tahun anggaran pelacakan dan pemasangan PBU tidak terealisasi.

g. Kesepakatan batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten PPU pelacakan trayek direncanakan sepanjang 84 Km, dan rencana pemasangan PBU sebanyak 17 PBU, namun pemasangan PBU hanya terealisasi 1 PBU.

2. SOSIALISASI TENTANG BATAS WILAYAH UNTUK MENCARI KESEPAKATAN ANTAR KECAMATAN SE-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA :

   a. Kesepakatan batas wilayah antara Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Sanga-Sanga.

   b. Kesepakatan batas wilayah antara Kecamatan Kenohan dengan Kecamatan Kembang Janggut.

KEGIATAN TAHUN 2006 meliputi :

1. KOORDINASI PENYELESAIAN BATAS ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA :
   a. Koordinasi batas daerah dengan Kabupaten Kutai Barat.
   b. Koordinasi batas daerah dengan Kabupaten Kutai Timur.
   c. Koordinasi batas daerah dengan Kabupaten Panajam Paser Utara.
   d. Koordinasi batas daerah dengan Kabupaten Malinau.

2. PELACAKAN BATAS ANTAR KABUPATEN KOTA :

a. Pelacakan trayek batas dengan Kabupaten Kutai Barat.
b. Pelacakan trayek batas dengan Kabupaten Kutai Timur.
c. Pelacakan trayek batas dengan Kabupaten Panajam Paser.
d. Pelacakan trayek batas dengan Kota Samarinda.

3. PEMASANGAN PBU/PBA PADA TRAYEK BATAS YANG SUDAH DISEPAKATI :
   a. Direncanakan pembuatan/pemasangan PBA Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda sebanyak 12 PBA.
   b. Direncanakan pembuatan/pemasangan PBA Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan sebanyak 8 PBA.

4. PELACAKAN BATAS ANTAR KECAMATAN :
   a. Pelacakan trayek batas antar Kecamatan Tenggarong Seberang – Kecamatan Marangkayu.
   b. Pelacakan trayek batas antar Kecamatan Tenggarong Seberang – Kecamatan Sebulu.
   c. Pelacakan trayek batas antar Kecamatan Muara Jawa – Kecamatan Samboja.

5. PENATAAN BATAS WILAYAH KECAMATAN :
   a. Selain dilakukan pelacakan trayek antar dua kecamatan, juga dilakukan pengambilan koordinat untuk penataan batas wilayah Kecamatan Tenggarong.
   b. Penataan batas wilayah Kecamatan Loa Kulu.
   c. Penataan batas wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang.

6. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS UTAMA WILAYAH KECAMATAN :
   a. Batas Kecamatan Sanga-Sanga dengan Muara Jawa, sebanyak 10 PBU.
   b. Batas Kecamatan Muara Badak dengan Marangkayu, sebanyak 6 PBU.

7. PENYELESAIAN DAN PENATAAN TAPAL BATAS DESA PEMEKARAN KECAMATAN LOA KULU :
   a. Desa (Persiapan) Jembayan Tengah tertata sebanyak 15 patok cor.
   b. Desa (Persiapan) Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu, tertata sebanyak 25 patok cor.

8. TAPAL BATAS DESA/KELURAHAN DAN PEMBUATAN PETA DESA/KELURAHAN (PENATAAN WILAYAH SERTA PEMASANGAN PATOK BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN TENGGARONG):
   a. Batas Kelurahan Melayu tertata sebanyak 25 patok cor.
   b. Batas Kelurahan Loa Ipuh tertata sebanyak 25 patok cor.
   c. Batas Kelurahan Timbau tertata sebanyak 25 patok cor.

9. PENYELESAIAN DAN PENATAAN TAPAL DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN LOA JANAN :
   a. Batas Desa Bakungan tertata sebanyak 7 patok cor.
   b. Batas Desa Loa Duri Ulu tertata sebanyak 7 patok cor.
   c. Batas Desa Loa Duri Ilir tertata sebanyak 6 patok cor.

KEGIATAN TAHUN 2007 KEGIATAN MELIPUTI :

a. Kegiatan Pelacakan, Koordinasi dan Konsultasi serta Pembuatan dan Pemasangan Patok Batas Antara (PBA) untuk Penegasan Batas Kabupaten Kutai Kartanegara. Konsultasi dilakukan baik dengan Depdagri maupun Pemprop Kaltim. Sementara koordinasi dilakukan dengan Pemkab Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Malinau, Kota Samarinda dan Balikpapan, menghasilkan 4 buah Berita Acara Kesepakatan. Kegiatan pelacakan batas daerah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, berhasil melacak 18 titik koordinat sesuai UU Nomor 7 Tahun 2002. Pelacakan trayek batas dengan Kota Samarinda, berhasil melacak 14 titik koordinat ditambah 3 titik koordinat terlacak yang akan dipasang Pilar Batas Utama (PBU) oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Propinsi Kaltim. Koordinasi dengan Pemkab Malinau menyepakati tiga titik sementara untuk dilakukan pelacakan secara bersama-sama.
b. Kegiatan Pelatihan/sosialisasi, Fasilitasi Pembuatan dan Pemasangan PBU/PBA untuk Penataan Batas Wilayah antar Kecamatan target kegiatan yang akan dicapai meliputi :
   - Bertambahnya wawasan masyarakat tentang tata cara penataan batas wilayah adminstratif (18 Kecamatan)
   - Dicapainya kesepakatan peta batas wilayah Kecamatan (18 Kecamatan)
c. Terlacaknya titik koordinat batas Wilayah Kecamatan (27 trayek batas)
d. Penetapan Batas Wilayah antar Kecamatan Muara Jawa dengan Sanga-Sanga dan Batas Wilayah Kecamatan

Kenohan dengan Kembang Janggut ditandai dengan Patok Batas yang definitive (24 PBU Type C dan 44 PBA)

e. Pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Muara Badak yang dihadiri sebanyak 88 orang peserta dari Kecamatan Muara Badak dan Anggana.(2 Kecamatan)
f. Pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Marangkayu yang dihadiri sebanyak 324 orang peserta dari Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sebulu dan Muara Kaman. (4 Kecamatan)
g. Pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan kota Bangun yang dihadiri sebanyak 784 peserta dari Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, Kenohan, Muara Muntai dan Muara Wis. (5 Kecamatan)
h. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah :
   - Kegiatan Penataan Tapal Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kec. Tenggarong.
   - Kegiatan Penataan Tapal Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kec. Loa Kulu.
   - Kegiatan Penataan Tapal Batas Kelurahan.
   - Kegiatan Penyusunan Perda Tapal Batas Desa Sesuai Undang – Undang No.32 Tahun 2004. Kegiatan ini terealisasi dengan produk satu buah Perda.
i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan Pelatihan Teknis Perangkat Pemerintahan Desa Dalam Rangka Penataan Tapal Batas Desa/Kelurahan.
j. Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan
k. Kegiatan Konsultasi Penyelesaian Tapal Batas antar Kabupaten/kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Konsultasi dilakukan baik dengan Depdagri maupun Pemprop Kaltim. Sementara koordinasi dilakukan dengan Pemkab Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Malinau, Kota Samarinda dan Balikpapan, menghasilkan 4 buah Berita Acara Kesepakatan. Kegiatan pelacakan batas daerah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, berhasil melacak 18 titik koordinat sesuai UU Nomor 7 Tahun 2002. Pelacakan trayek batas dengan Kota Samarinda, berhasil melacak 14 titik koordinat ditambah 3 titik koordinat terlacak yang akan dipasang Pilar Batas Utama (PBU) oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Propinsi Kaltim. Koordinasi dengan Pemkab Malinau menyepakati tiga titik sementara untuk dilakukan pelacakan secara bersama-sama.

l. Kegiatan Inventarisir Data Permasalahan Tapal Batas Desa/Kelurahan.

KEGIATAN TAHUN 2008 MELIPUTI :

1. Kegiatan penegasan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota berbatasan yang akan dicapai meliputi :
   a. Dari target sebanyak 6 trayek batas daerah, hanya 2 trayek batas Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat direalisasikan pelaksanaannya terdiri dari :
      - Pada trayek Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan :
        - Koordinasi batas daerah di Kabupaten Kutai Barat.
        - Konsultasi ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur atas hasil koordinasi dan rencana tindak

lanjut penataan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat.

- Pelacakan Trayek Batas, mendapatkan 5 titik koordinat sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati.

b. Pada trayek Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Malinau telah dilakukan :

- Koordinasi batas daerah di Kabupaten Malinau.
- Konsultasi ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur atas hasil koordinasi dan rencana tindak lanjut penataan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Malinau.
- Pelacakan Trayek Batas pada titik gunung Belayan dan pertigaan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat.

- Kegiatan pelacakan trayek batas wilayah antar kecamatan, Target kegiatan yang dicapai meliputi pelacakan di 12 trayek batas wilayah antar kecamatan, yang dapat direalisasikan pelaksanaannya hanya 10 trayek batas wilayah antar kecamatan, yang terdiri dari :

1. Batas wilayah antara Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Muara Jawa sepanjang ± 26,52 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 26,60 Km.
2. Batas wilayah antara Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Kota Bangun sepanjang ± 29,96 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 47,30 Km.

3. Batas wilayah antara Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Samboja sepanjang ± 17,79 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 17,90 Km.
4. Batas wilayah antara Kecamatan Muara Badak dengan Kecamatan Marangkayu sepanjang ± 28,10 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 36,20 Km.
5. Batas wilayah antara Kecamatan Anggana dengan Kecamatan Muara Badak sepanjang ± 44,54 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 60,00 Km.
6. Batas wilayah antara Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Marangkayu sepanjang ± 6,46 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 6,46 Km.
7. Batas wilayah antara Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun sepanjang 36,00 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 41,80 Km.
8. Batas wilayah antara Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Sebulu sepanjang 60,00 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 68,30 Km.
9. Batas wilayah antara Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Marangkayu sepanjang 25,60 Km, dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 25,60 Km.
10. Batas wilayah antara Kecamatan SangaSanga dengan Kecamatan Loa Janan sepanjang 4,30 Km,

dari panjang keseluruhan trayek batas sesuai peta kerja sepanjang ± 4,30 Km, Sedangkan 2 trayek batas antara kecamatan yang belum terealisasi pelaksanaannya yakni :

1. Batas wilayah Kecamatan Kenohan dengan Kecamatan Kota Bangun.
2. Batas wilayah Kecamatan Kenohan dengan Muara Kaman.

Adapun realisasi beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa berupa Kegiatan Fasilitasi tentang Permasalahan Tapal Batas Desa.

KEGIATAN TAHUN 2009 meliputi :

1. **PELACAKAN BATAS WILAYAH ANTAR KABUPATEN/KOTA**

   Pelacakan Trayek Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat yang disepakati dari rencana pelacakan trayek batas sepanjang 55 km, berhasil dilacak dan disepakati sepanjang 35,60 km, dengan hasil pelacakan dan penetapan batas sebagai berikut :

   a. Pada segmen batas Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 23 Maret 2009 telah dilakukan pelacakan titik koordinat dan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada titik Koordinat yang disepakati sebagai berikut : 00°37’53,072” LS - 116°22’47,039” BT.

b. Pelacakan titik koordinat batas pada ruas batas Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Saka Lotok Kecamatan Manor Bulatn Kabupaten Kutai Barat.

C. Pelacakan pada tanggal 20 – 24 Oktober 2009 disekitar Danau Melintang antara Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis dan Desa Tanjung Batuq Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Loa Deras Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat, menghasilkan satu titik koordinat kesepakatan batas dengan tanda alam Pohon Rengas Kuning ditepi Danau Melintang.

2. **PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR :**

Konsultasi dan Koordinasi Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 April 2009, akan dilakukan pelacakan dan penegasan batas, dimana dalam pertemuan tersebut disepakati starting point Pelacakan Trayek Batas pada segment Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, segment Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur disepakati di GOTPAL (sungai buatan) dan akan dilakukan peninjauan lapangan, Pelacakan Trayek Batas yang disepakati dari rencana pelacakan trayek batas sepanjang

62,60 km pada tahun 2009, berhasil dilacak dan disepakati sepanjang 34,20 km, adapun hasil pelacakan dan penetapan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

a. Pada tanggal 7 Mei 2009 dilakukan Pelacakan Trayek Batas pada segment Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, disepakati batas pada titik koordinat 00^{o}11'02,0" LU - 116^{o}39'08,9" BT yang terletak di Muara Sungai Baluy dan ditarik garis lurus ke arah Barat (270^{o}) sampai dengan batas Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. Garis batas dimaksud akan dilakukan pelacakan lanjutan.

b. Pada tanggal 18 s.d 20 Juni 2009 dilakukan Pelacakan Trayek Batas pada segment Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dengan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal, masing-masing unsur Pemerintah Desa sepakat dan telah dipasang pilar batas sementara disebelah selatan Sungai GOTPAL (sungai buatan).

c. Pada tanggal 27 Juli 2009 di Sekretariat Propinsi Kalimantan Timur dilakukan pembahasan pelacakan lanjutan untuk menentukan titik koordinat pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) pada segment batas Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dengan Desa Mulupan Kecamatan Kutai Timur.

d. Pelacakan Trayek batas pada segment Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dengan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal dilaksanakan pada tanggal 5

– 9 Agustus 2009, dan disepakati batas di MUARA SUNGAI GOTPAL dengan titik koordinat : 0^{0o}13’38,1” LU - 11^{6o}46’35,9” BT, menuju ke arah MUARA SUNGAI BALUY dengan titik koordinat : 0^{0o}11’02” LU - 11^{6o}39’08,9” BT, dari MUARA SUNGAI GOTPAL menyeberangi SUNGAI KEDANG RANTAU menuju ke pohon Rengas dengan koordinat 0^{0o}13’35,1” LU - 11^{6o}46’35,3” BT.

3. **PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KOTA SAMARINDA :**

   Konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Juli 2009 membahas segment batas Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan segment batas Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Samarinda Utara & Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Peta kajian atas peta lampiran PP Nomor 21 tahun 1987 oleh masing-masing TIM PBD akan dioverlay oleh TIM PBD Propinsi Kalimantan Timur sebagai bahan tindak lanjut, adapun hasil kegiatan penegasan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda yaitu :

   a. Pada tanggal 27 Agustus 2009 konsultasi dan koordinasi di Sekretariat Propinsi Kalimantan Timur, dimana dalam pertemuan tersebut akan dilakukan Pelacakan Trayek Batas yang disepakati dari rencana pelacakan trayek batas sepanjang 43,20 km, namun dalam implementasi pelacakan dan penetapan batas pada tahun 2009 hanya berhasil dilacak dan disepakati sepanjang 13 km,

sedangkan sisa yang direncanakan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Samarinda masih belum ada kesepatan yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran dan perbedaan peta dasar pada segment patung lembuswana. Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian berdasarkan peta lampiran PP 21 tahun 1987, sedangkan Tim PBD Kota Samarinda berdasarkan peta lampiran PERDA Kota Samarinda. Tim PBD Kutai Kartanegara meminta kepada Pemerintah Kota Samarinda agar mencabut pilar batas yang dipasang oleh Pemkot Samarinda diluar kesepakatan, karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2006.

b. Pelacakan titik koordinat batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda pada tanggal 10 – 14 Nopember 2009 dilakukan pada trayek sekitar gunung Batuputang, menghasilkan 5 titik koordinat dan tarikan garis batas kesepakatan sepanjang ± 13 km.

4. **PELACAKAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA :**

   Kegiatan pelacakan batas wilayah yang dilacak dilapangan diarahkan pada segment-segment batas yang belum pernah dilakukan pelacakan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dengan mengacu pada Tabel Segment Batas Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, dari total panjang keseluruhan segment batas antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 1.015,76 Kilometer, yang telah

dilakukan pelacakan dilapangan baru sepanjang 414,96 Kilometer. Sehingga masih ada sepanjang 600,80 Kilometer garis batas yang harus dilakukan pelacakan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan. Untuk tahun 2009, Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan merencanakan pelacakan batas antar kecamatan sepanjang 308,50 Kilometer dan pemasangan Pilar Batas Utama sebanyak 13 (tigabelas) unit, Segment Batas Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 Sesuai dengan rencana pelacakan batas wilayah antar kecamatan, Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pelacakan segment batas antar kecamatan dengan hasil rincian sebagai berikut :

1. **Tabang – Kembang Janggut.**

   Segment batas antara Kecamatan Tabang dengan Kecamatan Kembang Janggut yang telah dilacak dilapangan sepanjang ± 54,6 Km,meliputi :

   - Desa Long Lalang Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut.
   - Desa Muara Ritan (Ritan Lama) Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut.

2. **Muara Wis – Kota Bangun**

   Segment batas antara Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Kota Bangun yang telah dilacak dilapangan sepanjang ± 13,4 Km Dari pelacakan titik koordinat batas diatas terdapat kesepakatan garis batas dilapangan antara Desa Melintang Kecamatan Muara Wis dengan Desa Pela Kecamatan Kota Bangun

3. **Muara Wis – Muara Muntai**

Segment batas antara Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Muara Muntai yang telah dilacak dilapangan sepanjang ± 14,9 Km

4. **Muara Badak – Tenggarong Seberang**

   Segment batas antara Kecamatan Muara Badak dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah dilacak dilapangan sepanjang ± 12,20 Km

5. **Marangkayu – Tenggarong Seberang**

   Segment batas antara Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang dilacak dilapangan sepanjang ± 10,3 Km

6. **Sebulu – Tenggarong Seberang**

   Segment batas antara Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah dilacak dilapangan sepanjang ± 14 Km, Pada pelacakan batas antara Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu dan Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang

7. **Sebulu – Tenggarong**

   Segment batas antara Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang dilacak dilapangan sepanjang ± 9,1 Km, segment batas antara Desa Loa Tebu Kecamatan Tenggarong dengan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu sepanjang ± 6,5 Km, segment batas antara Desa Beloro Kecamatan Sebulu dengan Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong sepanjang ± 2,6 Km

8. **Loa Kulu – Tenggarong**

   Segment batas antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong yang telah dilacak dilapangan sepanjang ± 9,5 Km, segment Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu dan Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong

9. **Loa Kulu – Loa Janan**

   Segment batas antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Loa Janan yang dilacak dilapangan sepanjang ± 11,8 Km, segment batas antara Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan sepanjang ± 4,6 Km, segment batas antara Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan sepanjang ± 7,2 Km

10. **Muara Jawa – Samboja**

    Segment batas antara Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Samboja yang dilacak dilapangan sepanjang ± 16,1 Km

    segment batas antara Kelurahan Muara Jawa Ilir dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa dengan Kelurahan Muara Sembilang dan Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja segment batas antara Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa dengan Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja (dari Jalan Poros Handil – Muara Jawa kearah Timur) sepanjang ± 5,8 Km.

5. **PEMASANGAN PILAR BATAS BATAS UTAMA (PBU)**

   Mengacu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-86/2006 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Sanga-Sanga, untuk menindaklanjuti hasil pelacakan dan penetapan batas wilayah kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, pada Tahun 2009 telah dilakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 5 (lima) unit pada segment batas antara

Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Sanga-Sanga yang dipasang pada titik koordinat dan garis batas.

6. **PELATIHAN PENEGASAN BATAS DAERAH**

   Dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelacakan dan penegasan batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan dana untuk mengirim dan mengikutsertakan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansi terkait dalam penyelesaian masalah batas dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Fakultas Geodesi UGM Yogyakarta.

   Adapun pegawai yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari :

   a. Bagian Administrasi Pemerintahan : 6 orang
   b. Bapemas dan Pemdes Kab. Kutai Kartanegara : 1 orang
   c. Kantor BPN Kab. Kutai Kartanegara : 1 orang

Permasalahan dan Solusi :

1. Pelaksanaan koordinasi batas daerah Kab. Kutai Kartanegara dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan tidak semua dapat direalisasikan kegiatannya.
2. Rencana kegiatan fisik berupa pemasangan Pilar Batas Daerah maupun Pilar Batas untuk penataan wilayah Kecamatan (PBU/PBA) juga tidak dapat direalisasikan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. terbatasnya kemampuan peralatan yang dimiliki oleh petugas teknis dari Kantor Pertanahan.
4. Faktor pendanaan

5. Tidak adanya kesepakatan obyek titik tapal batas oleh kedua belah pihak, baik itu tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan serta kelurahan/desa.
6. Panjangnya trayek yang harus ditempuh dalam pelacakan batas dan kondisi georafis yang sulit dilalui.

Solusi atas permasalahan ini yakni :

1. Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun berikutnya.
2. Diharapkan dilakukannya pencairan dana tepat waktu.
3. Untuk penyelesaian tabal batas, khususnya batas antar kabupaten/ kota, dengan difasilitasi pihak Pemerintah Provinsi setiap tahun agar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan Pemerintah Provinsi mengganggarkan biaya untuk kegiatan pelacakan dan penetapan serta pemasangan PBU pada daerah titik batas yang disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Perlu didukung alat ukur untuk memenuhi kekurangan dari BPN
5. Perlu didukung alat transportasi yang dapat dilalui dalam kondisi berat dan sulit.

7. **SENGKETA BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/ KOTA DAN PROVINSI :**

   Sengketa batas dengan Kabupaten/kota berbatasan maupun antar kecamatan yang terjadi pada tahun 2005 hingga tahun 2009 tidak ada yang cukup menonjol. Perbedaan persepsi dalam penetapan batas wilayah yang terjadi adalah akibat perbedaan referensi. Khusus beberapa permasalahan batas antar kecamatan yang terjadi, hampir seluruhnya diakibatkan karena

masih relatif kurangnya pemahaman aparat kecamatan/desa/kelurahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pada tahun 2009 secara bersamaan dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para aparat kecamatan/ desa/kelurahan yang saling berbatasan antar kecamatan.

8. **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

   SKPD penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara yang menangani penataan batas wilayah kabupaten dan antar kecamatan. Sedangkan penataan batas wilayah desa dan kelurahan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 ditangani melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2010 penataan dan penetapan batas kelurahan/desa dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah ini, berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Secara umum, bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2005 - 2010 tergolong bencana dengan skala kecil, hanya beberapa yang cukup besar dan banyak menimbulkan kerugian. Adapun jenis bencana yang sering melanda Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibagi ke dalam dua kelompok

yaitu Bencana Alam seperti banjir, dan bencana akibat kelalaian manusia berupa kebakaran dan kecelakaan.

a. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

- Bencana Banjir, Kejadian bencana banjir selama tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Banjir besar terjadi pada tahun 2007, melanda 9 kecamatan, 59 desa, 27.022 KK, atau 105.915 Jiwa, mengakibatkan kerusakan Jalan-jalan desa, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah, sarana kesehatan, rumah/pemukiman penduduk.
- Bencana Kebakaran, kejadian bencana kebakaran selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) kali tersebar di beberapa wilayah Kecamatan. Dua kejadian kebakaran yang menonjol dengan menelan kerugian cukup besar adalah Kebakaran di Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Muara Badak.

  Kebakaran di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun menghanguskan 46 unit rumah penduduk yang didiami 51 KK atau 162 jiwa. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir sekitar 6 milyar rupiah.

  Kebakaran cukup besar lainnya terjadi di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak. Bencana ini menghanguskan 14 buah rumah dan 2 unit mobil yang terbakar, jumlah keluarga yang kehilangan tempat tinggal sebanyak 16 KK atau 62 jiwa. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir sekitar 5 milyar rupiah.
- Bencana Angin Ribut (Puting Beliung), kejadian bencana Angin Puting Beliung selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali di beberapa Kecamatan, walaupun bencana ini tidak berdampak luas, tetapi cukup membuat warga menjadi cemas.

- Kecelakaan Air, kejadian Kecelakaan Air selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 6 (enam) kali, yang pada umumnya terjadi pada perairan sepanjang Sungai Mahakam.
- Kecelakaan Udara kejadian Kecelakaan Udara selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 1 (satu) kali di Kecamatan Samboja.
- Bencana Tanah Longsor, kejadian Bencana Tanah Longsor selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali di berbagai kecamatan.
- Kecelakaan Tambang, kejadian Kecelakaan Tambang selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 1 (satu) kali yakni runtuhnya trowongan batu bara PT. Kitadin di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong seberang pada tahun 2006.
- Bencana Gulma, kejadian Bencana Gulma selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 2 (dua) kali di Kecamatan Muara Muntai pada tahun 2008.
- Kecelakaan Orang Tenggelam, kejadian Kecelakaan Orang Tenggelam selama Tahun 2005 - 2010 terjadi sebanyak 8 (delapan) kali pada awal tahun 2010 di perairan Sungai Mahakam.

  Penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten secara terpadu bersama dengan masyarakat serta instansi terkait lainnya. Untuk mengkoordinasikan penanggulangan ini, dibentuk posko-posko di sekitar lokasi kejadian bencana, agar memudahkan penanganan serta penyaluran bantuan kepada para korban.

  Dari berbagai bencana yang tercatat selama tahun 2005-2010, maka jumlah kerugian yang besar terjadi pada tahun 2006 di dua Kecamatan, Kota Bangun dan Muara Badak akibat

Kebakaran pemukiman penduduk yang menelan kerugian ditaksir sekitar 18 milyar rupiah lebih.

b. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana untuk pemberian bantuan bencana selama tahun 2005-2010, berasal dari :

- Bakornas PB (Pusat) sebesar : Rp. 100.000.000,00
- Satkorlak PB (Propinsi) : 125. Ton Beras.
- Perusahaan & Masyarakat : Rp. 245.564.700,00
- Pemkab Kukar : Rp. 4.928.188.700,00
  : 3.285 Ton Beras
  : 891 Dus Mie

c. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, Pemkab Kutai Kartanegara melalui Badan Kesbang Linmas telah menyusun program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan pihak terkait. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2005-2010 adalah :

- Sosialisasi Kepmendagri Nomor 131 Tahun 2003, bagi anggota Linmas.
- Pelatihan Suskalak B bagi Satgas Linmas Kecamatan dan Desa.
- Monitoring dan koordinasi tenaga Linmas ke seluruh kecamatan.
- Pembinaan tenaga penanggulangan bencana pasca kerjasama dengan Care International di 5 Kecamatan sebanyak 150 orang.
- Pelatihan dasar Satgas Linmas di Kecamatan.
- Penyuluhan daerah rawan bencana.
- Pembinaan anggota Linmas di 18 Kecamatan.
- Fasilitasi penanggulangan bencana pada 18 kecamatan.
- Pengadaan sarana dan peralatan Satlak PB.

- Pelatihan Tenaga SAR Linmas.
- Pembentukan Tim Satlak PB, Sekretariat Satlak PB, Posko Penanganan Bencana.
- Penerbitan Buku Prosedur Tetap (PROTAP) Penanganan Bencana sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
- Pengadaan fasilitas penanganan bencana, berupa tenda pleton, speedboat, perahu karet bermesin Yamaha 40 HP, rompi pelampung dan alat komunikasi.
- Membuat Peta rawan bencana se Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Melaksanakan rapat koordinasi Satlak PB secara berkala.
- Mengaktifkan sarana komunikasi HT dan HP.
- Menyiagakan Peleton Inti Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kelinmasan di Tingkat Propinsi dan Kota Samarinda apabila dianggap perlu untuk meminta bantuan tenaga dan peralatan.
- Mengaktifkan Posko Bencana Kecamatan dan Desa.

d. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.

Pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi bencana atau rawan bencana telah dilaksanakan pada tahun 2006. Adapun potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara digolongkan dalam 2 jenis bencana yakni bencana alam dan bencana akibat ulah manusia.

Potensi bencana alam yang ada meliputi banjir air, angin topan gelombang tsunami, tanah longsor, kekeringan, kelaparan, hama tanaman. Sementara potensi bencana akibat ulah manusia meliputi: pembabatan hutan, pencemaran lingkungan, kecelakaan, konflik/sara.

Adapun wilayah rawan bencana sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA																			
		A L A M												ULAH MANUSIA							
		GEMPA BUMI	GUNUNG BERAPI	BANJIR LAHAR	BANJIR LAVA	BANJIR AIR	ANGIN TOPAN	GEL. TSUNAMI	TANAH LONGSOR	KEKERINGAN	KELAPARAN	HAMA TANAMAN	WABAH PENYAKIT	PEMB. HUTAN	INSTALASI/Ob VITAL	PENCEMARAN LINGK	KECELAKAAN	KONFLIK/SARA	TEROR/SABOTASE	AKIBAT PERANG	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Samboja					x	x	X				X		X		X					
2	Muara Jawa							X				X		X		X	X	X			
3	Sanga-sanga							X				X		X		X					
4	Loa Janan					x			X					X		X	X				
5	Loa Kulu					x	X					X		X			X				
6	Muara Muntai					X								X			X				
7	Muara Wis					X	X							X			X				
8	Kota Bangun					X								X			X				
9	Tenggarong					X								X		X	X	X			
10	Sebulu					X						X		X			X				
11	Tgr Seberang									X		X		X		X		X			
12	Anggana							X				X		X		X	X				
13	Muara Badak					X		X				X		X		X	X	X			
14	Marangkayu					X		X				X		X		X	X				
15	Muara kaman					X								X			X				
16	Kenohan					X				X		X					X				
17	Kembang Janggut					X				X	X	X		X			X				
18	Tabang					X				X	X	X		X			X				

Sumber : Badan Kesbang linmas.

d. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Secara umum kondisi ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2005 - 2010 cukup baik. Hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban hanya terjadi secara sporadis dan dapat dikatagorikan

dalam skala kecil serta tidak menimbulkan dampak luas bagi wilayah lainnya.

a. **Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)**

Di Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2005 - 2010 telah terdeteksi Indikasi konflik dan kerawanan sosial khususnya di sekitar areal Pertambangan Batu Bara dan Perkebunan. Namun secara umum, tidak terdapat gangguan atas ketenteraman dan ketertiban umum seperti konflik berbasis SARA, anarkisme ataupun separatisme yang memiliki dampak dengan skala yang cukup luas dan mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan serta sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lebih terfokus pada upaya penciptaan ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah seperti halnya penertiban IMB, HO, atau razia pelajar.

Kejadian-kejadian yang dapat dianggap cukup mengganggu ketenteraman dan ketertiban hanyalah kejadian unjuk rasa di beberapa wilayah yang sebagian besar di tenggarong sebagai ibukota kabupaten

Aksi unjuk rasa yang tercatat selama Tahun 2005 - 2010 berjumlah 247 Kali yang dilakukan oleh mahasiswa, LSM, Ormas, dan Masyarakat.

Adapun permasalahan dan tuntutan dalam unjuk rasa antara lain menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, masalah sosial budaya, pendidikan, transparansi keuangan daerah, pembangunan, ganti rugi lahan, tuntutan warga mengenai perekrutan tenaga kerja lokal maupun

permasalahan aktual lainnya. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lebih terfokus pada upaya penciptaan ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah seperti halnya penertiban IMB, KTP, PKL, MIRAS, Surat Ijin Usaha (SIU), HO, gelandangan dan pengemis (GEPENG), Pelajar, Tempat Hiburan Umum, Lokalisasi PSK, Reklame, serta Galian C dan Tambang Liar. Disamping itu juga dilakukan penertiban terhadap PNS yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner.

Secara umum persoalan yang ada dapat diatasi oleh Pemkab beserta pihak terkait, baik Muspika, perusahaan maupun masyarakat.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua SKPD ini berperan dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegak -kan Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Adapun jumlah dana yang digunakan untuk menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2005 - 2010 melalui Kantor Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 5.587.988.250,00 sementara dana yang melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat sebesar Rp. 3.314.356.500,00 sehingga jumlah seluruh dana sebesar Rp. 8.902.344.750,00 yang kesemuanya berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Penanggulangan dan Kendalanya

Selama Tahun 2005 - 2010 Upaya pencegahan dan Penanggulangan yang telah dilaksanakan Badan Kesbang dan Linmas dalam rangka mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah :

- Peningkatan Kapasitas Anggota Komuniti Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menugaskan untuk mengikuti Diklat Dasar dan Analisis Intelijen di Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Intelijen Negara (Pusdiklat BIN) di Jakarta.
- Mengintensifkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai Peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 dalam penanganan sengketa Pendirian Tempat Ibadah dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama melalui Sosialisasi di Kecamatan - Kecamatan yang dianggap rawan.
- Mengintensifkan peran Forum Persaudaraan Masyarakat Kutai Kartanegara (FPMKK) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Memfasilitasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sosialisasi Permendagri No.12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, di beberapa Kecamatan yang dinilai strategis.

- Mengadakan Riset dan Survey Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa di 18 Kecamatan.
- Sosialisasi UU NO 8 Th. 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kecamatan-kecamatan.
- Melaksanakan Forum Diskusi Politik di Kecamatan-kecamatan.
- Melaksanakan Monitoring terhadap Eks. TAH. Napol G. 30 S/ PKI pada 12 Kecamatan yang masih ada anggotanya.
- Melaksanakan Monitoring Deteksi Dini terhadap permasalahan IPOLEKSOSBUDKAM pada 18 Kecamatan.

Dengan terbentuknya berbagai lembaga tersebut diatas maka beberapa potensi konflik, bahkan Penanggulangan dan Penanganan nya dapat diatasi secara dini.

Adapun Kendala yang masih dirasakan Badan Kesbangpol dan Linmas adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, dan kurangnya Koordinasi.

Upaya pencegahan dan Penanggulangan yang telah dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta tercapainya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, maka dilaksanakan operasi rutin yang meliputi :

- Kegiatan patroli wilayah
- Piket rutin dikantor dan rumah jabatan
- Pengamanan/pengawalan pejabat daerah, pusat dan pejabat negara.
- Operasi penertiban :

- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Penertiban Orang Gila
- Penertiban Anak jalanan
- Penertiban Minuman keras
- Penertiban Penumpukan kayu, pasir, batu dan bahan bangunan
- Penertiban Jalur hijau
- Penertiban Pasar
- Penertiban/Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Penertiban Perizinan
- Penertiban/Razia anak sekolah setiap jam belajar

- Pengawasan :
  - Tempat hiburan umum
  - Ijin Keramaian
  - Galian C
  - Pajak/Retribusi Daerah
  - Izin Mendirikan Bangunan

Adapun kendala yang dihadapi Kantor Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yaitu :

- Ketersediaan dana yang berkelanjutan belum jelas.
- Kurangnya Sumber daya Manusia yang memadai.
- Belum mantapnya program yang ditetapkan atau dilaksanakan dalam rencana strategi (RENSTRA) Kantor Polisi Pamong Praja.
- Belum mantapnya struktur organisasi Kantor polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban bersama.

e. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

Selama Tahun 2005 - 2010 dalam menghadapi setiap kejadian yang dinilai riskan maka, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, maupun Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam rangka mengantisipasi serta menanggulangi serta mencari solusi atas kejadian-kejadian yang berpotensi dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Pihak-pihak terkait dimaksud adalah antara lain unsur Muspida yang terdiri dari Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun perangkat daerah terkait lainnya seperti Muspika, unsur Pemerintahan Desa, Kelurahan serta pihak swasta, LSM, ormas, mahasiswa dan masyarakat.

BAB VII.
PENUTUP

Berbagai prestasi dan kekurangan selama kurun waktu tahun 2005-2010 yang telah dituangkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan ini diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan, karena dalam siklus manajemen stratejik, laporan pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dengan penetapan perencanaan dan sebaliknya. Dengan demikian apabila semua pihak dapat memahami siklus manajemen stratejik tersebut, maka laporan keterangan pertanggungjawaban ini dipandang bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan formalitas belaka.

Capaian Kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara jujur dan sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Tantangan terbesar adalah menyiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak termarjinalisasi dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan menuju ke Visi Kabupaten Kutai Kartanegara "*Menghasilkan **Pemerintahan Kabupaten** yang **baik dan bersih**, berlandaskan azas **keadilan**, **kesetaraan**, **keragaman** dan **demokrasi** menuju terbentuknya **masyarakat yang berkualitas**, **maju**, **mandiri**, **sejahtera***" yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa, adanya kelengahan sedikit saja akan terlibas oleh arus dinamika dengan mobilitas yang sangat tinggi.

Pada akhirnya, penilaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara akhir masa jabatan ini disampaikan sepenuhnya kepada Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat.

Atas segala perhatian Dewan yang terhormat, sejak awal hingga berakhirnya sidang, saya menyampaikan ucapan terima kasih.

Tenggarong, 29 April 2010

Pj. Bupati Kutai Kartanegara

H. SULAIMAN GAFUR, SE